LAPORAN IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN

TRANSFORMASI TATA KELOLA TEMPAT PELELANGAN IKAN SUNGAI LUMPUR BERBASIS TEKNOLOGI

Disusun Oleh :

H. UBAIDILAH, S.K.M., M.K.M.

NDH : 039

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL II

ANGKATAN XXXVII TAHUN 2024

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II ANGKATAN XXXVII
TAHUN 2024

JUDUL :

TRANSFORMASI TATA KELOLA TEMPAT PELELANGAN IKAN SUNGAI LUMPUR BERBASIS TEKNOLOGI

Disusun Oleh :

UBAIDILAH, S.K.M., M.K.M.
NDH : 039

Pada hari Jum'at tanggal xxxxxx Bulan xxxxxxxxx Tahun xxxxxxxxx, Laporan Pelaksanaan Proyek Perubahan ini telah diseminarkan dan disahkan.

Palembang, xx xxxxxxx 2024

Coach,	**Penguji,**
Sri Agustina, M.E.	**Dra. Elly Fatimah, M.Si**
NIP. 19600821 198603 2 002	**NIP. 19661208 19940 1 200 1**

Mengetahui

a.n. Kepala BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan
Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial,

TRI HARTATI, S.E., M.Si
Pembina / IV.a
NIP. 197212192006042006

LEMBAR PERSETUJUAN

LAPORAN PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II ANGKATAN XXXVII
TAHUN 2024

JUDUL :

TRANSFORMASI TATA KELOLA TEMPAT PELELANGAN IKAN SUNGAI LUMPUR BERBASIS TEKNOLOGI

Disusun Oleh :

UBAIDILAH, S.K.M., M.K.M.
NDH : 039

Menyetujui untuk diseminarkan pada
Hari :
Tanggal :
Tempat :

Palembang, 10 Oktober 2024

Coach,	**Mentor,**
Sri Agustina, M.E.	**Muhammad Refly MS, S.Sos.,M.M.**
NIP. 19600821 198603 2 002	**NIP. 19690309 198810 1 001**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk dapat menyelesaikan Rancangan Proyek Perubahan yang berjudul **"TRANSFORMASI TATA KELOLA TEMPAT PELELANGAN IKAN SUNGAI LUMPUR BERBASIS TEKNOLOGI".**

Rancangan Proyek Perubahan ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi peserta dalam rangka mengikuti Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXXVII Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024.

Pada kesempatan ini penulis tidak lupa menyampaikan terima kasih dan rasa hormat kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bimbingan baik dalam menyelesaikan tugas ini maupun selama pembelajaran, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Edwar Juliartha, S.Sos.,M.M., Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
2. Ibu Hj. Aminah, S.E.,M.M., sebagai Plh. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
3. Ir. Asmar Wijaya, M.Si., sebagai Pj. Bupati Ogan Komering Ilir atas dukungan dan motivasi dalam mengikuti Pendidikan Kepemimpinan Nasional Angkatan XXXVII Tahun 2024;
4. Bapak Muhammad Refly MS, S.Sos.,M.M., sebagai Mentor dan Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir atas dukungan, arahan serta masukan dalam penyusunan Rancangan Laporan Perubahan ini;
5. Ibu Sri Agustina, M.E., selaku Coach yang telah dengan sabar membimbing dan mengarahkan sehingga *Project Leader* mampu menyusun Rancangan Proyek Perubahan sampai dengan Laporan Proyek Perubahan;

6. Bapak/Ibu Widyaiswara pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan atas *sharing knowledge* ilmu serta seluruh panitia Pelatihan Kepemimpinan Nasional Angkatan XXXVII Tahun 2024;
7. Rekan-rekan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Angkatan XXXVII Tahun 2024, atas semangat kebersamaan dan perjuangan dalam menyelesaikan tugas dan Rancangan Proyek Perubahan;
8. Para Staf di Lingkungan Dinas Perikanan Kab. OKI;
9. Rekan-rekan Tim Efektif yang sangat banyak membantu penulis dalam penulisan Rancangan Proyek Perubahan ini;
10. Selanjutnya, tak lupa untuk segenap anggota keluarga yang telah memberikan dukungan spritual dan mental serta semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan Laporan ini.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam menyelesaikan Rancangan Proyek Perubahan ini masih terdapat kekurangan, baik dalam tata cara penulisan maupun tata bahasa, oleh karena itu masukan dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan.

Demikian semoga bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan serta dapat sesuai dengaan tujuan yang diharapkan.

Penulis

Peserta PKN II Angkt. XXXVIII

DAFTAR ISI

LAPORAN IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN i
LEMBAR PENGESAHAN ii
LEMBAR PERSETUJUAN iii
KATA PENGANTAR iv
DAFTAR ISI vi
DAFTAR TABEL viii
DAFTAR GAMBAR ix
BAB I 10
1.1. LATAR BELAKANG 10
1.2. TUJUAN PROYEK PERUBAHAN 24
1.3. MANFAAT 25
BAB II 28
2.1. ANALISA MASALAH 28
2.2. STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH 32
2.2.1. Terobosan Inovatif 32
2.2.2. Pentahapan Proyek Perubahan 34
2.2.3. Pengelolaan Sumber Daya 39
2.2.4. Rencana Strategi Marketing 42
2.2.5. Strategi Marketing Hasil Proyek Perubahan 49
2.2.6. Potensi Kendala, Risiko Dan Penyelesaian 51
2.2.7. Faktor Kunci Keberhasilan 52
2.3. RENCANA STRATEGI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM DALAM PROYEK PERUBAHAN 53
2.4. PEMETAAN SIKAP PERILAKU KEPEMIMPINAN DAN RENCANA STRATEGI PENGEMBANGAN POTENSI DIRI 54
2.4.1. Hasil Self Asesment 54
2.4.2. Rencana Pengembangan Potensi Diri 57
2.5. RENCANA MATA PELATIHAN PILIHAN MENDUKUNG PROYEK PERUBAHAN 60
2.5.1. Kepemimpinan Digital 60
2.5.2. Manajemen Strategis Sektor Publik 61

2.5.3. Kemitraan Swasta dan Pemerintah 63
BAB III 67
3.1. CAPAIAN PELAKSANAAN TAHAPAN JANGKA PENDEK 67
3.1.1. Membentuk Tim Efektif Proyek Perubahan 68
3.1.2. Merancang System *e*-SKAI yang Mempercepat Proses Penerbitan SKAI 71
3.1.3. Meningkatkan Efisiensi Proses Penerbitan e-SKAI dan Penerapan Aplikasi GPS Area Prediksi Tangkap Ikan 74
3.1.4. Pelatihan dan Pembinaan Tentang *System* Digital Dan Teknologi Yang Diterapkan 77
3.1.5. Membangun Kesepahaman (MOU) dengan Stakeholders Terkait 78
3.2. MANFAAT CAPAIAN TAHAPAN JANGKA PENDEK 81
3.3. KEPEMIMPINAN STARTEGIS 83
3.4. IMPLEMENTASI STRATEGI MARKETING DAN DESEMINASI 86
3.4.1. Peta Stakeholders 86
3.4.2. Product, Price, Place, Promotion dan Customer (4P1C) 87
3.5. KEBERLANJUTAN PROYEK PERUBAHAN 88
3.6. PEMANFAATAN MATA PELATIHAN PILIHAN DALAM IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN 91
3.6.1. Kepemimpinan Digital 91
3.6.2. Manajemen Strategis Sektor Publik 92
3.6.3. Kemitraan Swasta dan Pemerintah 94
3.7. PEMBERDAYAAN ORGANISASI PEMBELAJAR 95
3.8. IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN POTENSI DIRI 98
BAB IV 103
4.1. *LESSON LEARNT* 103
4.2. KESIMPULAN 104
4.3. SARAN 105
LAMPIRAN 103

DAFTAR TABEL

Hal

Tabel 1.1. Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan & Subsektor di Kabupaten Ogan Komering Ilir (ton), 2022 & 2023 22

Tabel 1.2. Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan & Subsektor di Kabupaten Ogan Komering Ilir (ton), 2022 & 2023 22

Tabel 1.3. Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya Menurut Kecamatan & Jenis Budidaya di Kabupaten Ogan Komering Ilir, 2023 23

Tabel 1.4. Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kecamatan & Subsektor di Kabupaten Ogan Komering Ilir (ton), 2023 23

Tabel 1.5. Jumlah Perahu/Kapal Menurut Kecamatan & Jenis Kapal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, 2023 24

Tabel 2.1. Pendekatan Model ASTRID 31

Tabel 2.2. Penjelasan Analisa ASTRID 31

Tabel 2.3. Rencana Tahapan dan Kegiatan..... 37

Tabel 2.4. Stakeholder Internal dan Eksternal 44

Tabel 2.5. Identifikasi Peran *Stakeholder*..... 44

Tabel 2.6. Strategi Komunikasi *Stakeholder* 48

Tabel 2.7. Kendala dan Resiko 52

Tabel 2.8. Pengembangan Kompetensi SDM dalam Proyek Perubahan 55

Tabel 2.9. Rekomendasi Pengembangan Potensi Diri 56

Tabel 3.1. *Product, Price, Place, Promotion* dan *Customer* 88

Tabel 3.2. Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi SDM..... 97

DAFTAR GAMBAR

Hal

Gambar 1.1. Peta Wilayah Kab. OKI 10

Gambar 1.2. Struktur Organisasi Dinas Perikanan 14

Gambar 2.1. Analisis ASTRID 31

Gambar 2.2. Metode SWOT 33

Gambar 2.3. Alur Pikir 35

Gambar 2.4. Struktur Organisasi Pelaksana..... 40

Gambar 2.5. Peta Stakeholder 46

Gambar 2.6. Hasil Analisis Stakeholders..... 47

Gambar 2.7. Hasil Pemetaan Potensi Diri 57

Gambar 3.1. Koordinasi dengan Mentor..... 70

Gambar 3.2. Pembentukan Tim Efektif..... 70

Gambar 3.3. SK Pembentukan Tim Efektif 71

Gambar 3.4. Koordinasi dengan Kominfo OKI..... 72

Gambar 3.5. Tampilan Pembuatan Surat Keterangan Ikan Elektronik (e-SKAI)..... 74

Gambar 3.6. Rapat Evaluasi Layanan e-SKAI..... 76

Gambar 3.7. *Mapping* Kerjasama Dengan *Stakeholders*..... 78

Gambar 3.8. Sosialisai e-SKAI Kecamatan Cengal, Desa Pantai Harapan dan Desa Sungai Lumpur..... 78

Gambar 3.9. Pelatihan e-SKAI Dinas Perikanan OKI 79

Gambar 3.10. Koordinasi dengan Mentor 80

Gambar 3.11. Koordinasi dengan Bagian Hukum SetDa OKI 81

Gambar 3.12. Penanda Tanganan MOU Dengan Kepala Dinas Perikanan Kab. Bangka Tengah 80

Gambar 3.13. Surat MOU Dengan Kepala Dinas Perikanan Kab. Bangka Tengah 80

Gambar 3.14. Peta *Stakeholder*..... 88

Gambar 3.15. Hasil Pemetaan Potensi Diri Sebelum (Kiri) dan Sesudah (Kanan)..... 103

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kabupaten Ogan Komering Ilir Secara astronomis, terletak di antara 2°30’ - 4°15’ Lintang Selatan dan di antara 104°20’ - 106°00’ Bujur Timur Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Ogan Komering Ilir memiliki batas-batas : Utara - Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Palembang; Selatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Provinsi Lampung; Barat - Kabupaten Ogan Ilir; Timur – selat Bangka dan laut Jawa.

Kabupaten Ogan Komering Ilir terdiri dari 18 kecamatan, yaitu : Lempuing, Lempuing Jaya, Mesuji, Sungai Menang, Mesuji Makmur, Mesuji Raya, Tulung Selapan, Cengal, Pedamaran, Pedamaran Timur, Tanjung Lubuk, Teluk Gelam, Kayuagung, Sirah Pulau Padang, Jejawi, Pampangan, Pangkalan Lampam, serta Air Sugihan

Gambar 1.1. Peta Wilayah Kab. OKI

Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata + 10 meter di atas permukaan laut, terletak pada posisi 2°30’ - 4°15’ Lintang Selatan, serta 104°20’ dan 106°00’ bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1- 6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau tanggal 9 November 2022 adalah 17.071,333 km².., Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Tulung Selapan (4.480,751 km²), diikuti Kecamatan Cengal (2.631,274 km²), Kecamatan Sungai Menang (1.992,238 km²), Kecamatan Air Sugihan (1.928,136 km²) dan Kecamatan Pangkalan Lampam (1.091,334 km²). Sedangkan kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Sirah Pulau PAdang dengan luas 110,219 km2.

Perikanan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, penyediaan pangan sumber protein hewani dan peningkatan taraf hidup masyarakat, umumnya pada nelayan kecil, pembudi daya-ikan kecil dan pihak-pihak pelaku usaha di bidang perikanan dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian, dan ketersediaan sumber daya ikan.

Secara potensi, perikanan Indonesia adalah yang terbesar di dunia, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Berdasarkan modus operandi atau cara produksi, perikanan terbagi menjadi dua yaitu perikanan tangkap (*capture fisheries*) dan perikanan budidaya (*aquaculture*), dengan potensi produksi lestari sekitar 67 juta ton/tahun. Dari angka ini, potensi produksi lestari (*Maximum Sustainable Yield* = *MSY*) perikanan tangkap laut sebesar 9,3 juta ton/tahun dan perikanan tangkap di peraian darat (danau, sungai,

waduk, dan rawa) sekitar 0,9 juta ton/tahun, atau total perikanan tangkap 10,2 juta ton/tahun. Sisanya, 56,8 juta ton/tahun adalah potensi perikanan budidaya, baik budidaya laut (*mariculture*), budidaya perairan payau (tambak), maupun budidaya perairan tawar (darat).

Upaya perbaikan data produksi pada perikanan tangkap terus dilakukan Pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Perbaikan kualitas menjadi fokus, karena selama puluhan tahun terakhir, ketersediaan data produksi perikanan tangkap masih belum bisa diandalkan. Kondisi tersebut harus diperbaiki, karena pasar menuntut data yang handal dan akurat untuk saat ini dan masa mendatang.

Pencatatan data produksi hasil tangkapan ikan di Indonesia selama ini wajib dilakukan oleh kapal-kapal ikan berukuran di atas 30 gros ton (GT). Kewajiban tersebut harus dilakukan, agar Negara bisa mendapatkan data produksi tangkapan ikan secara nasional dengan akurat.

Pentingnya Sumatera Selatan memperbaiki kualitas data produksi perikanan tangkap, karena itu akan berkaitan dengan sistem ketertelusuran hasil tangkapan ikan bagi pasar. Selain itu, kualitas data juga akan memberi manfaat dan rencana bisnis bagi para pelaku usaha, dan sekaligus juga berfungsi sebagai tata kelola perikanan nasional.

Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXXVII oleh Pemerintah Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan di tahun 2024 dengan tema ***"Transformasi Penyelenggaraan Layanan Publik Untuk Meningkatkan Daya Saing Global",*** maka kami merancang proyek perubahan berjudul **Transformasi Tata Kelola TPI Sungai Lumpur Berbasis Teknologi.** Proyek ini merupakan upaya dari Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir melalui Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan Nelayan

pesisir Timur Ogan Komering Ilir, dengan menyediakan layanan e-SKAI adalah sistem elektronik yang digunakan untuk penerbitan Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI) secara online. Sistem ini memungkinkan para pelaku usaha perikanan untuk mengajukan, memproses, dan memperoleh SKAI dengan lebih cepat dan efisien melalui platform digital. Implementasi e-SKAI bertujuan untuk mempercepat birokrasi, meningkatkan transparansi, serta mendukung keberlanjutan sumber daya ikan dengan pemantauan yang lebih baik.

Penerapan aplikasi GPS yang bisa diakses para nelayan saat melaut, sehingga memudahkan dalam menemukan titik kumpul ikan. para nelayan tidak harus meraba-raba mencari lokasi tangkapan yang lebih banyak tetapi langsung diarahkan sehingga lebih efektif dan dapat menghemat waktu serta bahan bakar kapal.

Proyek perubahan yang berfokus pada transformasi tata kelola TPI Sungai Lumpur berbasis teknologi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan daya saing TPI dalam mendukung kesejahteraan nelayan dan mendorong pengembangan ekonomi lokal. Dengan modernisasi infrastruktur dan penerapan teknologi, tujuan dari proyek ini adalah menyediakan sistem aplikasi digital yang dapat diakses nelayan memberikan nilai tambah yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.

Selanjutnya, menurut Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 49 Tahun 2021, Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan di Bidang Perikanan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir di gambarkan sebagai berikut:

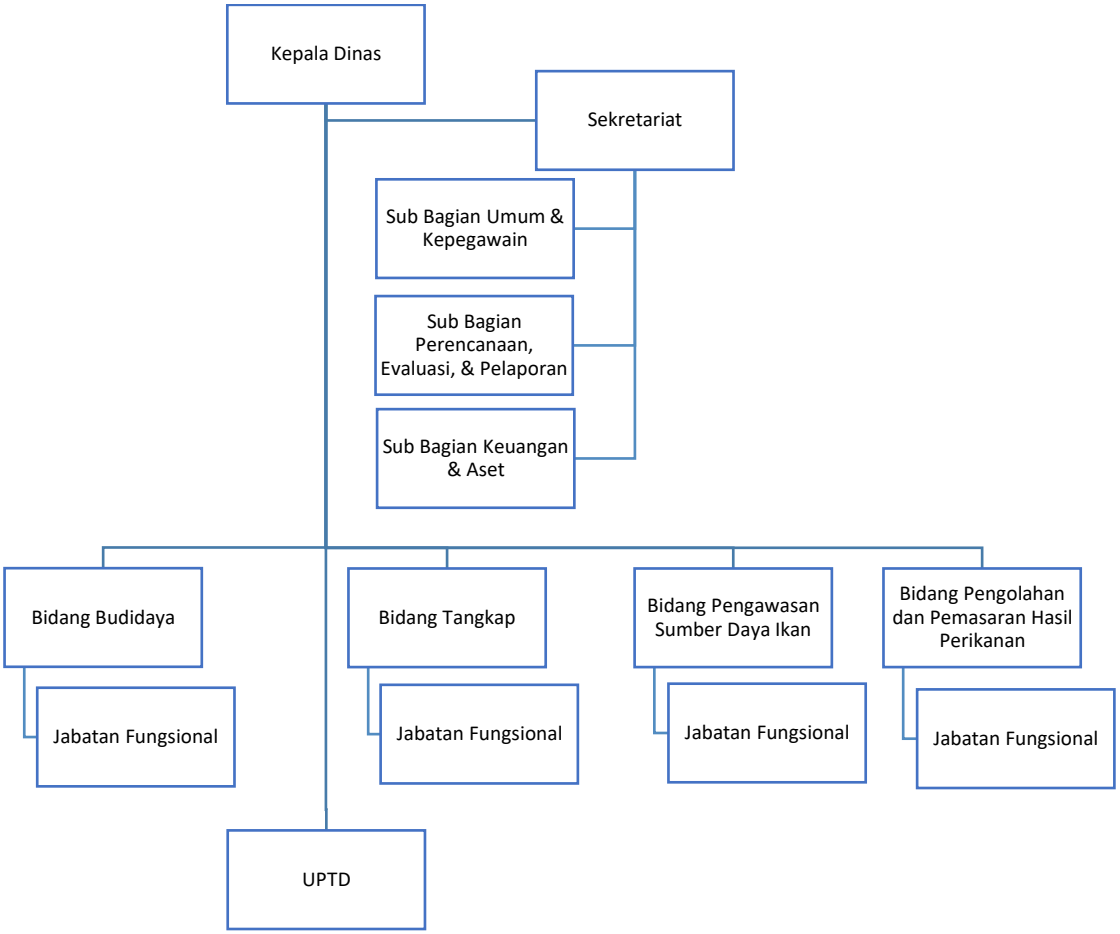

Gambar 1.2. Struktur Organisasi Dinas Perikanan

Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut di atas, Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir memiliki susunan organisasi sebagai berikut :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Keungan dan Aset ;
    3. Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
c. Bidang Budidaya;
d. Bidang Tangkap;
e. Bidang Pengawasan Sumber Daya Ikan;
f. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
g. UPTD;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Uraian tugas dan fungsi pada Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perikanan dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perikanan beralamat jalan Raya Sukadana – Sirah Pulau Padang. Kepala Dinas Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah di Bidang Perikanan.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Dinas Perikanan menyelenggarakan fungsi:

1) penyusunan program dan kegiatan dinas dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang, serta pelaporan akuntabilitas kinerja dinas;
2) pelaksanaan kebijakan bidang perikanan budidaya, perikanan tangkap, sumber daya perikanan dan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perikanan budidaya, perikanan tangkap, sumber daya perikanan dan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
4) pemantauan dan evaluasi di bidang Perikanan;
5) Pelaksanaan administrasi Dinas Perikanan;
6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Asisten sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pengelolaan administrasi

umum dan kepegawaian, perencanaan, program, pelaporan dan urusan lain yang tidak termasuk dalam tugas dan fungsi bidang-bidang di lingkungan dinas.

Dalam menjalankan tugas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

1) penyusunan program kerja sekretariat dinas perikanan;
2) pengkoordinasian perumusan dan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perikanan;
3) pengelolaan informasi dan dokumentasi;
4) pengelolaan surat menyurat, kearsipan, hukum, kehumasan dan penyusunan Produk Hukum Daerah;
5) pengkoordinir kegiatan penyusunan anggaran Dinas Perikanan;
6) penyiapan data, informasi, hubungan masyarakat serta pelaksanaan inventarisasi rumah tangga, kantor, dan pembinaan urusan umum, danaset;
7) pelaksanaan kebijakan program perikanan;
8) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan melaporkan program perikanan;
9) penyelenggaraan pengendalian internal;
10) pelaksanaan hubungan kerja dengan satuan kerja lain yang terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya;
11) koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang Perikanan;
12) pengelolaan data dan informasi di bidang Perikanan;
13) pengkoordinasian dan pelaksanaan kerja sama di bidang Perikanan;
14) pengkoordinasian pengelolaan laporan keuangan dan penyelenggaraan administrasi keuangan di lingkungan Dinas Perikanan;
15) pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas Perikanan;

16) pelaksanaan urusan kepegawaian di lingkungan Dinas Perikanan;
17) pengkoordinasian dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang Perikanan;
18) pengkoordinasian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Perikanan;
19) pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas Perikanan;
20) pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Dinas Perikanan;
21) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

c. Bidang Perikanan Budidaya

Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan tugas penyusunan kebijakan teknis, rencana, pelaksanaan verifikasi, fasilitasi perumusan, penyiapan koordinasi, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan perikanan budidaya. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi:

1) penyusunan kebijakan dan program di bidang Perikanan Budidaya;
2) penyusunan kebijakan teknis, rencana, pelaksanaan verifikasi, fasilitasi perumusan, penyiapan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pengelolaan pembudidayaan ikan;
3) penyusunan kebijakan teknis, rencana, pelaksanaan verifikasi, fasilitasi perumusan, penyiapan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan pembudidaya ikan kecil;
4) penyusunan kebijakan teknis, rencana, pelaksanaan verifikasi, fasilitasi perumusan, penyiapan koordinasi,

evaluasi dan pelaporan kawasan, kesehatan ikan dan lingungan;

5) pemantauan dan evaluasi di bidang Perikanan Budidaya;dan
6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

d. Bidang Perikanan Tangkap

Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan tugas penyusunan kebijakan teknis, rencana, pelaksanaan verifikasi, fasilitasi perumusan, penyiapan koordinasi, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan perikanan tangkap. Dalam melaksanakan tugas , Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:

1) penyusunan kebijakan dan program di bidang Perikanan Tangkap;
2) penyusunan kebijakan teknis, rencana, pelaksanaan verifikasi, fasilitasi perumusan, penyiapan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pengelolaan penangkapan ikan;
3) penyusunan kebijakan teknis, rencana, pelaksanaan verifikasi, fasilitasi perumusan, penyiapan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan nelayan kecil;
4) penyusunan kebijakan teknis, rencana, pelaksanaan verifikasi, fasilitasi perumusan, penyiapan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pengelolaan kapal perikanan dan Tempat Pelelangan Ikan;
5) pemantauan dan evaluasi di bidang Perikanan Tangkap;dan
6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

e. Bidang Pengawasan Sumber Daya Ikan

Bidang Pengawasan Sumber Daya Perikanan mempunyai tugas melaksanakan tugas penyusunan kebijakan teknis, rencana, pelaksanaan verifikasi, fasilitasi perumusan, penyiapan koordinasi, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan pengawasan sumber daya perikanan. Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Perikanan menyelenggarakan fungsi:

1) penyusunan kebijakan dan program di bidang Pengawasan Sumber Daya Perikanan;
2) penyusunan kebijakan teknis, rencana, pelaksanaan verifikasi, fasilitasi perumusan, penyiapan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pengawasan usaha perikanan budidaya;
3) penyusunan kebijakan teknis, rencana, pelaksanaan verifikasi, fasilitasi perumusan, penyiapan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pengawasan usaha perikanan tangkap;
4) penyusunan kebijakan teknis, rencana, pelaksanaan verifikasi, fasilitasi perumusan, penyiapan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pengelolaan pengawasan usaha, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
5) pemantauan dan evaluasi di bidang Pengawasan Sumber Daya Perikanan;dan
6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

f. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas melaksanakan tugas penyusunan kebijakan teknis, rencana, pelaksanaan verifikasi, fasilitasi perumusan,

penyiapan koordinasi, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan menyelenggarakan fungsi:

1) penyusunan kebijakan dan program di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
2) penyusunan kebijakan teknis, rencana, pelaksanaan verifikasi, fasilitasi perumusan, penyiapan koordinasi, evaluasi dan pelaporan data dan informasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
3) penyusunan kebijakan teknis, rencana, pelaksanaan verifikasi, fasilitasi perumusan, penyiapan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pengolahan hasil perikanan;
4) penyusunan kebijakan teknis, rencana, pelaksanaan verifikasi, fasilitasi perumusan, penyiapan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pemasaran hasil perikanan;
5) pemantauan dan evaluasi di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;dan
6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

g. UPTD

Pada Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir dapat dibentuk UPTD sesuai dengan kemampuan daerah yang pembentukannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembentukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. UPTD dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai wilayah kerja satu

atau beberapa Kecamatan. UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

h. Jabatan Fungsional

1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peratuan perundang-undangan.
2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok Jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
3) Selain Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Jabatan Fungsional yang dipimpin oleh Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang selaku koordinator pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
4) Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas membantu koordinator dalam penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok Jabatan fungsional dan masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
5) Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh pejabat Pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwewenang.
6) Ketentuan mengenai pembagian tugas dan fungsi Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Perikanan pada tahun 2023, jumlah produksi perikanan tangkap menurut kecamatan, produksi terbanyak dihasilkan di Kecamatan Tulung Selapan dan Cengal. Total produksi perikanan tangkap di

Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tahun 2023 sebanyak 55.924,50 ton. Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kabupaten Ogan Komering Ilir, 2022 dan 2023.

Tabel 1.1. Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan & Subsektor di Kabupaten Ogan Komering Ilir (ton), 2022 & 2023

Kecamatan *Subdistrict*	Perikanan Laut *Marine Fisheries*		Perairan Umum *Inland Water*		Jumlah *Total*	
	2022 r	2023	2022 r	2023*	2022 r	2023*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Lempuing	-	-	112	50	112	50
Lempuing Jaya	-	-	1.650	511	1.650	511
Mesuji	-	-	120	30	120	30
Sungai Menang	846	746	1.377	100	2.223	846
Mesuji Makmur	-	-	-	-	-	-
Mesuji Raya	-	-	285	35	285	35
Tulung Selapan	636	536	1.755	607	2.391	1.143
Cengal	2.136	847	1.407	45	3.543	892
Pedamaran	-	-	1.764	531	1.764	531
Pedamaran Timur	-	-	225	24	225	24
Tanjung Lubuk	-	-	750	92	750	92
Teluk Gelam	-	-	40	102	40	102
Kota Kayu Agung	-	-	2.550	453	2.550	453
Sirah Pulau Padang	-	-	2.385	508	2.385	508
Jejawi	-	-	2.250	509	2.250	509
Pampangan	-	-	3.729	496	3.729	496
Pangkalan Lampam	-	-	336	40	336	40
Air Sugihan	-	278	1.284	92	1.662	370
Ogan Komering Ilir	**3.618**	**2.407**	22.019	4.225	26.015	6.632

Tabel 1.2. Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan & Subsektor di Kabupaten Ogan Komering Ilir (ton), 2022 & 2023

Kecamatan *Subdistrict*	Perikanan Laut *Marine Fisheries*		Perairan Umum *Inland Water*		Jumlah *Total*	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Lempuing	-	-	53,31	62,16	53,31	62,16
Lempuing Jaya	-	-	2.249,97	2.592,97	2.249,97	2.592,97
Mesuji	-	-	23,69	32,68	23,69	32,68
Sungai Menang	11.816,62	8.186,99	258,22	226,51	12.074,84	8.413,50
Mesuji Makmur	-	-	-	-	-	-
Mesuji Raya	-	-	71,55	49,62	71,55	49,62
Tulung Selapan	7.316,84	14.440,15	729,61	2.069,76	8.046,45	16.509,91
Cengal	8.849,00	12.031,36	17,44	52,61	8.866,44	12.083,97
Pedamaran	-	-	1.910,23	3.561,37	1.910,23	3.561,37
Pedamaran Timur	-	-	12,57	25,16	12,57	25,16
Tanjung Lubuk	-	-	119,56	142,47	119,56	142,47
Teluk Gelam	-	-	66,43	212,66	66,43	212,66
Kota Kayu Agung	-	-	1.270,06	2.160,09	1.270,06	2.160,09
Sirah Pulau Padang	-	-	2.427,53	2.848,96	2.427,53	2.848,96
Jejawi	-	-	2.098,83	2.865,66	2.098,83	2.865,66
Pampangan	-	-	3.050,41	2.891,17	3.050,41	2.891,17
Pangkalan Lampam	-	-	127,97	160,03	127,97	160,03
Air Sugihan	2.162,00	1.060,37	180,50	251,75	2.342,50	1.312,12
Ogan Komering Ilir	**30.144,46**	**35.718,87**	**14.667,88**	**20.205,63**	**44.812,34**	**55.924,50**

Sumber/*Source*: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir/ *Fishery and Ocean Service of Ogan Komering Ilir Regency*

Tabel 1.3. Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya Menurut Kecamatan & Jenis Budidaya di Kabupaten Ogan Komering Ilir, 2023

Kecamatan *Subdistrict*	Budidaya Laut *Marine Culture*	Tambak *Brackish Water Pond*	Kolam Fresh *Water Pond*	Keramba *Cage*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Lempuing	-	-	775	52
Lempuing Jaya	-	-	115	56
Mesuji	-	-	110	-
Sungai Menang	-	5.555	9	28
Mesuji Makmur	-	-	33	-
Mesuji Raya	-	-	35	4
Tulung Selapan	-	5.490	24	20
Cengal	-	7.159	6	5
Pedamaran	-	-	90	90
Pedamaran Timur	-	-	21	-
Tanjung Lubuk	-	-	51	25
Teluk Gelam	-	-	39	40
Kota Kayu Agung	-	-	52	450
Sirah Pulau Padang	-	-	32	640
Jejawi	-	-	16	28
Pampangan	-	-	36	130
Pangkalan Lampam	-	-	27	4
Air Sugihan	-	-	18	-
Ogan Komering Ilir	**-**	**18.204**	**1.489**	**1.572**

https://okikab.bps.go.id

Tabel 1.4. Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kecamatan & Subsektor di Kabupaten Ogan Komering Ilir (ton), 2023

Kecamatan *Subdistrict*	Budidaya Laut *Marine Culture*	Tambak *Brackish Water Pond*	Kolam Fresh *Water Pond*	Keramba *Cage*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Lempuing	-	-	15.091,96	36,36
Lempuing Jaya	-	-	7.556,75	67,87
Mesuji	-	-	352,04	-
Sungai Menang	-	46.707,42	133,33	155,38
Mesuji Makmur	-	-	77,42	-
Mesuji Raya	-	-	369,93	21,51
Tulung Selapan	-	31.258,07	245,85	48,57
Cengal	-	24.898,02	199,1	23,96
Pedamaran	-	-	394,96	208,86
Pedamaran Timur	-	-	54,66	-
Tanjung Lubuk	-	-	464,49	13,78
Teluk Gelam	-	-	41,05	28,42
Kota Kayu Agung	-	-	729,94	3.071,37
Sirah Pulau Padang	-	-	904,54	4.101,34
Jejawi	-	-	1.069,77	2.432,94
Pampangan	-	-	108,89	287,96
Pangkalan Lampam	-	-	37,11	11,01
Air Sugihan	-	-	37,03	-
Ogan Komering Ilir	**-**	**102.863,510**	**27.868,82**	**10.509,33**

https://okikab.bps.go.id

Tabel 1.5. Jumlah Perahu/Kapal Menurut Kecamatan & Jenis Kapal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, 2023

Kecamatan *Subdistrict*	Perahu Tanpa Motor *Nonpowered Boat*	Perahu Motor Tempel *Outboard Motorboat*	Kapal Motor *Inboard Motorboat*
(1)	(2)	(3)	(4)
Lempuing	4	51	-
Lempuing Jaya	10	102	-
Mesuji	7	23	-
Sungai Menang	10	53	355
Mesuji Makmur	-	-	-
Mesuji Raya	-	-	-
Tulung Selapan	17	163	423
Cengal	9	48	450
Pedamaran	18	151	-
Pedamaran Timur	6	32	-
Tanjung Lubuk	10	33	-
Teluk Gelam	7	17	-
Kota Kayu Agung	27	668	-
Sirah Pulau Padang	31	675	-
Jejawi	35	684	-
Pampangan	24	396	-
Pangkalan Lampam	9	136	-
Air Sugihan	10	143	346
Ogan Komering Ilir	**234**	**3.375**	**1.574**

Sumber/*Source*: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir/ *Fishery and Ocean Service of Ogan Komering Ilir Regency*

https://okikab.bps.go.id

1.2. TUJUAN PROYEK PERUBAHAN

Tujuan Utama disusunnya Rancangan Proyek Perubahan ini adalah untuk mengoptimalkan meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan Nelayan pesisir Timur Ogan Komering Ilir, dengan menyediakan layanan e-SKAI adalah sistem elektronik yang digunakan untuk penerbitan Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI) secara online.

Pencapaian tujuan utama tersebut, dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan tujuan, yaitu:

- Jangka Pendek
  1. Membangun Tim Efektif Proyek Perubahan
  2. Merancang system e-SKAI yang mempercepat proses penerbitan SKAI

3. Meningkatkan efisiensi proses penerbitan e-SKAI dan penerapan Aplikasi GPS area prediksi tangkap Ikan
4. Pelatihan dan pembinaan tentang system digital dan teknologi yang diterapkan
5. Membangun kesepahaman (MOU) dengan stakeholders terkait

- Jangka Menengah:
  1. Menyediakan perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk mendukung system aplikasi GPS area tangkap Ikan;
  2. Implementasi aplikasi GPS area prediksi Tangkap Ikan yang dapat di Akses oleh Nelayan ;
  3. Memperluas cakupan pelatihan Nelayan dan stakeholder layanan e-SKAI dan layanan informasi area tangkap ikan berbasis GPS area prediksi tangkap ikan;
  4. Mendapatkan umpan balik positif dari Nelayan dan stakeholder mengenai pengalaman mereka dalam mengunakan aplikasi layanan e-SKAI dan layanan informasi area tangkap ikan berbasis GPS area tangkap Ikan.
- Jangka Panjang
  1. Melanjutkan penerapan Proyek Perubahan
  2. Tercipta Peningkatan Pendapatan Nelayan Dan Kualitas Hidup Nelayan Dan Terjadi Peningkatan Yang Signifikan Sektor Perikanan Terhadap Perekonomian Lokal Dan Nasional

1.3. MANFAAT

a. Manfaat Nilai Ekonomis

1. Efisiensi waktu dan biaya bagi pengguna Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI),
2. Efisiensi biaya operasional dan waktu dalam pengurusan SKAI serta penghasilan yang lebih baik bagi nelayan

3. Peningkatan investasi daerah dan minat berusaha sebagai hasil karena kemudahan peluang berusaha
4. Optimalisasi potensi ekonomi daerah melalui program inovasi yang bernilai tambah.

b. Manfaat Umum Proyek Perubahan

1. Tersedianya sarana dan prasarana TPI Sungai Lumpur yang memadai
2. Terpenuhinya pengetahuan para nelayan terkait penggunaan teknologi
3. Terselesaikannya masalah nelayan dengan modernisasi dan transformasi tata kelola
4. Terselenggaranya implementasi proyek perubahan untuk mendukung kesejahteraan nelayan

c. Manfaat bagi Organisasi (Dinas Perikanan Kabupaten ogan Komering Ilir):

1. Penggunaan Teknologi Digital akan mempercepat dan memudahkan proses penerbitan SKAI, mengurangi waktu dan sumber daya yang dibutuhkan dlm mengelola TPI
2. Data yang terkumpul dari system Digital dapat dilakukan analisis mendalam dalam mengambil kebijakan berbasis data
3. Keberhasilan proyek ini meningkatkan citra OPD sebagai innovator dalam bidang perikanan

d. Pihak Eksternal:

- **Manfaat bagi Stakeholder:**
  1. Terciptanya kesadaran nelayan kecil tentang akurasi data hasil tangkapan;
  2. Peningkatan kualitas hidup nelayan kecil;
  3. Teridentifikasinya permasalahan yang dihadapi oleh nelayan kecil di lapangan

4. Memudahkan nelayan kecil dalam menginput data hasil tangkapan sehingga capaian target valid dan akurat.
5. Stakeholder akan memiliki akses ke data dan informasi yang lebih akurat dan terkini yang dapat membantu dalam perencanaan, pengambilan keputusan
6. Keterlibatan stakeholder yang lebih baik, kolaborasi anatara nelayan dan TPI, Pemerintah, dan sektor swasta dalam pengembangan sektor perikanan
7. Kesempatan berusaha yang lebih luas bagi kalangan swasta dan investor Perusahaan daerah.

- **Manfaat Bagi Masyarakat:**
  1. Dengan system Teknologi Digital e-SKAI pengurusan SKAI menjadi efisien dan transparan akan mempercepat dan memudahkan proses penerbitan SKAI, mengurangi waktu dan sumber daya yang dibutuhkan;
  2. Program pelatihan dan edukasi akan memberdayakan nelayan dengan ketrampilan baru dalam penggunaan teknologi dan meningkatkan Kemandirian
  3. Kenaikan pendapatan dapat berkontribusi ada peningkatan kualitas hidup Masyarakat termasuk ke akses Pendidikan dan layanan lainnya.

BAB II

RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN

2.1. ANALISA MASALAH

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan pasal 46 ayat 2 menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah perlu mengadakan pusat data dan informasi perikanan untuk menyelenggarakan sistem informasi dan data statistik perikanan. Mengacu kepada ketentuan undang-undang ini, maka pengembangan sistem informasi perikanan termasuk dalam hal pengelolaan sumberdaya dan lingkungan perikanan menjadi bagian penting dari kegiatan pembangunan perikanan di Indonesia.

Berdasarkan data BPS, Nilai tukar nelayan Bulan januari 2023 naik 0,25 persen jika dibandingkan dengan Bulan Desember 2022. Kendatipun demikian, nelayan tradisional cenderung berada pada level bawah piramida sosial ekonomi Indonesia, yang hidup dalam kemiskinan.

Karakteristik nelayan tradisional yang sebagian besar nelayan kecil di Sumatera Selatan masih setia menggunakan sistem pencatatan hasil tangkapan ikan yang belum optimal. Metode tersebut dinilai harus diperbarui dan diperbaiki untuk kebaikan mereka dalam bersaing dengan nelayan modern. Agar nelayan kecil bisa berkembang dan memperbaiki sistem hasil tangkapan ikan, Dinas Perikanan Kab. OKI memberikan dukungan peningkatan kapasitas nelayan dengan mendorong inovasi baru berupa digitalisasi tata kelola nelayan yang memudahkan nelayan kecil untuk mencatat hasil tangkapannya dengan akurat.

Perlu diketahui bahwa pengelolaan data yang baik akan turut membantu instansi dapat mencapai target sesuai dengan perencanaan. Berdasarkan kondisi yang ada pada saat ini dan berharap adanya kondisi yang ideal serta memperhatikan Visi dan Misi

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan.

Isu strategis terkait permasalahan yang terjadi pada bidang perikanan dan penyelasaiannya di Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan salah satu prioritas karena memiliki dampak yang besar pada upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan peningkatan produksi perikanan di Kabupaten Ogan komering Ilir. Beberapa isu strategis yang terjadi pada Dinas Perikanan diantaranya adalah kurangnya sarana dan prasarana pada TPI ataupun fasilitas pendukung lainnya, potensi perikanan ataupun potensi produksi yang masih belum maksimal dan lain sebagainya.

Penanganan pada permasalahan yang telah disebutkan di atas berjalan lurus dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah menyebutkan bahwa Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan perangkat Daerah penyelenggara kewenangan Pemerintah di bidang perikanan.

Untuk menentukan masalah atau isu yang paling strategis pada Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir dapat dilakukan dengan melakukan analisis menggunakan model ASTRID (Aktual, Spesifik, Transformatif, Relevan, Inovatif dan Dapat Diintervensi). Selanjutnya, dari beberapa isu strategis setelah itu dilakukan pembobotan untuk penentuan isu yang paling relevan dan dapat dilaksanakan di Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Untuk isu aktual diberikan bobot maksimal :10, spesifik: 10, transformasi :20, relevan :20, inovatif :20, dan dapat diintervensi: 20. Berikut merupakan hasil analisis isu strategis pada Dinas Perikanan menggunakan model ASTRID.

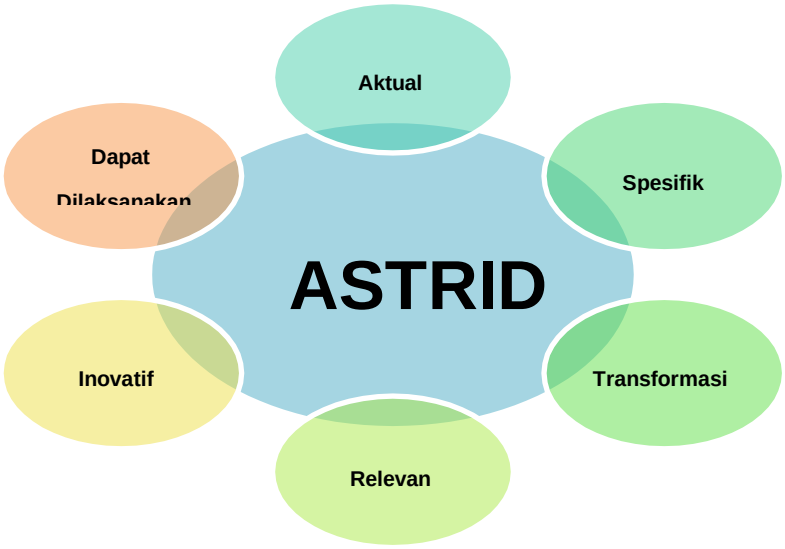

Gambar 2.1. Analisis ASTRID

Tabel 2.1. Pendekatan Model ASTRID

NO	ISU STRATEGIS	KRITERIA ISUE STRATEGIS UNTUK AKSI PERUBAHAN (ASTRID)							
		Aktual (15)	Spesifik (10)	Transformasi (20)	Relevan (15)	Inovatif (20)	Dpt intervensi (20)	Jumlah	Peringkat
1.	Kurangnya Sarana dan Prasarana yang ada di TPI Sungai Lumpur	10	5	10	15	5	5	50	3
2	Minimnya pemanfaatan terhadap teknologi oleh para nelayan di TPI Sungai Lumpur yang menghambat pendapatan nelayan	**10**	**10**	**20**	**15**	**20**	**20**	**95**	**1**
3	Belum adanya Cold Storage tempat penyimpanan ikan di TPI Sungai Lumpur	**15**	**10**	**6**	**15**	**10**	**20**	**86**	**2**

Tabel 2.2. Penjelasan Analisa ASTRID

No	Kriteria	Bobot Kriteria	Masalah Utama	Keterangan
1.	Aktual	15	10	Adanya Instrumen kebijakan merupakan bentuk implementasi isu strategis yang cukup aktual.
2.	Spesifikasi	10	10	Aspek kejelasan dan kepastian kebijakan merupakan isu spesifik yang sangat dibutuhkanoleh masyarakat

3.	Tranformasi	20	20	Pelayanan TPI bersifat kualitatif, dengan adanya tranformasi kebijakan digital akan mennjadi katalis dalam percepatan layanansosial
4.	Relevan	15	15	Pelayanan TPI yang berbasis digital akan mendorong jenis layanan yang berpihak pada para Nelayan
5.	Inovatif	20	20	Pemanfaatan data digital dalam pembuatan keputusan mendorong pelay yang terbuka , partisipatif dan menerapkan nilai-nilaiintegritas
6.	Dapat diintervensi	20	20	Isu strategis ini dapat dintervensi dalam masaPKN

Berdasarkan analisa model ASTRID di atas, nilai tertinggi yang menjadi isu strategis adalah **"Minimnya pemanfaatan terhadap teknologi oleh para nelayan di TPI Sungai Lumpur yang menghambat pendapatan nelayan".** Isu tersebut menjadi isu yang perlu didalami lebih jauh untuk mengetahui akar masalahnya. Isu terkait Pemanfaatan Terhadap Teknologi oleh para Nelayan menjadi isu utama yang berkaitan erat dengan pengetahuan nelayan agar dapat mempermudah kegiatan penangkapan ikan serta dapat meningkatkan produksi perikanan yang berpengaruh dengan kesejahteraan nelayan.

Setelah dilakukan Analisa metode ASTRID diketahui bahwa Pengelolaan Transformasi Tata Kelola Tempat Pelelangan Ikan Sungai Lumpur Berbasis Teknologi belum memadai dikarenakan kurangnya pengetahuan dan pemanfaatan terhadap teknologi oleh para nelayan di TPI sungai lumpur yang mengakibatkan rendahnya pendapatan nelayan. Faktor penyebab dan akar permasalahan yang diuraikan di atas, selanjutnya ditentukan pemecahan masalah dengan Metode SWOT seperti berikut ini:

TRANSFORMASI TATA KELOLA TEMPAT PELELANGAN IKAN SUNGAI LUMPUR BERBASIS TEKNOLOGI **KURANGNYA PENGETAHUAN DAN PEMANFAATAN TERHADAP TEKNOLOGI OLEH PARA NELAYAN DI TPI SUNGAI LUMPUR YANG MENGAKIBATKAN RENDAHNYA PENDAPATAN NELAYAN**	**Weaknesses (W)** ✓ **Investasi:** Investasi awal untuk perangkat GPS dan pengembangan aplikasi mungkin cukup tinggi. ✓ **Kurang menguasai Teknologi:** Nelayan belum mampu dan belum bisa memanfaatkan teknologi dengan tepat untuk mendukung dalam proses penangkapan ikan ✓ **Keterampilan Pengguna:** Tidak semua nelayan memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menggunakan teknologi ini dengan efektif. ✓ **Keterbatasan Akses:** Akses internet yang tidak merata di daerah pesisir dapat membatasi efektivitas aplikasi.	**Threats (T)** ✓ **Persaingan dari Teknologi Lain:** Munculnya aplikasi atau teknologi lain yang menawarkan solusi serupa dapat menambah persaingan. ✓ **Risiko Keamanan Data:** Ada risiko terhadap keamanan data dan privasi pengguna, termasuk potensi penyalahgunaan informasi. ✓ **Perubahan Lingkungan:** Perubahan iklim dan pencemaran dapat memengaruhi keberadaan ikan, meskipun teknologi sudah ada. ✓ **Regulasi yang Berubah:** Kebijakan pemerintah yang berubah dapat mempengaruhi cara penggunaan teknologi dalam sektor perikanan.
Strengths (S) ✓ **Akurasi Penangkapan:** Penggunaan GPS memungkinkan nelayan untuk mengetahui lokasi terbaik untuk menangkap ikan, meningkatkan efisiensi dan hasil tangkapan. ✓ **Pengurangan Biaya Operasional:** Dengan informasi yang tepat tentang lokasi ikan, nelayan dapat menghemat waktu dan bahan bakar. ✓ **Data Real-Time:** Aplikasi dapat memberikan data dan informasi secara langsung tentang kondisi perairan, cuaca, dan keberadaan ikan. ✓ **Transparansi dan Kepercayaan:** Sistem berbasis teknologi dapat meningkatkan kepercayaan antara nelayan dan pembeli melalui data yang transparan.	**Strategi S-O** ✓ **Akurasi Penangkapan dan Ekosistem Digital:** Kekuatan dalam akurasi penangkapan yang ditawarkan oleh aplikasi GPS dapat memanfaatkan peluang pengembangan ekosistem digital. Dengan data yang tepat, nelayan dapat lebih mudah menemukan lokasi penangkapan ikan secara online yang dapat meningkatkan pendapatan nelayan. ✓ **Data Real-Time untuk Kolaborasi:** Data yang dihasilkan dari aplikasi dapat digunakan untuk kolaborasi dengan peneliti dalam pengelolaan sumber daya ikan, mendorong inovasi dalam metode penangkapan dan konservasi.	**Strategi S-T** ✓ **Transparansi Menghadapi Persaingan:** Kekuatan dalam transparansi data dapat membantu nelayan bersaing dengan teknologi lain yang ada. Jika nelayan mampu menunjukkan hasil tangkapan yang valid dan data akurat, mereka dapat menarik lebih banyak pembeli. ✓ **Mengurangi Risiko Ketergantungan:** Dengan pengembangan sistem yang baik, nelayan dapat mengurangi risiko yang terkait dengan ketergantungan pada teknologi, seperti memiliki backup manual atau pelatihan untuk situasi darurat.
Opportunities (O) ✓ **Pengembangan Ekosistem Digital:** Penerapan teknologi GPS dapat menjadi langkah awal untuk mengembangkan sistem digital yang lebih luas, termasuk pemasaran online. ✓ **Kolaborasi dengan Peneliti:** Kerja sama dengan institusi penelitian dapat membantu mengembangkan algoritma yang lebih baik untuk pendeteksian ikan. ✓ **Dukungan Pemerintah dan Lembaga:** Kesadaran tentang pentingnya teknologi dalam perikanan dapat menarik dukungan dari pemerintah dan lembaga non-pemerintah. ✓ **Kesadaran Pengelolaan yang berkelanjutan:** Data yang dihasilkan dapat digunakan untuk konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan secara berkelanjutan.	**Strategi W-O** ✓ **Menerapkan tata kelola TPI yang berbasis teknologi** secara berkelanjutan ✓ **Meningkatkan Kapasitas Nelayan dengan melakukan pelatihan dan peningkatan Keterampilan.** Program pelatihan yang didukung oleh pemerintah atau lembaga swasta dapat meningkatkan kemampuan nelayan dalam menggunakan aplikasi. Para Nelayan menguasai dan memiliki akses terhadap teknologi ✓ **Kemitraan Strategis untuk Infrastruktur:** Biaya awal untuk implementasi dapat diminimalkan melalui kemitraan dengan lembaga pemerintah atau swasta, yang bisa menyediakan perangkat dan pelatihan tanpa membebani nelayan secara langsung.	**Strategi W-T** ✓ **Risiko Ketergantungan dan Keamanan Data:** Ketergantungan pada teknologi dapat diperburuk oleh ancaman keamanan data. Perlu ada rencana mitigasi untuk melindungi data pengguna dan memastikan keberlanjutan operasi jika terjadi gangguan. ✓ **Tantangan Akses dan Perubahan Lingkungan:** Keterbatasan akses internet di daerah pesisir dapat memperburuk dampak perubahan lingkungan. Perlu strategi untuk mengembangkan alternatif komunikasi dan pemantauan untuk menjangkau nelayan yang terpinggirkan.

Gambar 2.2. Metode SWOT

2.2. STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH

2.2.1. Terobosan Inovatif

Inovasi bertujuan untuk memudahkan dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Inovasi muncul didasarkan pada kondisi saat ini dan permasalahannya, untuk dapat mencapai kondisi yang diharapkan. Inovasi yang dilakukan melalui pelaksanaan proyek perubahan melalui kegiatan “Transformasi Tata Kelola Tempat Pelelangan Ikan Sungai Lumpur Berbasis Teknologi”. Proyek perubahan dilakukan berdasarkan permasalahan pada Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi di bidang perikanan.

Dengan adanya transformasi teknologi perikanan tangkap dari manual menjadi digital, maka kualitas pendataan hasil tangkapan ikan nelayan di Kab. OKI diyakini akan semakin lebih baik. Namun, agar sistem aplikasi tersebut bisa bermanfaat, Pemerintah daerah harus terus meningkatkan jangkauan dan tingkat pemanfaatannya ke semua nelayan. Selain faktor efisiensi,

penggunaan sistem pendataan digital juga akan lebih mudah digunakan oleh nelayan kecil dan nakhoda kapal perikanan. Dengan demikian, pencatatan data produksi hasil penangkapan ikan juga akan semakin mudah dilakukan oleh mereka.

Data yang akurat akan menjadi pijakan dalam pengelolaan perikanan skala kecil di Indonesia yang sejauh ini telah mengalami banyak perbaikan. Oleh karena itu, melalui Rancangan Proyek Perubahan ini berharap bisa berkontribusi pada peningkatan kualitas data perikanan tangkap di Sumatera Selatan. Dengan demikian, rencana pengelolaan perikakan pada akhirnya bisa disusun berdasarkan data, informasi, dan analisis yang akurat.

Pada pembahasan sebelumnya telah diketahui atau diidentifikasi analisis isu strategis dan diagnosa organisasi di Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dari analisis dan diagnosis diatas, maka terobosan inovatif yang akan dicapai dalam penulisan aksi perubahan ini adalah mewujudkan adanya transformasi pengelolaan TPI menggunakan teknologi. Agar terobosan inovatif ini lebih menarik dan menjadi pemantik keterlibatan stakeholder dalam implementasi program maka, ditentukan judul **"TRANSFORMASI TATA KELOLA TEMPAT PELELANGAN IKAN SUNGAI LUMPUR BERBASIS TEKNOLOGI".**

Penentuan judul tersebut, ditentukan dalam rangka menggambarkan bahwa layanan di TPI Sungai Lumpur tidak hanya dilakukan secara manual tetapi dapat juga berupa teknologi berupa aplikasi dan sebagainya yang dapat membantu nelayan dalam melakukan penangkapan ikan. Kedepannya pelayanan yang dilakukan di TPI Sungai Lumpur akan berbasis aplikasi atau online sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku di Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Identifikasi beberapa penyebab dalam isu strategis dipetakan, untuk diformulasikan desain kebijakan yang akan

dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah. Adapun bagan dari alur penyelesaian persoalan pelayanan TPI Sungai Lumpur dalam mendukung **"TRANSFORMASI TATA KELOLA TEMPAT PELELANGAN IKAN SUNGAI LUMPUR BERBASIS TEKNOLOGI"** adalah sebagai berikut:

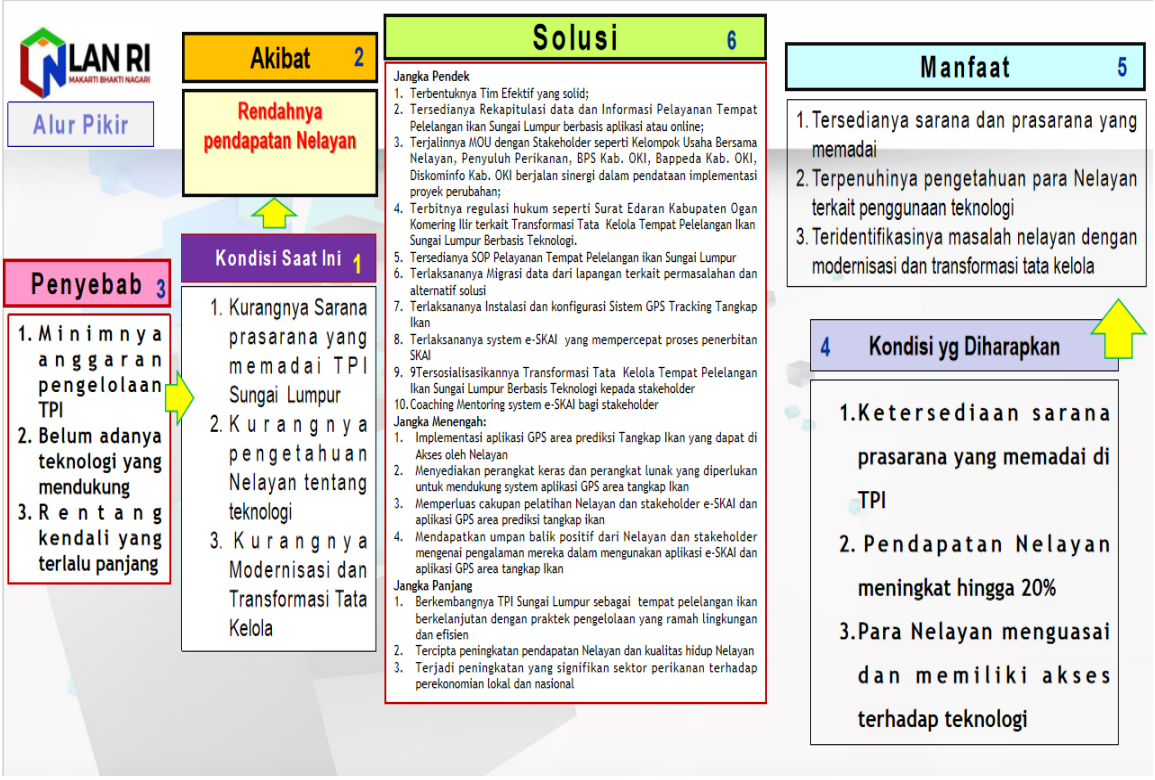

Gambar 2.3. Alur Pikir

2.2.2. Pentahapan Proyek Perubahan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan pasal 46 ayat 2 menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah perlu mengadakan pusat data dan informasi perikanan untuk menyelenggarakan sistem informasi dan data statistik perikanan. Mengacu kepada ketentuan undang-undang ini, maka pengembangan sistem informasi perikanan termasuk dalam hal pengelolaan sumberdaya dan lingkungan perikanan tangkap menjadi bagian penting dari kegiatan pembangunan perikanan di Indonesia.

Berdasarkan data BPS, Nilai tukar nelayan Bulan Januari 2019 naik 0,25 persen jika dibandingkan dengan Bulan Desember 2018. Kendatipun demikian, nelayan tradisional cenderung berada pada level bawah piramida sosial ekonomi Indonesia, yang hidup dalam kemiskinan.

Karakteristik nelayan tradisional yang sebagian besar nelayan kecil di Sumatera Selatan masih setia menggunakan sistem pencatatan hasil tangkapan ikan yang belum optimal. Metode tersebut dinilai harus diperbarui dan diperbaiki untuk kebaikan mereka dalam bersaing dengan nelayan modern.

Agar nelayan kecil bisa berkembang dan memperbaiki sistem pencatatan hasil tangkapan ikan, Dinas Perikanan Kab. OKI memberikan dukungan peningkatan kapasitas nelayan dengan mendorong inovasi baru berupa transformasi tata kelola secara digital bagi nelayan yang memudahkan nelayan kecil secara akurat.

Tahapan kegiatan untuk mewujudkan inovasi proyek perubahan "**TRANSFORMASI TATA KELOLA TEMPAT PELELANGAN IKAN SUNGAI LUMPUR BERBASIS TEKNOLOGI"** ada beberapa tahapan yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

- Jangka Pendek
    1. Membangun Tim Efektif Proyek Perubahan
    2. Merancang system e-SKAI yang mempercepat proses penerbitan SKAI
    3. Meningkatkan efisiensi proses penerbitan e-SKAI dan penerapan Aplikasi GPS area prediksi tangkap Ikan
    4. Pelatihan dan pembinaan tentang system digital dan teknologi yang diterapkan
    5. Membangun kesepahaman (MOU) dengan stakeholders terkait
- Jangka Menengah:

1. Menyediakan perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk mendukung system aplikasi GPS area tangkap Ikan
2. Implementasi aplikasi GPS area prediksi Tangkap Ikan yang dapat di Akses oleh Nelayan
3. Memperluas cakupan pelatihan Nelayan dan stakeholder layanan e-SKAI dan layanan informasi area tangkap ikan berbasis GPS area prediksi tangkap ikan
4. Mendapatkan umpan balik positif dari Nelayan dan stakeholder mengenai pengalaman mereka dalam mengunakan aplikasi layanan e-SKAI dan layanan informasi area tangkap ikan berbasis GPS area tangkap Ikan

- Jangka Panjang
  1. Melanjutkan penerapan Proyek Perubahan
  2. Tercipta Peningkatan Pendapatan Nelayan Dan Kualitas Hidup Nelayan Dan Terjadi Peningkatan Yang Signifikan Sektor Perikanan Terhadap Perekonomian Lokal Dan Nasional

Tabel 2.3. Rencana Tahapan dan Kegiatan

NO	TAHAPAN DAN KEGIATAN	WAKTU KEGIATAN	HASIL KEGIATAN (OUTPUT)	STAKEHOLDER YANG TERLIBAT	PERAN TEAM LEADER
JANGKA PENDEK					
1	**Membangun Tim Efektif Proyek Perubahan**				
	a. Koordinasi dengan Mentor b. Pembentukan tim c. Penerbitan SK tim kerja	Minggu ke-2 Okt 2024	a) Notulen rapat; b) SK tim efektif c) Undangan d) Dokumentasi e) Absensi Rapat	- Kepala Dinas - Seluruh Tim Efektif	- Mengidentifikasi & mengusulkan calon tim efektif kepada Pimpinan - Mendiskusikan rencana kerja tim efektif
2	**Merancang system e-SKAI yang mempercepat proses penerbitan SKAI**				

	a. Mengembangkan dan mengimplementasikan platform digital untuk pengajuan dan penerbitan e-SKAI. b. Memanfaatkan teknologi untuk otomatisasi validasi data, verifikasi dokumen, dan penerbitan surat secara real-time.		a) Koordinasi dengan Kominfo b) Aplikasi *e*-SKAI	- Diskan - Diskominfo - Tim Efektif	- Menjalin komunikasi yang baik dengan Tim Efektif dan Stakeholder Eksternal - *Sharing Knowledge* dengan stakeholder
3	**Meningkatkan efisiensi proses penerbitan e-SKAI dan penerapan Aplikasi GPS area prediksi tangkap Ikan**				
	a. Mengidentifikasi masalah dalam sistem penerbitan e-SKAI yang ada (jika sudah ada) atau memetakan kebutuhan untuk pengembangan baru. b. Analisis kebutuhan pengguna, termasuk nelayan, Dinas Perikanan, dan pihak terkait lainnya. c. Evaluasi teknologi GPS yang dapat diaplikasikan untuk prediksi lokasi penangkapan ikan.		Dokumentasi	- Kominfo - Bappeda - Tim TPI	Menjalin komunikasi yang baik dengan stakeholder terkait agar kegiatan dapat berjalan sinergis.
4	**Pelatihan dan pembinaan tentang system digital dan teknologi yang diterapkan**				
	a. Menyelenggarakan sosialisasi bagi nelayan, dan pemangku kepentingan tentang cara menggunakan sistem e-SKAI b. Menyelenggarakan pelatihan bagi staf dinas perikanan tentang cara menggunakan sistem e-SKAI c. Menyediakan materi pelatihan berbasis modul yang menjelaskan langkah-langkah penggunaan teknologi.		a) Undangan b) Dokumentasi c) Notulensi d) Absensi	- Kominfo - Tim Efektif - Dinas Perikanan	Konsultasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Provinsi
5.	**Membangun kesepahaman (MOU) dengan stakeholders terkait**				
	a. Melakukan konsultasi dan koordinasi Tim Efektif dan Stakeholder tentang rencana Penerbitan MoU b. Rapat dengan para Stakeholder terkait mapping kerjasama yang akan dilaksanakan c. Penandatangan MoU dengan stakeholder terkait		a) MoU terkait manajemen kerjasama pengelolaan aplikasi GPS area tangkap Ikan b) Surat Rencana Kunjungan Kerja c) Dokumentasi	- Bagian Hukum - Internal - Dinas Perikanan Bangka Tengah	- Mempersiapkan draft MoU dan asistensi dengan Bagian Hukum terkait legal standing - Menjalin komunikasi yang baik dengan stakeholder terkait agar kerjasaa dapat berjalan sinergis.
	JANGKA MENENGAH				
1	Menyediakan perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk mendukung system aplikasi GPS area tangkap Ikan	2025	a) Infrastruktur teknologi (perangkat keras seperti GPS dan server) siap digunakan oleh nelayan dan dinas terkait. b) Aplikasi berjalan lancar tanpa kendala teknis, didukung oleh perangkat lunak yang stabil dan perangkat keras yang sesuai.	- Dinas Perikanan - Diskominfo - Penyedia Perangkat Keras (Vendor)	- Menjalin komunikasi yang baik dengan Tim Efektif dan Stakeholder Eksternal - Sharing Knowledge dengan stakeholder

2	Implementasi aplikasi GPS area prediksi Tangkap Ikan yang dapat di Akses oleh Nelayan		a) Kemudahan Akses Nelayan menggunakan aplikasi GPS untuk memprediksi area penangkapan ikan, sehingga meningkatkan efisiensi penangkapan. b) Peningkatan akurasi dalam menemukan lokasi penangkapan ikan, yang dapat mengurangi waktu dan biaya operasional nelayan.	- Nelayan - Dinas Perikanan - Pengembang Teknologi (IT Developer)	- Menjalin komunikasi yang baik dengan Tim Efektif dan Stakeholder Eksternal - Sharing Knowledge dengan stakeholder
3	Memperluas cakupan pelatihan Nelayan dan stakeholder layanan e-SKAI dan layanan informasi area tangkap ikan berbasis GPS area prediksi tangkap ikan		a) Lebih banyak nelayan dan stakeholder memahami dan terampil dalam menggunakan sistem layanan e-SKAI dan layanan informasi area tangkap ikan berbasis GPS . b) Penyebaran teknologi yang lebih luas di lapangan, dengan nelayan dari berbagai daerah mendapatkan akses dan pelatihan.	- Nelayan - Dinas Perikanan - Pihak eksternal	Menjalin komunikasi yang baik dengan stakeholder terkait agar kegiatan dapat berjalan sinergis.
4	Mendapatkan umpan balik positif dari Nelayan dan stakeholder mengenai pengalaman mereka dalam mengunakan aplikasi e-SKAI dan aplikasi GPS area tangkap Ikan		a) Peningkatan kepuasan dan kepercayaan nelayan terhadap teknologi yang diterapkan. b) Informasi dari umpan balik digunakan untuk perbaikan sistem yang berkelanjutan, semakin relevan dengan kebutuhan nelayan	- Nelayan - Dinas Perikanan - Pihak eksternal	Menjalin komunikasi yang baik dengan stakeholder terkait agar kegiatan dapat berjalan sinergis.
JANGKA PANJANG					
1	**Melanjutkan penerapan Proyek Perubahan**				
	a. Mengidentifikasi hasil penerapan di jangka menengah b. Menganalisa penyebab c. Melakukan perbaikan	2025	a) Hasil identifikasi penerapan masalah b) Inventarisasi penyebab munculnya permasalahan c) Rapat Teknis Perbaikan Sistem	- Tim Efektif - Inspektorat	Memfasilitasi permasalahan dan solusi terkait penerapan proyek perubahan
2	**Tercipta Peningkatan Pendapatan Nelayan Dan Kualitas Hidup Nelayan Dan Terjadi Peningkatan Yang Signifikan Sektor Perikanan Terhadap Perekonomian Lokal Dan Nasional**				
	a. Penyediaan Infrastruktur Teknologi dan Aksesibilitas b. Pelatihan dan Pembinaan Nelayan tentang Teknologi dan Praktik Berkelanjutan c. Peningkatan Akses Pasar dan Konektivitas d. Penguatan Kelembagaan dan Regulasi yang Mendukung e. Pemantauan dan Evaluasi Terhadap Kinerja Sektor Perikanan	2025	a) Hasil kajian terkait aplikasi GPS b) Dokumentasi c) Rapat Teknis	- Tim Efektif	Koordinasi dan konsultasi terkait progress berkelanjutan proyek perubahan

2.2.3. Pengelolaan Sumber Daya

Proyek perubahan yang dilaksanakan pada Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir dibutuhkan adanya suatu tim dalam mewujudkan keberhasilan proyek perubahan, pembagian kelompok kerja, mekanisme kerja serta etika kerja. Adapun tim efektif yang dibentuk dalam rencana proyek perubahan terdiri dari tim administrasi, tim teknis, dan tim IT. Sumber daya organisasi Dinas Perikanan memiliki struktur tim yang terlibat aktif dalam penyelenggaraan proyek perubahan sebagai berikut:

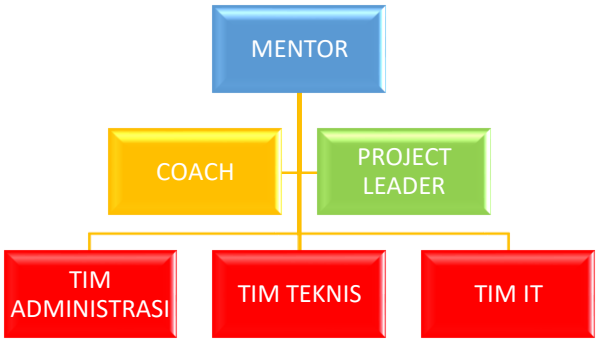

Gambar 2.4. Struktur Organisasi Pelaksana

Dari struktur tata kelola rancangan proyek perubahan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Mentor

a) Bertindak sebagai pembimbing peserta berdasar sikap profesionalisme;

b) Memberikan dukungan penuh kepada peserta diklat dalam mempersiapkan proposal Proyek Perubahan yang akan dilakukan

c) Memberikan bimbingan dan arahan kepada peserta dalam merumuskan atau permasalahan krusial organisasi yang memerlukan terapi melalui proyek perubahan;

d) Membantu peserta dalam memetakan agenda project yang akan dilaksanakan dan rencana jadual pertemuan yang akan dilaksanakan
e) Menjelaskan kontrak penyelesaian tugas kepada peserta diklat;
f) Sebagai atasan langsung memberikan kesepakatan dan persetujuan atas dokumen proposal proyek perubahan yang diajukan oleh peserta diklat;
g) Memberikan dukungan penuh kepada peserta diklat dalam mengimplementasikan Proyek Perubahan;
h) Memberikan dukungan kepada peserta dalam mendayagunakan seluruh potensi sumberdaya yang diperlukan dalam melakukan implementasi proyek perubahan;
i) Memberikan bimbingan kepada peserta dalam mengatasi kendala yang muncul selama proses implementasi berlangsung;
j) Berperan sebagai inspirator bagi peserta diklat dalam melakukan inovasi-inovasi yang diperlukan

2) Coach

a) Melakukan monitoring kegiatan peserta selama tahap Komitmen Bersama dan selama Laboratorium Kepemimpinan melalui media teknologi informasi (IT);
b) Melakukan koordinasi dengan mentor untuk membantu peserta apabila peserta mengalami permasalahan selama tahapan komitmen bersama maupun tahapan Laboratorium Kepemimpinan;
c) Memberikan masukan kepada peserta terkait usulan proyek perubahan yang sedang dirumuskan peserta selama tahap komitmen bersama dan tahap laboratorium kepemimpinan;

d) Memberikan feedback terhadap laporan progress implementasi proyek perubahan yang akan disampaikan peserta bimbingan minimal seminggu sekali (setiap hari Jumat);
e) Mengembangkan instrumen monitoring dan perekaman terhadap progress yang dilaporkan oleh peserta bimbingan;
f) Mengkomunikasikan proses, kemajuan dan hasil coaching kepada penyelenggara Pelatihan Kepemimpinan Tk. II
g) Menjadi counsellor pada saat peserta mengalami lack of matovation selama proses pembelajaran atau menyusun proyek perubahan.

3) Project Leader

a) Mempersiapkan/merencanakan (dokumen/instrument/waktu) yang diperlukan dengan baik sebelum pertemuan dengan mentor;
b) Mengambil inisiatif dalam dialog dengan mentor;
c) Menggalang komunikasi dan kesepakatan dengan stakeholder terkait (internal dan eksternal)
d) Membuat laporan kegiatan tahap komitmen bersama dan dikumpulkan ke penyelenggara maksimal 1 hari sebelum Seminar Rancangan Proyek Perubahan;
e) Melakukan eksekusi keseluruhan tahapan yang telah dirancang dalam project charter dengan mendayagunakan seluruh sumber daya yang dimiliki;
f) Secara aktif melakukan diskusi dengan bertanya atau melaporkan progress impelementasi proyek perubahan kepada coach minimal satu minggu sekali (setiap hari kamis)

g) Mengacu rumusan milestones dalam dukungan pelaksanaan proyek sebagai dasar pencapaian target perubahan;
h) Menggerakkan seluruh elemen stakeholders terkait (internal dan eksternal) dalam mendukung keseluruhan tahapan implementasi perubahan;
i) Mengembangkan instrumen monitoring dan melakukan perekaman terhadap setiap progress yang dihasilkan dalam proses implementasi proyek perubahan;
j) Menyusun laporan proyek perubahan ke dalam sebuah deskripsi utuh mulai dari proses penyusunan project charter sampai dengan hasil/capaian dari implementasi proyek perubahan. Deskripsi dan analisis terhadap critical success factor dan strategi mengatasi kendala yang muncul selama tahapan ini juga merupakan bagian penting yang harus tercakup dalam laporan ini;
k) Menyerahkan laporan implementasi proyek perubahan kepada penyelenggaran Pelatihan Kepemimpinan Tk. II sesuai jadwal yang telah ditetapkan (1 hari sebelum seminar LK)

4) Tim Efektif

Bertugas untuk membantu *Project Leader* sebagai tim dan bekerjasama dalam melaksanakan implementasi Proyek perubahan.

2.2.4. Rencana Strategi Marketing

a. Identifikasi *Stakeholder*

Stakeholder adalah semua pihak baik itu individu, komunitas atau kelompok masyarakat yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap organisasi, perusahaan dan permasalahan yang sedang dibahas. *Stakeholder* juga bisa diartikan sebagai pemangku kepentingan atau pihak yang

berkepentingan. Tentang *stakeholder* yang akan dilibatkan proyek perubahan **"TRANSFORMASI TATA KELOLA TEMPAT PELELANGAN IKAN BERBASIS TEKNOLOGI"** di Kabupaten Ogan Komering Ilir dibagi menjadi dua berdasarkan internal dan ekternalnya sebagai berikut:

Tabel 2.4. *Stakeholder* Internal dan Ekternal

NO	Stakeholder Internal	Stakeholder Ekternal
1	Bupati OKI	Lembaga Non Pemerintah (NGO)
2	Kepala Dinas Perikanan	Akademisi dan Peneliti
3	Penanggungjawab TPI Sungai Lumpur	Investor dan Peneliti
4	Staf Teknologi Informasi (IT)	Investor dan Mitra Swasta
5		Kades Kuala Suangi Jeruju
6		Camat Cengal dan Camat Tulung Selapan
7		Kades Sungai Lumpur
8		Kades Pantai Harapan
9		Kades Simpang Tiga Abadi
10		Nelayan

Dalam Proyek Perubahan **"TRANSFORMASI TATA KELOLA TPI BERBASIS TEKNOLOGI"**,melibatkan berbagai *stakeholder*. Dari hasil identifikasi peran *stakeholder*, setelah dianalisis aspek pengaruh dan kepentingann dalam proses pelaksanaan program adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5. Identifikasi Peran *Stakeholder*

NO	Stakeholder	Peran	Posisi
1	Bupati OKI	Memberikan arahan strategis dan dukungan kebijakan untuk keberhasilan proyek, serta	*Promotor*

		memfasilitasi sinergi lintas dinas dan memastikan kepentingan masyarakat terpenuhi.	
2	Kepala Dinas Perikanan	Bertanggung jawab atas pengelolaan operasional harian TPI, termasuk implementasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi pelelangan ikan dan manajemen sumber daya perikanan lokal.	*Promotor*
3	Investor dan Mitra Swasta	Memberikan dukungan finansial dan sumber daya untuk proyek.	*Latent*
4	Penangungjawab TPI Sungai Lumpur	Mengatur operasional TPI dan berfungsi sebagai penghubung antara nelayan dan sistem baru	*Defender*
5	Nelayan	Berperan sebagai pengguna utama teknologi e-SKAI dan sistem digital lainnya, mendukung proyek dengan memanfaatkan sistem baru untuk menghasilkan tangkapan secara lebih efisien dan transparan.	*Defender*
6	Pedagang Ikan	Menjadi mitra utama dalam pelelangan, aktif membeli ikan, sehingga mendukung keberlanjutan sistem berbasis teknologi.	*Defender*
7	Tim IT	Mengembangkan dan memelihara sistem teknologi yang digunakan dalam proyek.	*Defen der*
8	Camat Cengal dan Camat tulung selapan	Bertanggung jawab untuk mendukung pelaksanaan pelayanan yang ada di TPI dan bertanggung jawab untuk berkoordinasi dengan Kades di wilayahnya	*Defender*
9	Kades Sungai lumpur	Memiliki potensi untuk mendukung proyek secara tidak langsung melalui advokasi kesejahteraan nelayan, namun belum secara aktif terlibat dalam transformasi teknologi di TPI.	*Aphetetic*
10	Kades Pantai harapan	Memiliki potensi untuk mendukung proyek secara tidak langsung melalui advokasi kesejahteraan nelayan, namun belum secara aktif terlibat dalam transformasi teknologi di TPI.	*Aphetetic*
11	Kades simpang tiga abadi	Memiliki potensi untuk mendukung proyek secara tidak langsung melalui	*Aphetetic*

		advokasi kesejahteraan nelayan, namun belum secara aktif terlibat dalam transformasi teknologi di TPI.	
12	Kades kuala sungai jeruju	Memiliki potensi untuk mendukung proyek secara tidak langsung melalui advokasi kesejahteraan nelayan, namun belum secara aktif terlibat dalam transformasi teknologi di TPI.	*Aphetetic*
13	NGO	Memiliki potensi untuk mendukung proyek secara tidak langsung melalui advokasi kesejahteraan nelayan, namun belum secara aktif terlibat dalam transformasi teknologi di TPI.	*Aphetetic*
14	Akademisi dan Peneliti	Melakukan penelitian dan analisis untuk mendukung pengambilan keputusan.	*Aphetetic*

b. Peta Strategis Marketing

Pemetaan *stakeholder* diperoleh melalui proses identifikasi para *stakeholder* yang terlibat dan terkena dampak dari proyek perubahan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian diidentifikasi lagi sifat dukungan dari masing-masing *stakeholder* **positif (+), negatif (-),** atau **netral (+/-)**.

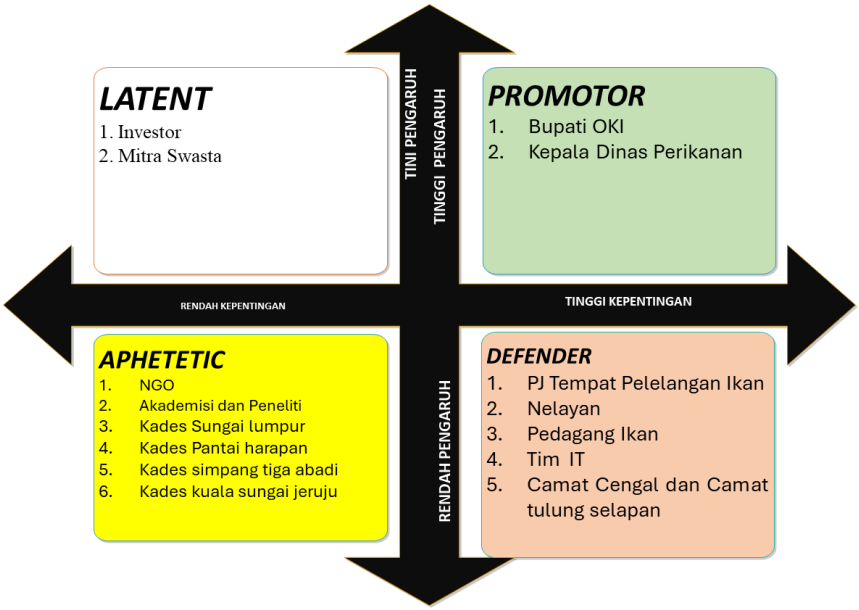

Gambar 2.5. Peta Stakeholder

Stakeholder yang memiliki dukungan **positif** berarti mendukung dan diprediksi akan mendukung karena menerima dampak positif dari proyek perubahan. Selanjutnya *stakeholder* juga akan diidentifikasi terkait tinggi rendahnya **kepentingan** dan tinggi rendahnya **pengaruh** terhadap proyek perubahan.

Setelah mengidentifikasi *stakeholder* yang mempengaruhi proyek perubahan ini, selanjutnya peserta melakukan analisis terhadap pengaruh stakeholder untuk tercapainya keberhasilan proyek perubahan ini. Analisis stakeholder menggunakan analisis tingkat **pengaruh** (*influence/power*) dan tingkat **minat** (*interest) stakeholder* tersebut terhadap proyek perubahan yang akan dilakukan. Adapun hasil analisis tersebut dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:

Gambar 2.6. Hasil Analisis Stakeholders

Stakeholder Defender	**Stakeholder Promotor**
Stakeholder yang memiliki kepentingan terhadap perubahan, akan tetapi kekuatannya kecil untuk mempengaruhi keberhasilan proyek perubahan, yaitu : • PJ Tempat Pelelangan Ikan • Nelayan • Pedagang Ikan • Tim IT • Camat Cengal dan Camat tulung selapan	Stakeholder yang sangat berpengaruh dan berkepentingan terhadap proyek perubahan, yaitu ; 1. Bupati OKI 2. Kepala Dinas Perikanan
Stakeholder Apathetics	**Stakeholder Latents**
Stakeholder yang kurang memiliki kepentingan dan bahkan tidak mengetahui adanya dengan perubahan ini, yaitu; • NGO	Stakeholder yang tidak mempunyai kepentingan khusus namun mempunyai pengaruh yang besar terjadinya

• Akademisi dan Peneliti • Kades Sungai lumpur • Kades Pantai harapan • Kades simpang tiga abadi • Kades kuala sungai jeruju	keberhasilan proyek perubahan,yaitu; 1. Investor 2. Mitra Swasta

c. Strategi Komunikasi Stakeholder.

Mengingat Stakeholder dibedakan beberapa jenis, maka peserta pelatihan menggunakan strategi komunikasi yang selanjutnya disampaikan sebagai berikut:

Tabel 2.6. Strategi Komunikasi Stakeholder

Kelompok Stakeholder	Strategi Komunikasi
Promotors	Kelompok stakeholder yang memiliki kepentingan terhadap program dan kekuatan untuk membantu terhadap keberhasilan proyek perubahan dan sebaliknya; Strategi komunikasi yang dilakukan : • Komunikasi dengan cara memberikan informasi untuk meyakinkan bahwa kegiatan yang diusulkan sangat perlu dan berguna; • Hal-hal yang dikomunikasikan adalah dengan menyampaikan maksud,tujuan, manfaat, output yang dihasilkan serta dampak dari proyek perubahan; • Dalam menyampaikan hal-hal tersebut harus dengan penuh rasa percaya diri, tegas dan proyek perubahan relatif mudah diaplikasikan,fleksibel dan

	bermanfaat bagi masyarakat dan organisasi.
Latens	Kelompok yang tidak memiliki kepentingan khusus maupun terlibat dalam program,tapi memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi program jika mereka tertarik, Strategi komunikasi yang dilakukan; • Membangun komunikasi dengan memberikan infomasi mengenai maksud, tujuan,sasaran, manfaat dan output yang dihasilkan; • Selalu bersikap sopan, profesional serta memperlakukan mereka dengan baik.
Defenders	Kelompok stakeholder yang memiliki kepentingan dan menyuarakan dukungan,tetapi kekuatannya sangat kecil untuk mempengaruhi program. Strategi komunikasi yang dilakukan; • Komunikasi dengan memberikan motivasi bahwa kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dinasdan merupakan ajang pembuktian diri dan kemampuan; • Berusaha memberi semangat dan motivasi untukkeberhasilan program; • Bila memungkinkan dapat melibatkan mereka dalammengambil keputusan.
Apathetics	Kelompok stakeholders yang tidak memilki kepentingan dan kekuatan terhadap program yang dilaksanakan. Strategi komunikasi yang dilakukan;

	Memberi informasi seperlunya dan menjaga agar tidak menjadipenghambat dalam pelaksanaan program.

2.2.5. Strategi Marketing Hasil Proyek Perubahan

Strategi marketing terhadap hasil proyek perubahan dilakukan dengan memperhatikan elemen dalam pemasaran sektor publik, yaitu 4 P 1 C (Product, Price, Promotion, Place dan customer).

Strategi merupakan cara atau siasat, yang berhubungan dengan setiap upaya pengambilan keputusan dengan memperhitungkan setiap kemungkinan yang diperkirakan dapat terjadi, guna mencapai tujuan yang diharapkan, melalui pemanfaatan sumber daya Manusia yang dimiliki, yang meliputi koordinasi dan sinergi, penetapan indikator keberhasilan, penyusunan rencana aksi dan sasaran, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan.

Keberhasilan strategi yang digunakan akan direplikasi pada rencana aksi periode selanjutnya, sedangkan beberapa indikator kegagalan akan di evaluasi dan di-*up date* sesuai dengan permasalahannya.

a. Produk

Ide proyek perubahan **"TRANSFORMASI TATA KELOLA TPI SUNGAI LUMPUR BERBASIS TEKNOLOGI"** ini berawal dari pelayanan yang masih minim teknologi dan pengetahuan nelayan yang belum awam dengan teknologi berbasis aplikasi atau online sehingga proses penangkapan ikan belum maksimal serta potensi yang berada di sekitar TPI belum termanfaatkan dengan maksimal.

Dengan adanya proyek perubahan diharapkan dapat membantu nelayan dalam melakukan penangkapan ikan serta dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan yang mengakibatkan peningkatan produksi perikanan.

b. Harga

Pelayanan TPI Sungai Lumpur yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan bersumber dari anggaran APBD Kabupaten Ogan Komering Ilir. Ketika berbicara tentangan layanan pada kelompok marginal, minoritas, maka nilai finansial bukan lagi menjadi ukuran. Dalam proyek perubahan ini, harga lebih relevan dihubungkan dengan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat.

c. Distribusi

Dalam peningkatan layanan Dinas Perikanan bekerjasama dan membangun jaringan bersama Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir baik ditingkat Kabupaten, Kecamatan hingga Desa sehingga tercipta koneksi yang dapat membantu dalam Pelayanan TPI Sungai Lumpur.

Dengan adanya pelayanan ini semua stakeholder akan bersinergi dan menjadi agen distribusi dalam pelayanan TPI Sungai Lumpur berbasis aplikasi atau online.

d. Promosi

Peningkatan pengelolaan manajemen pemasaran yang akan dilakukan dalam mendukung proyek perubahan **"TRANSFORMASI TATA KELOLA TPI SUNGAI LUMPUR BERBASIS TEKNOLOGI"** adalah dengan menyebarkan informasi jenis- jenis layanan. Secara umum, akan disebarkan berbagai informasi penting pada setiap program-program yang berhubungan dengan layanan yang ada di TPI Sungai Lumpur. Juga dilakukan promosi melalui teknologi internet seperti *website*, Youtube, dan media sosial yang dimiliki oleh Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

e. Customer

Pelayanan TPI Sungai Lumpur ditujukan untuk Kelompok Nelayan dan Nelayan Pesisir yang berada di sekitar

TPI Sungai Lumpur serta secara tidak langsung juga memberi manfaat bagi kapal-kapal pengangkutan yang berada atau melintasi perairan di sekitar TPI Sungai Lumpur.

2.2.6. Potensi Kendala, Risiko Dan Penyelesaian

Dalam melaksanakan proyek perubahan ini tidak dipungkiri akan terdapat beberapa kendala, baik yang berasal dari internal, maupun dari eksternal. Beberapa kendala dan solusi yang akan dihadapi, sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel 2.7. Kendala dan Resiko

No	Kendala	Resiko	Solusi
A	**Kendala Internal**		
1	Tim Teknis	Kemungkinan terjadinya tumpang tindih pekerjaan rutin dengan pekerjaan untuk kegiatan proyek perubahan	- Project leader selalu menanyakan progres kegiatan dan sejauh mana pencapaiannya. Jika memenuhi hambatan agar menyampaikan secepat mungkin. - Bahwa Proper ini selanjutnya merupakan kegiatan yang berkelanjutan dan disetujui oleh Gubernur, jadi tetap harus mendapatkan prioritas untuk dikerjakan.
		Kurangnya pemahaman atas pekerjaan yang diberikan	- Menyampaikan bahwa proper ini sangat bermanfaat dan tidak terlalu sulit untuk dipahami, namun diperlukan kebersamaan dalam bekerja.

2	Anggaran kegiatan	Belum optimalnya pelaksanaan Proper sesuai rencana, karena kegiatan ini belum dianggarkan pada APBD Tahun 2024	- Menyediakan anggaran pribadi atau mengusulkan dalam Anggaran Perubahan Tahun 2024
B	**Kendala Ekternal**		
1	Kurangnya partisipasi yang aktif dari OPD terkait	Pelaksanaan Proper tidak optimal, karena terbatasnya waktu dan banyaknya pekerjaan rutin	- Project leader selalu berkomunikasi dengan kepala OPD terkait, agar terjadi sinergisitas yang kuat

2.2.7. Faktor Kunci Keberhasilan

Dalam pelaksanaan suatu proyek perubahan ini, diperlukan beberapa ukuran keberhasilan yang dapat menjadi tolak ukur bagi pencapaian tujuan. Ukuran keberhasilan ini tidak hanya menjadi indikator utama untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan, tetapi juga merupakan panduan bagi setiap pihak yang terlibat agar dapat berkontribusi secara optimal. Di sisi lain, keberhasilan pelaksanaan proyek perubahan ini juga sangat bergantung pada beberapa faktor kunci yang mendukung pencapaian tujuan tersebut. Berikut ukuran keberhasilan dan faktor kunci keberhasilan proyek :

a. Ukuran Keberhasilan
    1. Adanya komitmen bersama untuk melaksanakan perubahan
    2. Efektifitas dan efisiensi anggaran
    3. Tercapainya ketepatan waktu dan substansi setiap tahapan kegiatan sesuai dengan target yang ditetapkan
    4. Terbangunnya komitmen dan partisipasi aktif dari para stakeholfer dalam mewujudkan percepatan

penanganan trantibum di Kabupaten Ogan Komering Ilir

b. Faktor Kunci Keberhasilan

- Peran kepemimpinan yang mendukung pelaksanaan kegiatan dari awal sampai akhir
- Komitmen tinggi arahan dan dukungan dari Mentor dan Coach
- Soliditas Tim Efektif, kerjasama mencapai tujuan dan sasaran disertai komitmen kuat untuk mewujudkan proyek perubahan
- Adanya dukungan dari Internal Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir
- Adanya dukungan dari stakeholder eksternal Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir
- Koordinasi intensif dengan stakeholder

Dengan penerapan ukuran keberhasilan yang jelas dan dukungan faktor kunci yang terkoordinasi, diharapkan proyek perubahan ini dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Sinergi antara pihak-pihak terkait akan menjadi kekuatan utama dalam menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat.

2.3. RENCANA STRATEGI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM DALAM PROYEK PERUBAHAN

Dalam melaksanakan proyek perubahan terdapat beberapa pihak yang terdampak dari adanya inovasi **“TRANSFORMASI TATA KELOLA TPI SUNGAI LUMPUR BERBASIS TEKNOLOGI”**. Adapun hal tersebut membutuhkan strategi dalam pengembangan kompetensi SDM guna mendukung proyek perubahan ini. Berikut adalah rincian pihak-pihak yang terdampak berserta strategi pengembangannya:

Tabel 2.8. Pengembangan Kompetensi SDM dalam Proyek Perubahan

No.	Pihak yang Terdampak Proper	Kebutuhan Pengembangan Potensi	Strategi
1	Masyarakat Nelayan	• Mempercepat proses penerbitan dan memastikan transparansi dalam pembuatan SKAI • Meningkatkan produktivitas nelayan, keberlanjutan lingkungan dan keselamatan kerja di laut. Sehingga kesejahteraan nelayan dan sektor perikanan lokal meningkat.	Mentransformasi tata kelola TPI dengan mengintegrasikan teknologi modern seperti pembuatan e-SKAI dan Aplikasi Ground Fishing berbasis GPS
2	Tim Efektif	Mengembangkan keterampilan komunikasi inklusif untuk berinteraksi dengan berbagai kelompok masyarakat, dan mengembangkan keterampilan penggunaan teknologi digital.	Melakukan pelatihan dan bimtek guna mengembangkan keterampilan tim.
3	Stakeholder Eksternal	Melakukan kolaborasi dan kerjasama dalam mendukung program e-SKAI dan Aplikasi Ground Fishing berbasis GPS	Melakukan koordinasi dan melakukan pertemuan rutin, melakukan sosialisasi dan melibatkan stakeholder pada kegiatan proyek.

2.4. PEMETAAN SIKAP PERILAKU KEPEMIMPINAN DAN RENCANA STRATEGI PENGEMBANGAN POTENSI DIRI

2.4.1. Hasil Self Asesment

Untuk menggambarkan aspek sikap dan perilaku kepemimpinan (manajerial) peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (PKN Tingkat II) maka perlu dilakukan pemetaan (assessment). Hal tersebut akan berguna untuk melihat potensi kemampuan pribadi pada kepemimpinan pelaksanaan proyek perubahan ke depannya. Persepsi penilaian didapatkan dari hasil memadukan penilaian dari peserta (self assessment) dengan evaluasi yang dilakukan dari atasan

langsung (mentor). Beberapa langkah yang dilakukan dalam proses Identifikasi Pengembangan Potensi Diri adalah sebagai berikut:

1. Isian Formulir Hasil Identifikasi Pengenalan Diri dari Peserta
2. Isian Formulir Hasil Identifikasi Pengenalan Diri dari Mentor
3. Kolaborasi Hasil Isian Identifikasi Peserta dengan Mentor

Tabel 2.9. Rekomendasi Pengembangan Potensi Diri

REKOMENDASI PENGEMBANGAN POTENSI DIRI:		
Istimewa		Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan sebagai bekal pengayaan sikap perilaku untuk menduduki jabatan pimpinan yang lebih tinggi
Baik		Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai bekal pendalaman sikap perilaku dalam jabatan pimpinan pengawas
Cukup		Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi

		perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai bekal penguatan sikap perilaku dalam menduduki jabatan pengawas
Kurang		Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan, pendampingan yang sangat ketat dan sebaiknya agar melibatkan unit pengelola kepegawaian instansi asal peserta sebagai bekal penguatan sikap perilaku dalam menduduki jabatan pengawas
Sangat Kurang	**:**	

Pemetaan sikap perilaku kepemimpinan dan strategi pengembangan potensi diri dengan 2 (dua) poin penting yaitu, hasil pemetaan dan rencana strategi pengembangan potensi diri. Hasil Pemetaan Potensi Diri peserta sebagaimana disajikan Gambar Berikut:

REKAP NILAI AKHIR SIKAP PERILAKU PESERTA

Nama Peserta	: H. UBAIDILAH, SKM, MKM	**Nama Mentor**	: M. REFLY, S.Sos., M.M
NIP	: 197010051995021000	**NIP:**	: 196903091998101000
Jabatan	: KEPALA DINAS	**Jabatan**	: PJ. SEKRETARIS DAERAH
Instansi	: DINAS PERIKANAN OKI	**Instansi**	: SEKRETARIAT DAERAH OKI
Program	: PKN TK II ANGK XXXVII TAHUN 2024		

	Nilai Komponen				
	Sub Komponen Integritas	Sub Komponen Kerjasama	Sub Komponen Mengelola Perubahan	Rata-Rata Total Sub Komponen	Kualifikasi Total Sub
Peserta	9,08	9,00	9,00	9,03	Istimewa
Mentor	8,92	9,10	9,00	9,01	Istimewa
Nilai Rata-Rata Per Sub Komponen	8,97	9,07	9,00	9,01	Istimewa
Kualifikasi Per Sub Komponen	Baik	Istimewa	Istimewa	Istimewa	

Keterangan Kualifikasi

9.00-10	Istimewa
7-8.99	Baik
5-6.99	Cukup
3-4.99	Kurang
1-2.99	Sangat Kurang

Akhir Sikap Perilaku
9,01
Kualifikasi: Istimewa

Gambar 2.6. Hasil Pemetaan Potensi Diri

2.4.2. Rencana Pengembangan Potensi Diri

Pengembangan potensi diri yang relevan dalam pelayanan urusan sosial adalah membangun budaya kerja organisasi. Budaya organisasi adalah nilai-nilai norma yang dianut dan dijalankan oleh sebuah organisasi terkait organisasi menjalankan kegiatannya. Dalam pengembangan potensi diri, harus mampu membangun nilai-nilai dalam hubungan antar individu dalam organisasi. Komunikasi informal, keterbukaan, kejujuran, saling mendukung antar individu, merupakan nilai-nilai yang harus dibangun. Dengan model pengembangan diri ini, maka kekakuan hirarki dalam birokrasi Dinas Perikanan dapat diminimalisisir.

Namun begitu, terdapat beberapa langkah penting yang menjadi strategi dalam rencana pengembangan potensi diri yang dapat dilakukan, seperti:

1. Melakukan diskusi dengan Mentor

   Kegiatan bimbingan dengan mentor adalah perwujudan kegiatan koordinasi yang dikolaborasikan dengan komunikasi. Dengan pendampingan yang dilakukan oleh mentor maka dapat mendapatkan berbagai kritik dan saran terbaik tentang strategi pengembangan diri. Dengan melakukan koordinasi dan komunikasi dengan mentor maka akan didapatkan langkah- langkah rencana pengembangan diri yang efektif. Hasilnya adalah terciptanya etos kerja soliditas, sinergitas, dan kreatifitas, baik yang bersifat dari personal maupun kolektif.

   Kegiatan selanjutnya adalah rencana dan strategi dalam pelaksanaan pengembangan potensi diri. Pada usaha ini yang diperhatikan adalah seperti nilai pada sub aspek pada Formulir Peserta, Mentor dan Rekap nilai

gabungan. Dengan melihat nilai diatas, maka dapat disusun rencana dan strategi pelaksanaan pengembangan untuk peserta. Suatu hal yang perlu untuk peserta adalah pemberian pengayaan pengembangan potensi diri dalam berbagai bentuk kegiatan yang terukur utamanya pada saat melaksanakan proyek perubahan. Cara tersebut juga dapat dilakukan dengan melakukan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai bekal pendalaman sikap perilaku.

2. Melakukan evaluasi diri

   Kegiatan evaluasi sangat penting dilakukan untuk usaha dalam pengembangan diri. Untuk evaluasi dapat dilakukan oleh peserta, utamanya seperti setelah mendapatkan berbagai masukan dari mentor. Tujuan evaluasi dilakukan adalah untuk mengurangi kesalahan yang telah dilakukan. Selain itu, kegiatan evaluasi juga bertujuan untuk mendapatkan berbagai langkah baru yang dapat digunakan untuk pengembangan potensi diri. Kegiatan evaluasi dalam kontek pengembangan potensi diri merupakan hal yang bersifat wajib agar didapatkan formula yang efektif dalam pengembangan diri.

3. Menentukan Tujuan Jangka Panjang

   Strategi rencana pengembangan diri dilakukan dengan berbagai tujuan. Salah satunya adalah penentuan tujuan jangka panjang setelah strategi pengembangan diri berhasil dilakukan. Lebih dari itu, penentuan tujuan jangka panjang di atas juga memiliki fungsi untuk mengetahui rencana bertahap tentang pelaksanaan proyek perubahan ke depannya.

4. Identifikasi Keterampilan yang selalu perlu untuk ditingkatan

Telah disebutkan sebelumnya, jika hasil evaluasi yang telah dilakukan di atas dapat menghasilkan berbagai pemetaan potensi. Dari proses evaluasi tersebut dapat diketahui juga tentang identifikasi keterampilan terkini. Dengan demikian, maka tututnan dari hasil evaluasi itu adalah tetap berusaha meningkatkan keterampilan yang merupakan bagian penting dari strategi pengembangan diri.

5. Tentukan Rencana Aksi

   Dalam strategi rencana pengembangan diri tentu didapatkan hasil pemetaan potensi diri. Berbagai potensi di atas, kemudian dapat juga dimasukkan dalam tahap-tahap strategi perencanaan pengembangan diri yang telah diatur dalam formula-formula yang sudah ditentukan. Untuk itulah, maka formula yang didapatkan kemudian dapat diwujudkan dalam rencana-rencana aksi. Pelaksanaan rencana aksi tersebut dapat disesuaikan dengan kinerja dari proyek perubahan yang dijalankan.

6. Menetapkan deadline dan mengevaluasi hasil

   Rencana aksi yang dijalankan dalam rangka strategi pengembangan diri haruslah diberi batas waktu Deadline tersebut harus disepakati oleh diri peserta untuk membentuk karakter disiplin dan tepat waktu. Tidak hanya itu, setelah deadline berhasil dilakukan maka perlu sekali untuk mengevaluasi atas apa yang telah dikerjakan. Semua dilakukan agar target dan prioritas dalam aksi-aksi yang membutuhkan pengembangan diri dapat berjalan sesuai rencana pelaksanaan proyek perubahan.

2.5. RENCANA MATA PELATIHAN PILIHAN MENDUKUNG PROYEK PERUBAHAN

2.5.1. Kepemimpinan Digital

Kepemimpinan digital dalam konteks pemerintahan membutuhkan kombinasi kompetensi teknologi dan transformasi budaya yang strategis. Tiga pilar utama dalam kepemimpinan digital ini adalah penguasaan teknologi, transformasi budaya organisasi, dan pemberdayaan sumber daya manusia.

a. Penguasaan Teknologi

Seorang pemimpin digital harus menguasai teknologi terkini, seperti sistem informasi dan aplikasi digital, untuk mendukung efektivitas layanan publik. Kemampuan ini mencakup pemilihan teknologi yang tepat, pelaksanaan alat digital secara efisien, serta perlindungan data untuk mendukung keamanan dan privasi dalam layanan organisasi. Penguasaan teknologi menjadi dasar bagi pemimpin untuk memastikan digitalisasi yang tepat guna dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

b. Transformasi Budaya Organisasi

Kepemimpinan digital tidak sekadar memanfaatkan teknologi, tetapi juga mencakup perubahan budaya kerja. Pemimpin bertanggung jawab membimbing organisasi untuk mengadopsi budaya kerja yang fleksibel, kolaboratif, dan berbasis data. Transformasi budaya ini melibatkan pelatihan adaptif, mendorong transparansi, serta pengambilan keputusan berdasarkan data. Melalui transformasi budaya ini, diharapkan organisasi mampu bekerja secara dinamis dan lebih responsif dalam memenuhi kebutuhan pelayanan publik.

c. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

Dengan digitalisasi yang berkembang pesat, pemimpin juga perlu memberdayakan sumber daya manusia melalui peningkatan keterampilan baru, seperti literasi digital, analisis data, dan inovasi. Pengembangan kompetensi ini memungkinkan pegawai bekerja lebih produktif dalam era digital, menambah nilai bagi organisasi, dan memberikan layanan publik yang optimal.

Jalur Pembelajaran yang digunakan pada mata pelatihan ini yaitu *Asynchronous* dengan sumber pembelajaran berupa buku/modul, jurnal/*paper* dan Webinar. Mata pelatihan ini disampaikan melalui metode *Asynchronous*, yaitu model pembelajaran yang memungkinkan peserta belajar secara mandiri dengan mengakses materi kapan saja dan sesuai ritme masing-masing. Hubungan materi ini dengan proyek perubahan yaitu memberikan pemahaman kepemimpinan serta tata kelola berbasis digital agar dapat meningkatkan pelayanan di dalam organisasi/unit kerja

2.5.2. Manajemen Strategis Sektor Publik

Manajemen strategis sektor publik adalah pendekatan untuk merencanakan, mengimplementasikan, dan mengelola strategi dalam organisasi publik dengan tujuan meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan kebijakan publik secara efektif dan efisien. Dalam sektor publik, manajemen strategis berfokus pada pemanfaatan sumber daya dan kapabilitas organisasi untuk memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat. Berikut adalah elemen utama dalam manajemen strategis sektor publik:

a. Analisis Lingkungan

Tahap ini mengharuskan organisasi untuk mengevaluasi kebutuhan dan kendala yang dihadapi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Sungai Lumpur. Analisis lingkungan mencakup pemahaman mendalam terhadap

faktor sosial dan ekonomi yang memengaruhi nelayan, pedagang, dan pemangku kepentingan lain di sekitar TPI. Selain itu, perlu dipertimbangkan kesiapan masyarakat dan infrastruktur yang ada untuk mendukung teknologi baru seperti aplikasi GPS dan sistem surat elektronik. Analisis ini akan mengidentifikasi peluang dan potensi hambatan yang dapat memengaruhi implementasi teknologi.

b. Perumusan Strategi

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, perumusan strategi difokuskan pada pengembangan dan penerapan sistem teknologi untuk mendukung kelancaran tata kelola di TPI. Hal ini mencakup rencana pembuatan aplikasi berbasis GPS yang mampu memberikan informasi real-time mengenai area berkumpulnya ikan. Selain itu, penerapan *Surat Keterangan Ikan Elektronik* diharapkan dapat mengurangi proses administratif manual, meningkatkan akurasi data, dan meningkatkan transparansi di lingkungan pelelangan ikan. Strategi ini difokuskan untuk mencapai tujuan utama proyek yaitu efisiensi dan peningkatan kualitas pelayanan yang dirasakan oleh seluruh pemangku kepentingan.

c. Implementasi Strategi

Implementasi melibatkan langkah-langkah konkrit dalam pengenalan aplikasi GPS dan *Surat Keterangan Ikan Elektronik* kepada masyarakat nelayan dan pengelola TPI. Tahapan ini mencakup pelatihan bagi pengguna terkait untuk memastikan pemahaman yang baik mengenai penggunaan teknologi, serta penyediaan perangkat yang mendukung operasional sistem baru. Selain itu, kolaborasi dengan penyedia teknologi dan tenaga ahli diperlukan untuk memastikan bahwa sistem yang diterapkan memiliki aksesibilitas tinggi, aman, dan sesuai dengan kebutuhan

TPI. Proses implementasi ini juga mencakup penetapan prosedur operasional dan kebijakan penggunaan yang jelas.

d. Evaluasi dan Pengendalian

Evaluasi dan pengendalian dilaksanakan untuk menilai apakah aplikasi GPS dan *Surat Keterangan Ikan Elektronik* memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan efisiensi dan transparansi di TPI. Proses evaluasi melibatkan pemantauan kinerja sistem secara berkala untuk menilai tingkat adopsi, efektivitas, dan keakuratan data yang dihasilkan. Berdasarkan hasil evaluasi ini, organisasi dapat melakukan penyesuaian, seperti penyempurnaan fitur aplikasi atau peningkatan frekuensi pelatihan untuk memaksimalkan manfaat teknologi yang diterapkan.

Mata Pelatihan ini menggunakan jalur Pembelajaran *Asynchronous* serta sumber pembelajaran berupa buku/modul, jurnal/*paper* dan Webinar. Melalui pendekatan manajemen strategis sektor publik yang sistematis, transformasi tata kelola berbasis teknologi di TPI Sungai Lumpur diharapkan dapat Memberikan pengetahuan tentang tata kelola yang berkelanjutan bagi masyarakat khususnya disektor perikanan

2.5.3. Kemitraan Swasta dan Pemerintah

Kemitraan Swasta dan Pemerintah, atau *Public-Private Partnership* (PPP), adalah kolaborasi antara sektor publik dan sektor swasta untuk mendukung proyek-proyek yang berorientasi pada pelayanan publik. Dalam proyek "Transformasi Tata Kelola Tempat Pelelangan Ikan Sungai Lumpur Berbasis Teknologi," kemitraan ini dapat memainkan peran penting dalam mempercepat penerapan teknologi dan memaksimalkan dampak positif bagi para nelayan, pedagang, dan pemangku kepentingan lainnya. Berikut ini adalah beberapa aspek dari kemitraan ini yang relevan dengan proyek Anda:

1. Kolaborasi dalam Penyediaan Teknologi

   Sektor swasta, khususnya perusahaan teknologi, dapat berperan sebagai mitra utama dalam pengembangan aplikasi berbasis GPS untuk pemantauan area tempat berkumpulnya ikan dan sistem *Surat Keterangan Ikan Elektronik*. Sektor publik (misalnya, instansi pemerintah atau unit pengelola TPI) dapat menyediakan data dan infrastruktur pendukung, sementara sektor swasta bertanggung jawab atas pengembangan dan pemeliharaan teknologi tersebut. Kemitraan ini memungkinkan penerapan teknologi yang efisien dan mutakhir, yang mungkin sulit dicapai oleh sektor publik sendiri karena keterbatasan anggaran dan keterampilan teknis.

2. Pembagian Risiko dan Biaya

   Dalam proyek ini, pembiayaan dan risiko dapat dibagi antara sektor publik dan sektor swasta. Misalnya, sektor swasta dapat menanggung sebagian biaya pengembangan dan implementasi teknologi, sementara sektor publik memberikan insentif atau dukungan kebijakan untuk memastikan keberhasilan proyek. Model ini memungkinkan sektor publik untuk mengurangi beban biaya sambil memastikan ketersediaan teknologi berkualitas tinggi bagi para pengguna, seperti nelayan dan pedagang ikan. Pembagian risiko ini juga mengurangi potensi kerugian bagi kedua belah pihak jika proyek mengalami hambatan atau tantangan teknis.

3. Peningkatan Kapasitas dan Transfer Pengetahuan

   Kemitraan ini juga memungkinkan transfer pengetahuan dan peningkatan kapasitas bagi tenaga kerja di TPI. Melalui kolaborasi dengan sektor swasta, pengelola TPI dan para nelayan dapat menerima pelatihan mengenai penggunaan teknologi terbaru, termasuk aplikasi berbasis GPS dan

sistem *Surat Keterangan Ikan Elektronik*. Sektor swasta dapat menyediakan pelatihan ini sebagai bagian dari kesepakatan kemitraan, sehingga kompetensi digital para pemangku kepentingan lokal meningkat dan mendukung keberlanjutan teknologi yang diterapkan.

4. Kepatuhan Terhadap Standar dan Regulasi
   Kemitraan dengan sektor swasta memungkinkan proyek ini untuk memenuhi standar teknologi dan regulasi pemerintah. Misalnya, teknologi yang dikembangkan harus sesuai dengan standar keamanan data dan privasi untuk melindungi informasi para nelayan dan pedagang. Kolaborasi ini memastikan bahwa aplikasi dan sistem yang digunakan di TPI tidak hanya efisien, tetapi juga aman dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

5. Sustainabilitas Proyek dalam Jangka Panjang
   Melalui kemitraan ini, sektor swasta juga dapat berperan dalam pemeliharaan jangka panjang dan pembaruan sistem teknologi yang digunakan di TPI. Hal ini dapat mencakup pemantauan aplikasi GPS, pembaruan fitur pada *Surat Keterangan Ikan Elektronik*, atau peningkatan keamanan data. Dengan adanya kemitraan yang berkelanjutan, sistem yang diimplementasikan tidak hanya bersifat sementara tetapi memiliki dukungan jangka panjang yang penting untuk sustainabilitas proyek.

Mata Pelatihan ini menggunakan jalur Pembelajaran *Asynchronous* serta sumber pembelajaran berupa buku/modul, jurnal/*paper* dan Webinar. Kemitraan Swasta dan Pemerintah berpotensi membawa dampak signifikan dalam meningkatkan efisiensi operasional, meminimalkan biaya, dan memperluas cakupan teknologi sehingga memberikan pemahaman tentang kerjasama yang saling

menguntungkan antara swasta dan pemerintah. Hal ini akan meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi para nelayan dan pengguna layanan TPI secara keseluruhan.

BAB III

PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN

3.1. CAPAIAN PELAKSANAAN TAHAPAN JANGKA PENDEK

Proyek perubahan jangka pendek dimulai pada minggu ke II bulan Oktober tahun 2024 yang berfokus pada Transformasi Tata Kelola Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Sungai Lumpur Berbasis Teknologi di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Langkah ini merupakan upaya komprehensif guna meningkatkan efisiensi, akurasi data, dan transparansi layanan di TPI sebagai bagian dari peningkatan kesejahteraan nelayan dan produktivitas sektor perikanan daerah.

Berdasarkan pembekalan Implementasi Proyek Perubahan dalam rangka transformasi TPI berbasis teknologi, diharapkan output jangka pendek dapat diselesaikan dengan optimal. Mengacu pada rancangan awal proyek perubahan, beberapa capaian jangka pendek yang harus dicapai antara lain adalah sebagai berikut:

1. Terbentuknya Tim Efektif Proyek Perubahan;
2. Terancangnya system e-SKAI yang mempercepat proses penerbitan SKAI;
3. Meningkatkannya efisiensi proses penerbitan e-SKAI;
4. Terlaksananya penerapan Aplikasi GPS area prediksi tangkap Ikan;
5. Terlaksananya pelatihan dan pembinaan tentang system digital dan teknologi yang diterapkan;
6. Terwujudnya kesepahaman (MOU) dengan stakeholders terkait.

Secara keseluruhan, hasil-hasil yang direncanakan pada tahap perubahan strategis jangka pendek berhasil diwujudkan sesuai rencana. Berikut ini adalah capaian yang telah tercapai pada tahap perubahan strategis jangka pendek ini.

3.1.1. Membentuk Tim Efektif Proyek Perubahan

Langkah awal yang krusial adalah pembentukan Tim Efektif. Tim ini berfungsi sebagai tim yang mampu mencapai sasaran proyek, yaitu meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam tata kelola Tempat Pelelangan Ikan (TPI) berbasis teknologi. Dalam tim yang efektif, setiap anggota berkomitmen menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan sungguh-sungguh untuk mewujudkan tujuan bersama. Rasa memiliki atau taking ownership terhadap tujuan tim perlu tertanam dalam diri setiap anggota, sehingga tumbuh rasa tanggung jawab dan kesediaan berkontribusi demi mencapai tujuan kolektif. Keberadaan tim efektif ini sangat penting untuk mempercepat pencapaian sasaran proyek, meningkatkan kreativitas dalam mengatasi kendala, serta menjamin kualitas hasil dalam penerapan teknologi di TPI Sungai Lumpur.

Tim Efektif dibentuk untuk mendukung *Project Leader* dalam memastikan pelaksanaan Proyek Perubahan sesuai rencana, dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Nomor: 523/265.A/DISKAN.OKI/X/2024 tertanggal 01 Oktober 2024 tentang Pembentukan Tim Efektif Proyek Perubahan Dinas Perikanan Pada PKN II Angkatan XXXVII LAN RI BPSDM Provinsi Sumatera Selatan 2024. SK ini menetapkan susunan tim yang meliputi *Project Leader*, Tim Administrasi, Tim Teknis dan Tim IT, dengan partisipasi dari Dinas Perikanan serta beberapa dinas terkait. Penetapan Tim Efektif ini menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh anggota dalam menjalankan tugasnya, sehingga proyek dapat diimplementasikan dengan efektif dan efisien.

Gambar 3.1. Koordinasi dengan Mentor

Gambar 3.2. Pembentukan Tim Efektif

Rapat persiapan pembentukan Tim Kerja Efektif untuk Proyek Perubahan Dinas Perikanan diselenggarakan pada tanggal 10 Oktober 2024 di Ruang Rapat Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Rapat ini dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Perikanan selaku *Project Leader* dan dihadiri oleh para pegawai dari lingkup Dinas Perikanan yang akan menjadi bagian dari Tim Kerja Efektif. Dalam rapat tersebut, *Project Leader* menjelaskan latar belakang proyek perubahan, rencana implementasi yang akan dilaksanakan, tujuan dan

manfaat proyek, serta ruang lingkup yang mencakup pengembangan aplikasi e-SKAI dan fitur GPS untuk nelayan. Komitmen bersama dari seluruh anggota tim ditekankan sebagai kunci keberhasilan implementasi proyek ini.

Pembentukan Tim Efektif ini mengacu pada hasil diskusi Project Leader dengan mentor dan sesuai dengan Rancangan Proyek Perubahan (RPP). Tim disusun berdasarkan keahlian dan tugas masing-masing anggota untuk mendukung kelancaran pelaksanaan proyek transformasi tata kelola TPI. Hasil akhir dari rapat ini adalah adanya komitmen dan kesepakatan mengenai proyek perubahan, dengan keputusan pembentukan tim efektif dan rancangan struktur tata kelola pelaksanaan proyek yang tercatat dalam notulen rapat.

Tindak lanjut dari rapat ini adalah penetapan Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Nomor: 523/265.A/DISKAN.OKI/X/2024 tertanggal 01 Oktober 2024 tentang Pembentukan Tim Efektif Proyek Perubahan Dinas Perikanan Pada PKN II Angkatan XXXVII LAN RI BPSDM Provinsi Sumatera Selatan 2024. SK ini menetapkan susunan tim yang meliputi *Project Leader*, Tim Administrasi, Tim Teknis dan Tim IT, dengan partisipasi dari Dinas Perikanan serta beberapa dinas terkait. Penetapan Tim Efektif ini menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh anggota dalam menjalankan

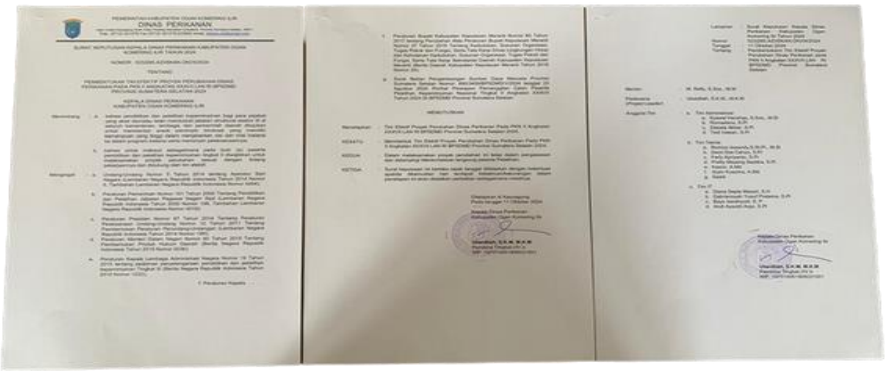
DINAS PERIKANAN

Gambar 3.3. SK Pembentukan Tim Efektif

3.1.2. Merancang System *e*-SKAI yang Mempercepat Proses Penerbitan SKAI

Sistem *e*-SKAI (Surat Keterangan Asal Ikan Elektronik) dirancang untuk mempercepat dan mempermudah penerbitan SKAI, dan diakses langsung oleh pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir melalui platform *e-Office* yang sudah ada. Untuk memastikan sistem ini berjalan optimal, perancangan dilakukan dengan bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kolaborasi ini mencakup pengembangan infrastruktur digital, keamanan data, dan integrasi sistem e-SKAI ke dalam platform e-Office yang telah ada. Penerapan *e*-SKAI pada *e-Office* ini dilakukan dalam beberapa tahapan utama untuk memastikan sistem dapat memenuhi kebutuhan pengelolaan data hasil tangkapan ikan secara efisien.

Gambar 3.4. Koordinasi dengan Kominfo OKI

1. Rapat Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) *e*-SKAI

   Sebagai langkah awal dalam memastikan implementasi e-SKAI berjalan dengan baik, Tim Efektif mengadakan rapat untuk menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP). Rapat ini bertujuan untuk menetapkan

alur kerja yang sistematis dan terstandarisasi dalam penerbitan Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI) secara digital. Dalam pembahasan, ditekankan pentingnya SOP untuk memberikan panduan jelas bagi pegawai Dinas Perikanan dalam melaksanakan proses penerbitan, sekaligus memastikan pelayanan dapat dilakukan secara konsisten dan efisien. SOP e-SKAI yang dihasilkan mencakup langkah-langkah berikut:

a. Registrasi Permohonan

   Nelayan mendaftarkan permohonan SKAI melalui sistem *e*-SKAI yang terintegrasi dengan *eOffice*.

b. Verifikasi Dokumen

   Pegawai Dinas Perikanan memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen yang diunggah.

c. Proses Persetujuan

   Permohonan yang telah diverifikasi dikirimkan ke pejabat berwenang untuk disetujui secara elektronik.

d. Penerbitan dan Pengarsipan SKAI

   SKAI yang telah disetujui diterbitkan dalam format elektronik dan dikirimkan kepada pemohon. Salinan dokumen otomatis tersimpan dalam sistem.

e. Monitoring dan Evaluasi

   Sistem *e*-SKAI menyediakan fitur untuk memantau proses penerbitan SKAI, memastikan semua permohonan terselesaikan sesuai dengan SLA (*Service Level Agreement*).

   SOP ini dirancang mengikuti pedoman penyusunan prosedur administrasi pemerintah yang mengutamakan prinsip efisiensi, akurasi, dan

kepatuhan terhadap peraturan, sebagaimana diatur dalam Permen PANRB No. 35 Tahun 2012.

2. Integrasi Data SKAI dengan *e*-Office

Integrasi data dari proses manual SKAI ke platform digital *e-Office* adalah langkah awal dalam transformasi ini. Tahapan ini bertujuan untuk memudahkan pegawai Dinas Perikanan dalam pencatatan dan pengelolaan data secara online. Langkah-langkahnya meliputi:

a. Evaluasi Data SKAI Manual

Dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap data SKAI yang selama ini dikelola secara manual untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data sebelum dipindahkan ke sistem *e-Office*.

b. Penyesuaian dengan Sistem *e-Office* untuk Mendukung Alur *e*-SKAI

Tim IT bersama dengan pihak Kominfo OKI menyesuaikan alur kerja di *e-Office* agar dapat mendukung pengajuan, verifikasi, dan penerbitan SKAI secara digital sesuai prosedur Dinas Perikanan, memastikan bahwa setiap fungsi beroperasi dengan lancar dan aman.

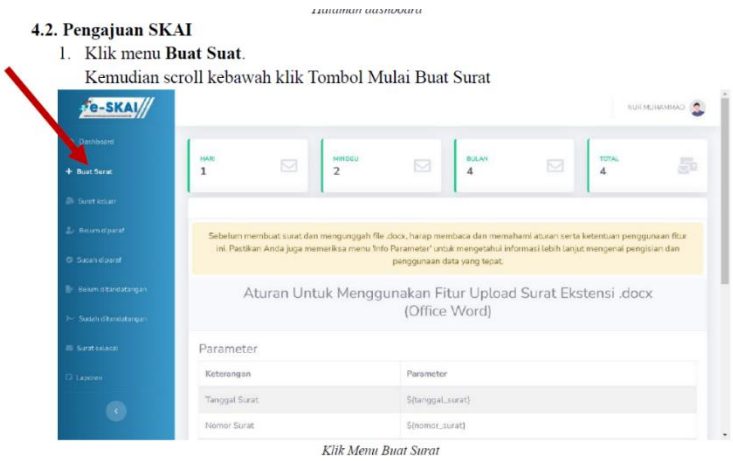

Gambar 3.5. Tampilan Pembuatan Surat Keterangan Ikan Elektronik (*e*-SKAI)

3. Finalisasi dan Pengujian *e*-SKAI dalam *e-Office*

Tahap terakhir melibatkan uji coba oleh pegawai Dinas Perikanan untuk memastikan bahwa semua fungsi *e*-SKAI dalam *e-Office* berjalan sesuai kebutuhan operasional. Pengujian ini bertujuan mengidentifikasi potensi masalah serta menyempurnakan sistem agar siap digunakan secara penuh untuk pengelolaan SKAI yang lebih cepat dan efisien

3.1.3. Meningkatkan Efisiensi Proses Penerbitan e-SKAI dan Penerapan Aplikasi GPS Area Prediksi Tangkap Ikan

Pada tahap awal proyek ini, telah dilakukan identifikasi terhadap tantangan dalam penerapan e-SKAI di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Hasil evaluasi menunjukkan beberapa kendala, seperti aksesibilitas terbatas untuk pegawai yang berwenang, alur verifikasi data yang membutuhkan penyesuaian agar lebih efisien, dan perlunya integrasi yang lebih kuat dengan sistem lain yang relevan. Selain itu, ditemukan bahwa beberapa proses manual sebelumnya menghambat efektivitas penerbitan SKAI. Dengan identifikasi ini, langkah perbaikan dapat difokuskan untuk menyempurnakan sistem yang ada, sehingga proses penerbitan e-SKAI berjalan lebih lancar dan cepat.

Selama pelaksanaan proyek, telah dilakukan analisis mendalam mengenai kebutuhan setiap pemangku kepentingan dalam penggunaan layanan e-SKAI dan layanan informasi area tangkap ikan berbasis GPS .

1. **Nelayan**: Dari hasil survei dan wawancara, diketahui bahwa nelayan membutuhkan akses langsung ke data lokasi tangkapan ikan yang mudah dipahami dan diakses dari perangkat sederhana. Hasil uji coba GPS menunjukkan bahwa fitur-fitur yang disediakan telah

membantu nelayan menemukan lokasi potensial dengan lebih efektif.

2. **Dinas Perikanan**: Pegawai Dinas Perikanan yang mengelola e-SKAI melaporkan bahwa sistem ini mempermudah pencatatan dan penerbitan SKAI secara digital, dengan antarmuka yang memungkinkan proses verifikasi lebih cepat. Umpan balik pegawai juga menunjukkan peningkatan keandalan data dan waktu penyelesaian SKAI dibandingkan dengan proses manual.
3. **Pihak Terkait Lainnya**: Partisipasi dari komunitas perikanan dan lembaga pemerintah lainnya turut mendukung implementasi layanan e-SKAI dan layanan informasi area tangkap ikan berbasis GPS . Mereka melaporkan bahwa informasi yang diperoleh dapat membantu koordinasi dalam pengelolaan sumber daya ikan secara berkelanjutan.

Gambar 3.6. Rapat Evaluasi Layanan *e*-SKAI

Merujuk pada hasil *benchmarking* ke Kabupaten Bangka Tengah terhadap teknologi GPS yang digunakan telah menunjukkan hasil yang positif. Beberapa indikator yang dinilai meliputi:

1. **Akurasi dan Jangkauan**: Teknologi GPS yang diimplementasikan terbukti mampu memberikan prediksi lokasi penangkapan ikan yang akurat. Berdasarkan hasil pengamatan, akurasi data GPS dan jangkauannya sesuai dengan kebutuhan area tangkapan nelayan di Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. **Kemudahan Penggunaan**: Umpan balik dari para nelayan menunjukkan bahwa antarmuka GPS sederhana dan mudah dipahami, sehingga dapat dioperasikan dengan mudah bahkan oleh nelayan yang tidak terbiasa dengan teknologi digital. Penggunaan perangkat GPS ini telah membantu meningkatkan efisiensi waktu pencarian lokasi tangkapan.
3. **Integrasi Data**: Teknologi GPS berhasil terintegrasi dengan data lingkungan seperti suhu air dan arus laut, yang berperan penting dalam menentukan lokasi ikan. Evaluasi ini memastikan bahwa sistem yang diterapkan mampu memberikan prediksi yang relevan dan bermanfaat bagi nelayan.
4. **Keberlanjutan**: Berdasarkan hasil evaluasi finansial dan operasional, teknologi GPS yang diterapkan memiliki biaya yang sesuai dan dukungan pemeliharaan yang memadai. Adopsi sistem ini menjadi poin penting untuk jangka panjang, agar nelayan terus dapat memanfaatkan teknologi tanpa beban biaya yang terlalu tinggi.

Gambar 3.7. *Mapping* Kerjasama Dengan *Stakeholders*

3.1.4. Pelatihan dan Pembinaan Tentang *System* Digital Dan Teknologi Yang Diterapkan

1. Sosialisasi

Sosialisasi Tentang *System* Digital Dan Teknologi Yang Diterapkan dilaksanakan di Kecamatan Cengal, Desa Pantai Harapan dan Desa Sungai Lumpur oleh *Project Leader* dan Bidang Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Proses sosialisasi *System* Digital dimulai dengan pengenalan terhadap sistem tersebut, tujuannya, dan bagaimana cara prosedur penggunaanya.

Gambar 3.8. Sosialisai e-SKAI Kecamatan Cengal, Desa Pantai Harapan dan Desa Sungai Lumpur

2. Pelatihan (*Workshop*)

Pelatihan tentang Sistem Digital dan Teknologi yang diterapkan pada Surat Keterangan Asal Ikan Elektronik (e-SKAI) dirancang untuk meningkatkan kompetensi petugas dan pengelola layanan e-SKAI dalam mengoptimalkan penggunaan teknologi ini. Pelatihan ini menghadirkan narasumber dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir (Kominfo Kab. OKI), yang memberikan penjelasan mendalam terkait implementasi sistem digital e-SKAI, mulai dari tata kelola hingga pemanfaatan aplikasi berbasis web. Selain itu, peserta pelatihan diberikan modul yang berisi panduan teknis penggunaan e-SKAI, sehingga dapat mempermudah mereka dalam mengoperasikan sistem secara mandiri setelah pelatihan. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan pelayanan e-SKAI berjalan efektif dan mendukung pengelolaan data perikanan secara terintegrasi.

Gambar 3.9. Pelatihan e-SKAI Dinas Perikanan OKI

3.1.5. Membangun Kesepahaman (MOU) dengan Stakeholders Terkait

Sebagai bagian dari upaya keberhasilan implementasi *layanan e-SKAI dan layanan informasi area tangkap ikan*

berbasis GPS untuk prediksi lokasi tangkapan ikan, pembangunan kesepahaman melalui Nota Kesepahaman (MoU) dengan stakeholders terkait menjadi langkah penting. Berikut adalah proses yang telah dilakukan untuk mencapai kesepahaman dan komitmen bersama antara Tim Efektif Proyek dan stakeholders yang berperan.

1. Konsultasi dan Koordinasi antara Tim Efektif dan Stakeholders

   Langkah pertama dalam proses ini adalah melakukan konsultasi dan koordinasi antara Tim Efektif dan para stakeholders terkait, termasuk Dinas Perikanan, lembaga pemerintahan yang terlibat, komunitas nelayan, dan pihak-pihak pendukung lainnya. Dalam pertemuan awal, Tim Efektif mempresentasikan tujuan dan manfaat dari proyek perubahan ini, yaitu penerapan e-SKAI dan GPS untuk meningkatkan efisiensi layanan serta memudahkan nelayan dalam menentukan lokasi tangkapan. Koordinasi ini dilakukan untuk membangun pemahaman awal serta mengidentifikasi peran setiap stakeholder dalam mendukung keberhasilan proyek.

Gambar 3.10. Koordinasi dengan Mentor

Gambar 3.11. Koordinasi dengan Bagian Hukum SetDa OKI

2. Rapat dengan Stakeholders untuk Mapping Kerja Sama yang Akan Dilaksanakan

   Setelah mendapatkan dukungan awal, Tim Efektif mengadakan rapat dengan stakeholders untuk menyusun kerangka kerja sama yang akan dilakukan. Dalam pertemuan ini, dibahas pembagian tanggung jawab, area kerja sama, dan sumber daya yang akan disediakan oleh masing-masing pihak. *Mapping* kerja sama ini mencakup komitmen untuk mendukung implementasi e-SKAI dalam e-Office dan penggunaan teknologi GPS. Pertemuan ini menghasilkan dokumen konsep kerja sama yang nantinya akan dituangkan dalam MoU, dengan perincian dukungan, seperti pengadaan perangkat, pelatihan, pemeliharaan data, dan sosialisasi kepada masyarakat nelayan.

3. Penandatanganan MoU dengan Stakeholders Terkait

   Tahap akhir dari proses ini adalah penandatanganan MoU antara Tim Efektif dan stakeholders. Nota Kesepahaman ini menandai komitmen resmi setiap pihak untuk berkolaborasi dalam mendukung implementasi e-SKAI dan teknologi GPS yang telah disepakati.

Penandatanganan ini menjadi dasar hukum bagi setiap stakeholder untuk menjalankan peran dan kontribusinya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Dengan adanya MoU ini, diharapkan setiap pihak dapat berkoordinasi lebih baik untuk mencapai tujuan bersama dalam memperbaiki tata kelola perikanan berbasis teknologi di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Gambar 3.12. Penanda Tanganan MOU Dengan Kepala Dinas Perikanan Kab. Bangka Tengah

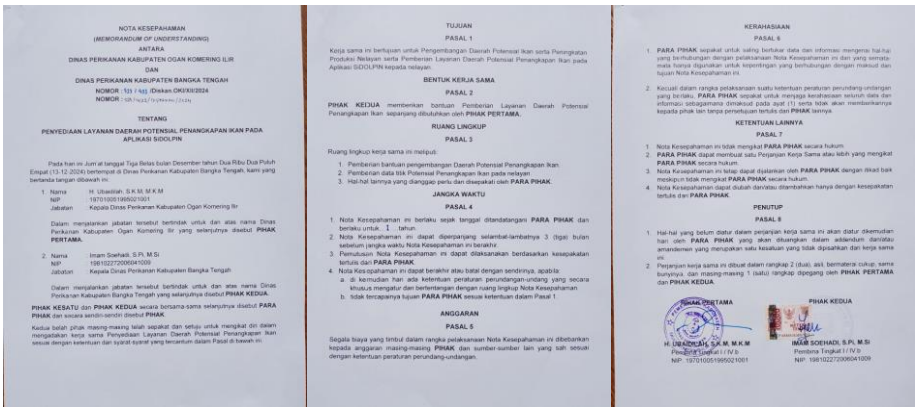

NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
DINAS PERIKANAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DAN
DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR : 1[illegible] / 4[illegible]. /Dinkan OKI/XII/2024
NOMOR : [illegible]

TENTANG
PENYEDIAAN LAYANAN DAERAH POTENSIAL PENANGKAPAN IKAN PADA APLIKASI SIDOLPIN

Pada hari ini Jum'at tanggal Tiga Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (13-12-2024) bertempat di Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama H. Ubaidilah, S.K.M. M.K.M
   NIP 197010051995021001
   Jabatan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir

   Dalam menjalankan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama Imam Soehadi, S.Pi. M.Si
   NIP 196102272006041009
   Jabatan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah

   Dalam menjalankan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Kedua belah pihak masing-masing telah sepakat dan setuju untuk mengikat diri dalam mengadakan kerja sama Penyediaan Layanan Daerah Potensial Penangkapan Ikan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal-di bawah ini:

TUJUAN
PASAL 1
Kerja sama ini bertujuan untuk Pengembangan Daerah Potensial Ikan serta Peningkatan Produksi Nelayan serta Pemberian Layanan Daerah Potensial Penangkapan Ikan pada Aplikasi SIDOLPIN kepada nelayan.

BENTUK KERJA SAMA
PASAL 2
PIHAK KEDUA memberikan bantuan Pemberian Layanan Daerah Potensial Penangkapan Ikan sepanjang dibutuhkan oleh **PIHAK PERTAMA.**

RUANG LINGKUP
PASAL 3
Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:
1. Pemberian bantuan pengembangan Daerah Potensial Penangkapan Ikan
2. Pemberian data titik Potensial Penangkapan Ikan pada nelayan
3. Hal-hal lainnya yang dianggap perlu dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

JANGKA WAKTU
PASAL 4
1. Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK** dan berlaku untuk...1...tahun.
2. Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
3. Pemutusan Nota Kesepahaman ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.
4. Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila:
   a. di kemudian hari ada ketentuan peraturan perundangan-undang yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman
   b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan dalam Pasal 1

ANGGARAN
PASAL 5
Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK**, dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KERAHASIAAN
PASAL 6
1. **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini.
2. Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

KETENTUAN LAINNYA
PASAL 7
1. Nota Kesepahaman ini tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
2. **PARA PIHAK** dapat membuat suatu Perjanjian Kerja Sama atau lebih yang mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
3. Nota Kesepahaman ini tetap dapat dijalankan oleh **PARA PIHAK** dengan iktikad baik meskipun tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
4. Nota Kesepahaman dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.

PENUTUP
PASAL 8
1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dikemudian hari oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam addendum dan/atau amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari kerja sama ini.
2. Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermaterai cukup, sama bunyinya dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA
H. UBAIDILAH, S.K.M. M.K.M
Pembina Tingkat I / IV b
NIP. 197010051995021001

PIHAK KEDUA
IMAM SOEHADI, S.Pi. M.Si
Pembina Tingkat I / IV b
NIP. 196102272006041009

Gambar 3.13. Surat MOU Dengan Kepala Dinas Perikanan Kab. Bangka Tengah

3.2. MANFAAT CAPAIAN TAHAPAN JANGKA PENDEK

Manfaat capaian tahapan jangka pendek pada proyek perubahan ini meliputi manfaat ekonomis, manfaat umum, manfaat bagi organisasi, manfaat bagi stakeholders, dan manfaat bagi

masyarakat. Setelah terlaksananya proyek transformasi tata kelola TPI, sejumlah manfaat signifikan telah dirasakan oleh pihak-pihak terkait, mendukung peningkatan efisiensi dan kesejahteraan nelayan di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Manfaat Ekonomis pada proyek perubahan ini adalah meningkatnya efisiensi waktu dan biaya bagi pengguna Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI). Proyek ini juga memberikan manfaat kepada para nelayan dengan menghemat biaya transportasi mereka dalam pembuatan SKAI dan dapat menjaga kualitas ikan lebih lama karena efisiensi waktu dalam pengurusan SKAI sehingga penghasilan yang didapatkan nelayan lebih baik. Kemudian peningkatan investasi daerah dan minat berusaha sebagai hasil karena kemudahan peluang berusaha. Proyek ini juga mengoptimalisasi potensi ekonomi daerah melalui program inovasi yang bernilai tambah.

Manfaat umum dari proyek perubahan ini meliputi tersedianya sarana dan prasarana digital yang memadai melalui implementasi e-SKAI dan terlaksananya MOU pemanfaatan aplikasi GPS area tangkap ikan bersama kabupaten Bangka Tengah di TPI Sungai Lumpur Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dengan berjalannya sistem baru ini, tantangan utama yang sebelumnya dihadapi nelayan, seperti lambatnya penerbitan SKAI, telah berhasil diatasi. Proses administrasi SKAI kini lebih cepat, akurat, dan transparan, memungkinkan nelayan untuk lebih fokus pada peningkatan produktivitas. Selain itu, sistem GPS area tangkap ikan diharapkan dapat membantu nelayan menemukan lokasi tangkapan dengan lebih tepat, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya operasional di laut. Dengan adanya proyek perubahan ini, tata kelola TPI mengalami modernisasi yang efektif, mendukung keberlanjutan sektor perikanan.

Manfaat bagi organisasi pada proyek perubahan ini terlihat dalam peningkatan efisiensi layanan di Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dengan penggunaan teknologi digital dalam penerbitan SKAI, waktu dan sumber daya yang sebelumnya

digunakan untuk proses manual kini dapat dialokasikan secara lebih efektif. Selain itu, data hasil tangkapan yang tercatat melalui e-SKAI memungkinkan Dinas Perikanan untuk melakukan analisis mendalam yang mendukung pengambilan kebijakan berbasis data secara lebih tepat. Keberhasilan proyek ini juga memperkuat citra Dinas Perikanan sebagai lembaga yang inovatif dalam pemanfaatan teknologi untuk pelayanan publik, sekaligus meningkatkan kompetensi SDM dalam mengelola sistem digital.

Manfaat bagi stakeholders mencakup akses lebih mudah ke data perikanan yang akurat dan terkini, yang sangat membantu dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Setelah penandatanganan MoU dengan stakeholders terkait, seperti pemerintah daerah, komunitas nelayan, dan sektor swasta, kerja sama dalam pengelolaan perikanan kini berlangsung lebih solid. Kolaborasi ini membuka peluang usaha baru bagi sektor swasta dan investor di bidang perikanan, didukung oleh infrastruktur digital yang memudahkan pemantauan dan perencanaan usaha. Keterlibatan stakeholders dalam sistem ini juga memperkuat kerja sama lintas sektor untuk pengembangan perikanan yang berkelanjutan.

Manfaat bagi masyarakat dari proyek perubahan ini terutama terlihat dalam efisiensi dan transparansi yang dihadirkan oleh sistem e-SKAI. Proses pengurusan SKAI yang sebelumnya membutuhkan waktu yang lama kini dapat diselesaikan lebih cepat, sehingga menghemat waktu dan sumber daya bagi nelayan. Selain itu, penerapan aplikasi GPS memberikan keuntungan langsung bagi nelayan dalam menentukan titik tangkapan ikan yang potensial, sehingga meningkatkan hasil tangkapan mereka dan mengurangi risiko usaha. Dengan proyek perubahan ini, masyarakat nelayan tidak hanya mendapatkan akses lebih baik ke layanan perikanan, tetapi juga merasakan dukungan berkelanjutan dari Dinas Perikanan dalam mengelola sumber daya perikanan yang efektif dan berkelanjutan.

3.3. KEPEMIMPINAN STARTEGIS

Kepemimpinan strategis dalam proyek perubahan merupakan aspek penting dalam memastikan keberhasilan perubahan yang diinginkan dalam organisasi. Proyek perubahan seringkali melibatkan transformasi dalam proses, budaya, struktur, atau strategi organisasi, dan kepemimpinan strategis diperlukan untuk mengelola perubahan tersebut dengan efektif. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kepemimpinan strategis dalam proyek perubahan:

1. Visi dan Pengarah Utama

   Pemimpin strategis memiliki visi yang jelas tentang perubahan yang diinginkan dan alasan mengapa perubahan tersebut diperlukan. Visi ini disampaikan kepada seluruh tim proyek perubahan yang meliputi Tim Administrasi, Tim Teknis serta Tim IT.

2. Perencanaan Strategis

   Pemimpin strategis terlibat dalam merencanakan perubahan secara menyeluruh. Ini mencakup mengidentifikasi tujuan perubahan, mengembangkan rencana tindakan, dan menentukan sumber daya yang diperlukan. Untuk melaksanakan semua tahapan kegiatan atau millestone yang direncanakan dalam proyek perubahan ini, Pemimpin Strategis atau project leader didukung oleh Tim Efektif. Pembentukan Tim Efektif merupakan tahapan awal dalam perencanaan proyek perubahan ini.

3. Komunikasi yang Efektif

   Komunikasi adalah salah satu kunci penting dalam mengelola perubahan. Pemimpin strategis berkomunikasi secara terbuka dengan seluruh anggota Tim Efektif dan para Stakeholder sehingga. Pemimpin Strategis mengkomunikasikan bagaiman cara untuk mencapai tujuan melalui proyek perubahan, langkah-langka apa saja yang akan dilakukan termasuk potensi kendala atau resistensi yang mungkin akan terjadi. Pemimpin strategis menjelaskan mengapa perubahan

diperlukan, dan bagaimana perubahan akan memengaruhi individu dan organisasi.

4. Pengelolaan Resisten Perubahan

   Pemimpin strategis atau project leader mampu mengidentifikasi dan mengelola resistensi terhadap perubahan yang akan dilakukan. Pemimpin strategis berusaha untuk memahami/mempengaruhi tim dan stakeholder yang mungkin merasa tidak nyaman dengan perubahan tersebut, dan mencari cara untuk meminimalkan resistensi.

5. Pengukuran dan Evaluasi

   Pemimpin strategis memiliki indikator yang jelas untuk mengukur kemajuan proyek perubahan. Hal ini bertujuan untuk memantau apakah perubahan berjalan sesuai rencana dan apakah tujuan-tujuan perubahan tercapai.

6. Kepemimpinan Kolaboratif

   Dalam proyek perubahan ini, keterlibatan para stakeholder sangat diperlukan. Pemimpin strategis mampu berkolaborasi dengan berbagai pihak dan memfasilitasi kerja sama antara tim efektif dan stakeholders.

7. Kesadaran Terhadap Risiko

   Pemimpin strategis mampu mengidentifikasi dan mengelola risiko yang terkait dengan proyek perubahan. Ini termasuk risiko yang berkaitan dengan keuangan, waktu, atau dampak negatif pada Tim Kerja.

Bagian penting dalam implementasi proyek perubahan ini adalah bagaimana strategi pelayanan diterapkan dalam proses penerbitan Surat Keterangan Asal Ikan (e-SKAI) secara digital dan penggunaan aplikasi GPS untuk prediksi lokasi tangkapan ikan. Walaupun sistem dan mekanisme telah dirancang sedemikian rupa, implementasinya tidak selalu berjalan mulus. Kendala kelembagaan, keterbatasan sumber daya manusia di Dinas Perikanan, dan koordinasi antar-

stakeholders sering kali menjadi tantangan utama dalam memastikan strategi pelayanan ini dapat dijalankan secara efektif.

Kepemimpinan strategis dalam Proyek Perubahan Transformasi Tata Kelola TPI di Kabupaten Ogan Komering Ilir memainkan peran kunci dalam menghadapi tantangan ini. Pemimpin proyek memanfaatkan pemahaman yang mendalam tentang dinamika perubahan organisasi, khususnya dalam aspek tata kelola digitalisasi layanan di Dinas Perikanan. Kemampuan komunikasi yang efektif telah menjadi sarana utama dalam menjembatani koordinasi antara stakeholders, sementara pengambilan keputusan yang tepat telah membantu mengatasi hambatan-hambatan selama proses implementasi.

Sebagai agen perubahan, project leader juga berhasil memandu organisasi untuk mencapai tujuan utama proyek, yaitu modernisasi layanan penerbitan SKAI melalui teknologi digital dan efisiensi operasional dengan aplikasi GPS. Dengan peran ini, Dinas Perikanan menunjukkan komitmen dalam menghadirkan tata kelola yang inovatif dan berbasis teknologi untuk mendukung kesejahteraan nelayan serta keberlanjutan sektor perikanan.

Project leader membangkitkan personal mastery (berkompeten), mental models (pola mental), shared vision (visi bersama), team learning (tim pembelajar), dan sistems thinking (berpikir sistem), untuk mendapatkan pemahaman yang utuh dari permasalahan yang ada serta berupaya mencari alternatif solusi terbaik. Seluruh sumberdaya dalam organisasi baik internal maupun eksternal diarahkan sinergitasnya untuk mencapai tujuan output jangka pendek yang harus dicapai sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditetapkan.

3.4. IMPLEMENTASI STRATEGI MARKETING DAN DESEMINASI

3.4.1. Peta Stakeholders

Untuk memastikan optimalisasi produktivitas jejaring kerja dalam pencapaian tujuan Proyek Perubahan maka telah dilakukan pemetaan jejaring kerja dan penataan jejaring kerja.

Peta jejaring adalah alat untuk memvisualisasikan hubungan hubungan *actor* yang digunakan sebagai informasi untuk merancang strategi menciptakan hubungan-hubungan baru dalam rangka pencapaian tujuan jejaring. Hal ini ditujukan dengan penentuan unsur/ pihak yang terlibat dalam Proyek Perubahan berdasarkan Pengelompokan *Stakeholders* sesuai Kategori Pengaruh dan kepentingan meliputi *Latens, Promoters, aphatetics,* dan *defenders*.

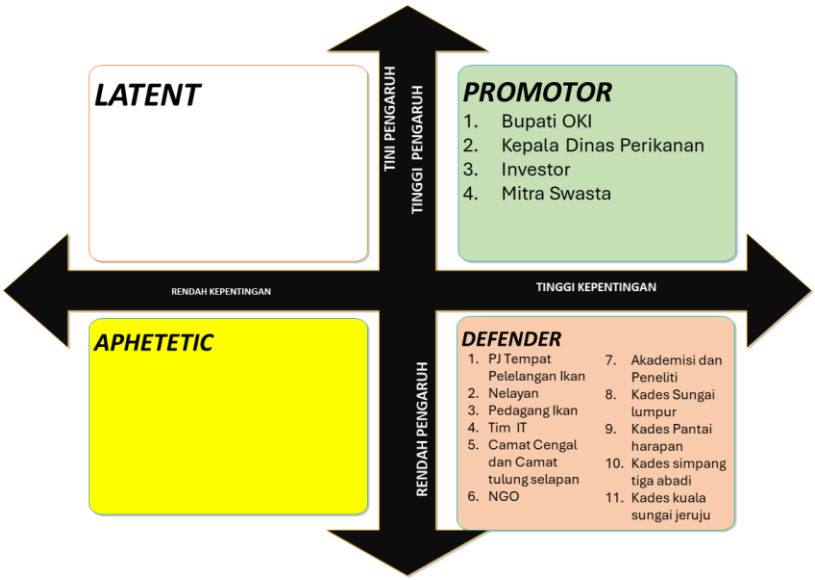

Gambar 3.14. Peta Stakeholder

3.4.2. Product, Price, Place, Promotion dan Customer (4P1C)

Dalam konteks pelaksanaan Proyek Perubahan ini, identifikasi dan deskripsi unsur-unsur *marketing mix* 4P 1C (*Customer*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.1. *Product, Price, Place, Promotion* dan *Customer*

NO	PRODUK	PRICE	PLACE	PROMOTION	CUSTOMER
1.	Keputusan Kepala Dinas Perikanan Nomor: 523/265.A/DISKAN.OKI/X/2024 Tanggal 01 Oktober 2024 tentang Pembentukan Tim Efektif Proyek Perubahan Dinas Perikanan Pada PKN II	Rp. 0,-	Pada umumnya Masyarakat Kabupaten OKI, dan khususnya pada desa	1. Radio 90.4 Kayuagung yang disiarkan tanggal 13 Desember 2024 2. Media online "BeritaAnda.Net"	Pemerintah Kab. OKI, 2. Masyarakat Kab OKI, Nelayan di Kab OKI.

	Angkatan XXXVII LAN RI BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan 2024		Sungai Lumpur	yang diterbitkan tanggal 12 Desember 2024	
2.	Pelatihan Dan Pembinaan Tentang System Digital Dan Teknologi Yang Diterapkan dilaksanakan di Kecamatan Cengal, Desa Pantai Harapan dan Desa Sungai Lumpur				
3.	Simulasi Pembuatan *e*-SKAI di Desa Wahyu Mandira				
4.	MOU dengan Kepala Dinas Bangka Tengah, Camat Wilayah Pesisir Dan Daerah Potensi Budidaya Sungai Menang, Cengal Dan Tulung Selapan	Rp. 0,-			

3.5. KEBERLANJUTAN PROYEK PERUBAHAN

Transformasi Tata Kelola Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Berbasis Teknologi Melalui *layanan e-SKAI dan layanan informasi area tangkap ikan berbasis GPS* di Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan terobosan baru yang dikembangkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sistem ini bertujuan untuk mempercepat proses penerbitan Surat Keterangan Asal Ikan (*e*-SKAI) secara digital dan memberikan panduan lokasi tangkapan ikan melalui aplikasi GPS berbasis teknologi. Implementasi sistem ini didukung oleh Tim Efektif yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 523/265.A/DISKAN.OKI/X/2024 tentang Pembentukan Tim Efektif Proyek Perubahan Dinas Perikanan Pada PKN II Angkatan XXXVII LAN RI BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan 2024.

Dengan adanya transformasi ini, pengelolaan layanan di TPI dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, dan transparan. Hal ini

memberikan manfaat besar, tidak hanya bagi nelayan yang mengakses layanan penerbitan SKAI, tetapi juga bagi Dinas Perikanan sebagai penyelenggara layanan yang kini memiliki alur kerja yang lebih terstruktur. Selain itu, penggunaan aplikasi GPS membantu nelayan dalam menentukan lokasi tangkapan ikan dengan akurasi yang lebih baik, sehingga dapat mengurangi waktu dan biaya operasional.

Sejalan dengan tujuan proyek perubahan, yaitu modernisasi tata kelola TPI berbasis teknologi, sistem ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan harapan *stakeholders*, termasuk nelayan, pemerintah daerah, dan sektor swasta. Dengan sistem digital *e*-SKAI, penerbitan SKAI dapat dilakukan secara lebih responsif dan akuntabel. Di sisi lain, aplikasi GPS memungkinkan penyedia informasi perikanan membuat keputusan yang lebih baik terkait pemanfaatan sumber daya ikan dan pengelolaan wilayah tangkapan.

Untuk memastikan keberhasilan tahap jangka menengah dan panjang, akan dilakukan penyediaan alokasi anggaran untuk keberlanjutan pengembangan e-skai dan penerapan aplikasi GPS area prediksi tangkap ikan. Sejumlah langkah penting telah dilaksanakan seperti MOU dengan Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah untuk memastikan keberlanjutan penerapan layanan informasi area tangkap ikan berbasis GPS.

Pada tahap jangka menengah, akan dilaksanakan beberapa langkah untuk memastikan keberhasilan implementasi layanan e-SKAI dan aplikasi GPS prediksi lokasi tangkapan ikan. Salah satu pencapaian utama yang akan dilaksanakan adalah penyediaan infrastruktur pendukung berupa perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan. Perangkat ini memungkinkan sistem GPS berfungsi optimal, memberikan informasi lokasi ikan secara akurat, dan mendukung kegiatan operasional nelayan. Selain itu, aplikasi GPS telah diimplementasikan dan dapat diakses oleh nelayan, membantu

mereka menghemat waktu dan biaya dalam proses penangkapan ikan.

Seiring dengan diimplementasikannya layanan ini, akan dilakukan pelatihan intensif kepada nelayan dan stakeholders. Pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang cara menggunakan sistem layanan e-SKAI dan layanan informasi area tangkap ikan berbasis GPS dengan efektif, serta memanfaatkan data prediksi lokasi ikan untuk meningkatkan produktivitas. Tidak hanya itu, sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha perikanan juga akan dilaksanakan. Bersamaan dengan langkah tersebut, dilakukan juga perluasan layanan *e*-SKAI di beberapa wilayah pesisir timur OKI dalam menunjuk kepala desa maupun kelembagaan masyarakat dan atau koperasi selaku *user* (pengguna) di aplikasi SKAI. Kedua langkah ini bertujuan untuk membangun kesadaran tentang manfaat teknologi digital dalam mendukung tata kelola perikanan yang lebih efisien.

Untuk memastikan bahwa sistem ini terus berkembang sesuai kebutuhan pengguna, akan dilaksanakannya umpan balik dari nelayan dan stakeholders. Umpan balik ini memberikan gambaran nyata mengenai pengalaman mereka dalam menggunakan sistem layanan e-SKAI dan layanan informasi area tangkap ikan berbasis GPS, serta menjadi dasar untuk evaluasi dan penyempurnaan layanan di kedepannya.

Untuk tahap jangka panjang, proyek perubahan ini akan terus dilanjutkan untuk memastikan keberlanjutan implementasi layanan e-SKAI dan layanan informasi area tangkap ikan berbasis GPS sebagai bagian dari transformasi tata kelola TPI di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dengan terus diterapkannya sistem berbasis teknologi ini, diharapkan dapat tercipta peningkatan signifikan dalam pendapatan dan kualitas hidup nelayan. Melalui efisiensi yang dihasilkan dari *e*-SKAI dalam proses penerbitan SKAI serta aplikasi GPS dalam memberikan panduan lokasi tangkapan ikan, diharapkan nelayan

mampu meningkatkan hasil tangkapan mereka sekaligus mengurangi biaya operasional.

Selain itu, dampak jangka panjang lainnya yang diharapkan adalah kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian lokal dan nasional. Dengan pengelolaan yang lebih modern dan berbasis data, sektor perikanan di Kabupaten Ogan Komering Ilir diharapkan mampu menarik minat investasi, memperluas peluang usaha, dan menciptakan lapangan kerja baru. Semua ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, memperkuat posisi sektor perikanan sebagai pilar utama perekonomian daerah.

3.6. PEMANFAATAN MATA PELATIHAN PILIHAN DALAM IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN

3.6.1. Kepemimpinan Digital

Kepemimpinan (*leadership*) merupakan elemen penting dalam manajemen, karena efektivitas manajemen hanya dapat dicapai jika seorang pemimpin mampu melaksanakan tugasnya secara kondusif, dinamis, dan adaptif terhadap perubahan. Manajemen sendiri adalah seni dalam menggerakkan orang lain untuk bekerja sesuai rencana dan prosedur organisasi guna mencapai tujuan bersama. Dalam konteks proyek perubahan ini, kepemimpinan yang efektif sangat diperlukan untuk memastikan implementasi layanan *e*-SKAI dan layanan informasi area tangkap ikan berbasis GPS berjalan sesuai rencana.

Seiring dengan memasuki era digital atau industri 4.0, di mana teknologi informasi dan komunikasi menjadi bagian integral dalam aktivitas organisasi, seluruh proses manajemen telah mengalami transformasi signifikan. Tata kelola yang sebelumnya bersifat manual kini beralih menjadi berbasis elektronik (eGovernance), yang menghadirkan rekayasa ulang dalam proses kerja organisasi, dikenal sebagai Business Process Engineering (BPE). Transformasi ini tidak hanya

meningkatkan efisiensi, tetapi juga menuntut pemimpin untuk mengadopsi pola pikir dan keterampilan yang selaras dengan perkembangan teknologi.

Dalam implementasi transformasi tata kelola TPI melalui *layanan e-SKAI dan layanan informasi area tangkap ikan berbasis GPS* , kepemimpinan digital memiliki peran strategis. Pemimpin proyek dituntut untuk memiliki kesadaran dan pola pikir digital (*digital awareness* dan *digital mindset*) untuk memahami teknologi yang diterapkan. Selain itu, kolaborasi dengan stakeholders menjadi kunci untuk memastikan keberhasilan implementasi. Pemimpin juga harus mampu mendorong inovasi, membangun komunikasi yang efektif, serta memiliki inisiatif dan prakarsa dalam mengatasi hambatan yang muncul selama proses perubahan.

Melalui pendekatan ini, pemimpin tidak hanya berperan sebagai penggerak perubahan tetapi juga sebagai penghubung antara teknologi dan sumber daya manusia, menciptakan keseimbangan antara kebutuhan organisasi dengan harapan para pengguna sistem, yaitu nelayan dan stakeholders lainnya.

3.6.2. Manajemen Strategis Sektor Publik

Dalam pelaksanaan proyek perubahan yang melibatkan banyak pihak, manajemen strategis sangat diperlukan untuk menciptakan kerja yang efektif dan efisien. Proyek perubahan terkait implementasi *layanan e-SKAI dan layanan informasi area tangkap ikan berbasis GPS* bertujuan mendukung tata kelola TPI yang lebih baik, sehingga penting untuk menyusun strategi jangka panjang yang berlandaskan analisis lingkungan internal dan eksternal. Analisis ini menjadi langkah awal dalam memahami dinamika organisasi dan lingkungan yang memengaruhi keberhasilan proyek.

Analisis lingkungan eksternal dilakukan untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan yang berasal dari luar

organisasi. Aspek yang dianalisis mencakup tren politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum, yang secara langsung atau tidak langsung memengaruhi pelaksanaan proyek. Selain itu, pemetaan pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, pelaku usaha perikanan, dan komunitas nelayan dilakukan untuk memahami kebutuhan serta kontribusi mereka terhadap proyek. Analisis ini membantu mengantisipasi hambatan eksternal yang dapat mengganggu implementasi proyek perubahan.

Di sisi lain, analisis lingkungan internal berfokus pada kekuatan dan kelemahan organisasi, termasuk kapasitas Dinas Perikanan dalam menjalankan proyek. Faktor seperti sumber daya manusia, program kerja, infrastruktur teknologi, serta citra organisasi menjadi aspek penting yang dievaluasi. Analisis ini menggunakan alat seperti SWOT untuk memastikan bahwa strategi yang dirumuskan relevan dengan kondisi internal organisasi dan mendukung pencapaian visi transformasi digital di sektor perikanan.

Setelah strategi dirumuskan berdasarkan analisis yang komprehensif, eksekusi strategi menjadi aspek yang sangat penting. Strategi implementasi *layanan e-SKAI dan layanan informasi area tangkap ikan berbasis GPS* dirancang agar mudah dipahami dan dilaksanakan oleh semua pihak terkait, mulai dari pegawai Dinas Perikanan hingga nelayan. Pendekatan yang jelas dan terukur digunakan untuk menghindari hambatan komunikasi dan memastikan bahwa strategi dapat diterjemahkan ke dalam tindakan nyata di lapangan.

Tidak semua strategi berjalan tanpa hambatan. Potensi kegagalan seperti kurangnya pemahaman tim terhadap visi proyek atau tidak adanya keterkaitan antara alokasi anggaran dan strategi dapat menjadi tantangan. Oleh karena itu, kegiatan

pemantauan dan evaluasi secara berkala dirancang sebagai perangkat organisasi untuk memastikan strategi tetap berjalan sesuai rencana. Dengan demikian, proyek perubahan ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat langsung kepada nelayan, tetapi juga menciptakan model tata kelola perikanan berbasis teknologi yang dapat diadopsi secara berkelanjutan.

3.6.3. Kemitraan Swasta dan Pemerintah

Dalam implementasi proyek perubahan yang melibatkan transformasi tata kelola berbasis teknologi, kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta atau *Public-Private Partnerships* (PPP) menjadi salah satu pendekatan strategis untuk memastikan keberlanjutan dan efisiensi pelaksanaan. Dalam konteks penerapan *layanan e-SKAI dan layanan informasi area tangkap ikan berbasis GPS* , kemitraan ini memungkinkan pembagian tanggung jawab, pendanaan, dan risiko antara Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir dan mitra swasta yang berperan sebagai penyedia teknologi atau penyedia layanan pendukung.

PPP bukanlah privatisasi. Dalam skema ini, aset tetap berada di bawah kendali pemerintah, sementara operasionalisasi sistem dikerjakan oleh mitra swasta sesuai perjanjian. Pemerintah tetap memegang kendali strategis atas kebijakan utama untuk menjamin manfaat proyek bagi masyarakat, terutama nelayan yang menjadi pengguna utama sistem.

Lingkup kerja sama dalam proyek ini melibatkan berbagai tahap, seperti desain, pengadaan perangkat, integrasi teknologi, serta pemeliharaan dan evaluasi sistem *layanan e-SKAI dan layanan informasi area tangkap ikan berbasis GPS* . Kemitraan ini juga memastikan bahwa aplikasi yang digunakan dapat dioperasikan secara optimal dan ditingkatkan secara berkala berdasarkan kebutuhan pengguna. Dalam

pelaksanaannya, pemerintah bertanggung jawab mengarahkan kebijakan dan menyediakan dukungan strategis, sementara mitra swasta mendukung dari sisi teknis dan pembiayaan.

Pendekatan PPP ini dirancang agar pihak swasta mendapatkan pengembalian investasi melalui mekanisme yang disepakati, seperti pembayaran berbasis ketersediaan layanan atau manfaat langsung yang diperoleh dari keberlanjutan aplikasi. Pemerintah dapat memberikan dukungan tambahan jika proyek memiliki manfaat tinggi bagi masyarakat tetapi menghadapi keterbatasan finansial.

Dalam implementasi skema ini, dibentuk struktur organisasi yang mendukung, seperti pembentukan tim teknis bersama antara pemerintah dan mitra swasta, untuk memastikan pengawasan, evaluasi, dan penyelesaian proyek sesuai target. Pendekatan ini memungkinkan kedua belah pihak berbagi tanggung jawab dalam mencapai tujuan transformasi tata kelola TPI yang berbasis teknologi, efisien, dan inklusif.

3.7. PEMBERDAYAAN ORGANISASI PEMBELAJAR

Keberhasilan Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam mencapai tujuan transformasi tata kelola TPI berbasis teknologi sangat bergantung pada dukungan semua pihak yang terlibat, baik dari internal organisasi maupun stakeholders eksternal. Pemberdayaan sumber daya manusia yang kompeten, ditambah dengan kepemimpinan yang berintegritas tinggi, menjadi kunci utama dalam mendukung pelaksanaan proyek perubahan. Kolaborasi yang efektif, baik dalam bentuk komunikasi maupun pembagian kerja yang terorganisir, merupakan fondasi penting untuk membangun tim kerja yang mampu memberikan kinerja optimal.

Kemampuan membangun jejaring kerja menjadi salah satu aspek penting dalam keberhasilan proyek ini. Pemimpin proyek harus

mampu menjalin hubungan kerja yang kuat, baik di dalam organisasi maupun dengan pihak eksternal, seperti nelayan, pelaku usaha, dan mitra swasta. Jejaring kerja ini memastikan tersedianya sumber daya, baik berupa dukungan teknis, finansial, maupun logistik, yang dibutuhkan untuk mengatasi tantangan kompleks selama proses implementasi. Dengan adanya jejaring kerja yang kokoh, organisasi dapat memperoleh umpan balik yang konstruktif serta dukungan berkelanjutan untuk memastikan tercapainya tujuan proyek.

Strategi komunikasi organisasi memainkan peran penting dalam memastikan keberhasilan koordinasi tim kerja. Komunikasi yang terencana dan terarah membantu menciptakan pertukaran informasi yang efektif di antara anggota tim dan stakeholders, sehingga setiap pihak memahami perannya dalam mencapai tujuan proyek. Strategi ini juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan menyampaikan pesan terkait manfaat implementasi layanan e-SKAI dan layanan informasi area tangkap ikan berbasis GPS , baik kepada nelayan, masyarakat, maupun stakeholders lainnya.

Melalui kolaborasi dan jejaring kerja yang kuat, strategi komunikasi yang efektif, serta dukungan dari berbagai pihak, pelaksanaan proyek perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan komitmen jejaring kerja, menyelesaikan proses implementasi sesuai jadwal, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat nelayan di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dengan pendekatan ini, transformasi tata kelola TPI dapat berjalan lancar, mendukung kesejahteraan nelayan, dan berkontribusi pada pertumbuhan sektor perikanan yang berkelanjutan.

Tabel 3.2. Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi SDM

Pihak Terdampak	**Kompetensi yang diperlukan**	**Pengembangan Kompetensi yang telah dilakukan**	**Metodologi (klasikal/non klasikal)**
1. *Project Leader*	Pengayaan pengembangan potensi diri	- Pembelajaran Materi PKN - Visitasi / Study Banding	Klasikal Non Klasikal

		- Pembelajaran Mandiri - Mentoring - Konsultasi / *Coaching*	
2. Tim Efektif	Pemahaman teknis penerapan sistem e-SKAI dan aplikasi berbasis teknologi informasi	- Pelatihan tentang Sistem e-SKAI bersama Dinas Kominfo - Pembelajaran Mandiri Panduan Sistem Informasi Digital	Non Klasikal
	Keterampilan penggunaan teknologi dan implementasi aplikasi area prediksi tangkap ikan berbasis GPS	- Studi Banding terkait Teknologi Aplikasi Berbasis GPS - Bimbingan teknis pemanfaatan GPS oleh Tim Teknis	Non Klasikal
	Kemampuan dalam menyusun kebijakan atau regulasi pendukung implementasi e-SKAI	- Penyusunan Regulasi dan SOP e-SKAI - Pembelajaran Mandiri peraturan pendukung kebijakan	Non Klasikal
	Manajemen proyek: merencanakan, mengorganisir, dan mengendalikan proyek e-SKAI	- Kolaborasi antar-tim efektif dalam pelaksanaan kegiatan e-SKAI - Pembagian tugas dalam rencana implementasi	Non Klasikal
	Keterampilan komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan terkait e-SKAI	- Kerjasama dengan Dinas Kominfo, Stakeholders, dan Staf Dinas Perikanan - Sosialisasi penerapan sistem e-SKAI	Non Klasikal
	Kemampuan pemantauan dan evaluasi	- Penyusunan laporan evaluasi	Non Klasikal

	dalam implementasi sistem e-SKAI	implementasi e-SKAI - Monitoring tahapan pengembangan proyek perubahan	

3.8. IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN POTENSI DIRI

Berdasarkan hasil koordinasi dan komunikasi dengan mentor dalam penyusunan rancangan proyek perubahan tentang transformasi tata kelola TPI berbasis teknologi, telah dilaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk mendukung implementasi *layanan e-SKAI dan layanan informasi area tangkap ikan berbasis GPS* . Adapun realisasi yang telah dicapai meliputi:

1. **Terbentuknya Tim Efektif Proyek Perubahan**: Tim ini bertugas memastikan kelancaran pelaksanaan sistem layanan e-SKAI dan layanan informasi area tangkap ikan berbasis GPS , dengan tanggung jawab yang jelas untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
2. **Terancangnya Sistem *e*-SKA**I: Sistem ini dirancang untuk mempercepat proses penerbitan SKAI, mengurangi waktu yang diperlukan, dan memastikan transparansi serta akurasi dalam penerbitan dokumen.
3. **Meningkatnya Efisiensi Proses Penerbitan e-SKAI**: Dengan penerapan sistem digital, waktu penerbitan SKAI berkurang signifikan, memberikan kemudahan bagi nelayan dan stakeholders lainnya.
4. **Terlaksananya Penerapan Aplikasi GPS Area Prediksi Tangkap Ikan**: Aplikasi ini membantu nelayan mengidentifikasi lokasi tangkapan ikan secara akurat, mengoptimalkan efisiensi operasional mereka.
5. **Terlaksananya Pelatihan dan Pembinaan**: Pelatihan dan pembinaan diberikan kepada pegawai Dinas Perikanan dan

nelayan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang sistem digital dan teknologi yang diterapkan.

6. **Terwujudnya Kesepahaman (MOU) dengan Stakeholders Terkait**: MOU ini menjadi landasan kolaborasi antara pemerintah daerah dan stakeholders dalam mendukung implementasi layanan e-SKAI dan layanan informasi area tangkap ikan berbasis GPS .

Bagian penting dalam implementasi proyek perubahan ini adalah bagaimana inovasi diterapkan dalam perencanaan pembangunan sektor perikanan. *Project leader* dituntut untuk mengatasi berbagai kendala, seperti kelembagaan, pendanaan, koordinasi, serta pengelolaan sumber daya manusia, yang menjadi elemen penting dalam implementasi kebijakan. Kendala-kendala tersebut dihadapi dengan bijak, terkoordinasi dengan baik, dan efisien, sehingga rencana strategis dalam proyek perubahan ini dapat terwujud dengan sukses.

Tantangan yang dihadirkan oleh era disrupsi digital saat ini menuntut *project leader* untuk mengadopsi pendekatan baru. Selain itu, tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang lebih cepat, efisien, dan berbasis teknologi semakin meningkat. Untuk itu, pemerintah daerah terus berinovasi melalui kebijakan dan pemanfaatan teknologi guna mengatasi tantangan tersebut. Inovasi menjadi cara efektif dalam mengatasi hambatan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk dalam mengelola sektor perikanan dengan memanfaatkan *layanan e-SKAI dan layanan informasi area tangkap ikan berbasis GPS* .

Pemerintah daerah perlu memangkas biaya dan menyederhanakan jalur birokrasi yang panjang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam pelayanan perikanan yang berbasis teknologi. Dalam hal ini, penerapan e-SKAI untuk percepatan penerbitan SKAI dan aplikasi GPS untuk prediksi lokasi tangkapan ikan diharapkan menjadi katalisator untuk

meningkatkan kualitas pelayanan dan mendukung Indeks Inovasi Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dengan inovasi ini, sektor perikanan dapat dikelola lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan nelayan serta meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi.

Membangun budaya inovasi di sektor perikanan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan menjadikan inovasi sebagai metode dalam menyelesaikan masalah yang ada. Dalam konteks *layanan e-SKAI dan layanan informasi area tangkap ikan berbasis GPS* yang diterapkan pada proyek ini, inovasi menjadi cara untuk mengatasi tantangan yang terkait dengan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan penerbitan SKAI yang masih berbasis manual.

Kegiatan seperti kompetisi inovasi daerah dan pemberian insentif kepada pelaku inovasi menjadi langkah strategis untuk mendorong dan membudayakan inovasi dalam pemerintahan daerah. Penerapan sistem *e*-SKAI yang berbasis teknologi digital dan penggunaan aplikasi GPS sebagai bagian dari inovasi ini sangat penting dalam mempercepat dan menyederhanakan proses administrasi di sektor perikanan. Upaya ini juga sejalan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir yang mendorong pengembangan inovasi di bidang pemerintahan.

Peluang peningkatan Indeks Inovasi Daerah dari pemerintah pusat terus mendorong pemerintah daerah untuk berinovasi melalui pengukuran dan penilaian Indeks Inovasi Daerah yang dilakukan setiap tahunnya. Proyek perubahan ini berkontribusi terhadap peningkatan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kinerja sektor perikanan dan pelayanan publik.

Upaya-upaya ini diharapkan tidak hanya dapat mendongkrak Indeks Inovasi Daerah, tetapi juga dapat meningkatkan capaian inovasi nasional yang berdaya saing global, seiring dengan penerapan *layanan e-SKAI dan layanan informasi area tangkap ikan berbasis*

GPS sebagai inovasi yang mendukung sektor perikanan yang lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Menyadari bahwa proyek perubahan ini berpengaruh pada Indeks Daya Saing Daerah, tantangan yang akan muncul dalam implementasinya perlu diidentifikasi dan diantisipasi. Pendanaan untuk implementasi proyek ini disikapi dengan melakukan *sharing budget* melalui kegiatan yang sudah ada dalam organisasi, guna mendukung pencapaian proyek layanan e-SKAI dan layanan informasi area tangkap ikan berbasis GPS . Hal ini diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran tanpa mengganggu anggaran operasional lainnya.

Kurangnya kapasitas SDM internal dalam menjalankan proyek ini menjadi salah satu kendala yang perlu diatasi. Untuk mengatasinya, kerjasama dengan *stakeholders* terkait dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas SDM yang bertanggung jawab atas *layanan e-SKAI dan layanan informasi area tangkap ikan berbasis GPS* . Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat proses implementasi dan penguatan kapasitas teknis dalam menggunakan sistem digital di sektor perikanan. Sementara itu, kegiatan atau program rutin tetap harus berjalan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Dengan upaya yang telah dilaksanakan, proyek perubahan ini berkontribusi pada pengembangan diri *project leader* dan tim efektif, yang merupakan bagian dari organisasi. Melalui peningkatan kapasitas dalam penerapan *layanan e-SKAI dan layanan informasi area tangkap ikan berbasis GPS* , kinerja organisasi juga akan semakin berkembang.

Komponen-komponen penilaian untuk peserta pelatihan, seperti integritas, kerjasama, dan kemampuan mengelola perubahan, telah dievaluasi melalui *self-assessment* dan penilaian dari mentor. Setelah implementasi proyek pada milestone jangka pendek, didapatkan peningkatan nilai akhir sikap perilaku dengan kualifikasi “Baik”. Hal ini

mencerminkan perkembangan signifikan dalam kepemimpinan dan kerja tim dalam mengelola transformasi digital sektor perikanan.

Rekomendasi dari mentor untuk menciptakan organisasi yang sukses adalah dengan terus merealisasikan ide-ide dan gagasan pembaruan. Ke depannya, penting untuk menjalankan kegiatan yang dapat meningkatkan pengelolaan perubahan dalam organisasi, pengembangan diri, dan pengembangan orang lain. Dengan langkah ini, organisasi diharapkan dapat menjadi organisasi pembelajar yang adaptif dan agile, mampu menanggapi perubahan dengan cepat, serta terus mendorong inovasi untuk kesejahteraan masyarakat nelayan dan kemajuan sektor perikanan.

REKAP NILAI AKHIR SIKAP PERILAKU PESERTA

Nama Peserta	: H. UBAIDILAH, SKM, MKM	Nama Mentor	: M. REFLY, S.Sos., M.M
NIP	: 197010051995021000	NIP:	: 196903091998101000
Jabatan	: KEPALA DINAS	Jabatan	: PJ. SEKRETARIS DAERAH
Instansi	: DINAS PERIKANAN OKI	Instansi	: SEKRETARIAT DAERAH OKI
Program	: PKN TK II ANGK XXXVII TAHUN 2024		

	Nilai Komponen				
	Sub Komponen Integritas	Sub Komponen Kerjasama	Sub Komponen Mengelola Perubahan	Rata-Rata Total Sub Komponen	Kualifikasi Total Sub
Peserta	9.08	9.00	9.00	9.03	Istimewa
Mentor	8.92	9.10	9.00	9.01	Istimewa
Nilai Rata-Rata Per Sub Komponen	8,97	9,07	9,00	9,01	Istimewa
Kualifikasi Per Sub Komponen	Baik	Istimewa	Istimewa	Istimewa	

Keterangan Kualifikasi

9.00-10	Istimewa
7-8.99	Baik
5-6.99	Cukup
3-4.99	Kurang
1-2.99	Sangat Kurang

Akhir Sikap Perilaku
9,01
Kualifikasi: Istimewa

REKAP NILAI AKHIR SIKAP PERILAKU PESERTA

Nama Peserta	: H. UBAIDILAH, SKM, MKM	Nama Mentor	: M. REFLY, S.Sos., M.M
NIP	: 197010051995021000	NIP:	: 196903091998101000
Jabatan	: KEPALA DINAS	Jabatan	: PJ. SEKRETARIS DAERAH
Instansi	: DINAS PERIKANAN OKI	Instansi	: SEKRETARIAT DAERAH OKI
Program	: PKN TK II ANGK XXXVII TAHUN 2024		

	Nilai Komponen				
	Sub Komponen Integritas	Sub Komponen Kerjasama	Sub Komponen Mengelola Perubahan	Rata-Rata Total Sub Komponen	Kualifikasi Total Sub
Peserta	9,08	9,00	9,00	9,03	Istimewa
Mentor	9,42	9,30	9,40	9,37	Istimewa
Nilai Rata-Rata Per Sub Komponen	9,32	9,21	9,28	9,27	Istimewa
Kualifikasi Per Sub Komponen	Istimewa	Istimewa	Istimewa	Istimewa	

Keterangan Kualifikasi

9.00-10	Istimewa
7-8.99	Baik
5-6.99	Cukup
3-4.99	Kurang
1-2.99	Sangat Kurang

Akhir Sikap Perilaku
9,27
Kualifikasi: Istimewa

Gambar 3.15. Hasil Pemetaan Potensi Diri Sebelum (Kiri) dan Sesudah (Kanan)

BAB IV

PENUTUP

4.1. LESSON LEARNT

Manfaat pembelajaran kepada saya sebagai *Project Leader* dari Implementasi Proyek Perubahan ini antara lain :

1. Proyek perubahan ini mengajarkan bahwa keberhasilan dalam mengelola transformasi digital seperti *e*-SKAI dan aplikasi GPS sangat bergantung pada kemampuan seorang *project leader* untuk memimpin dengan adaptif, responsif, dan inovatif. Dalam menghadapi tantangan era disrupsi, seorang pemimpin harus memiliki visi yang jelas, mampu berkolaborasi, dan berani mengambil keputusan strategis untuk memastikan implementasi berjalan efektif.
2. Proses perencanaan dan implementasi proyek menegaskan pentingnya melakukan analisis internal dan eksternal untuk memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (SWOT). Pelajaran ini membantu penulis menyadari bahwa setiap proyek perlu didukung oleh data dan strategi yang matang untuk mengurangi risiko kegagalan.
3. Kesuksesan proyek ini menunjukkan bahwa kerjasama antar-*stakeholders*, baik dari internal organisasi maupun eksternal seperti pemerintah pusat, swasta, dan masyarakat, adalah elemen penting. Keterlibatan semua pihak menciptakan sinergi yang mendukung keberlanjutan proyek.
4. Implementasi *e*-SKAI dan aplikasi GPS memberikan wawasan bahwa teknologi bukan hanya alat, tetapi solusi strategis untuk menyelesaikan masalah, meningkatkan efisiensi, dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih baik. Teknologi ini juga memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.
5. Kendala seperti keterbatasan pendanaan, kapasitas sumber daya manusia, serta adaptasi teknologi, mengajarkan penulis

untuk lebih kreatif dan fleksibel dalam mencari solusi. Strategi seperti *sharing budget*, pelatihan SDM, dan kerjasama dengan tenaga ahli menjadi pelajaran penting dalam mengatasi hambatan.

6. Melalui *self-assessment* dan umpan balik mentor, penulis belajar pentingnya refleksi diri untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Proses ini memungkinkan penulis untuk terus berkembang, baik secara pribadi maupun profesional, sekaligus mendorong pengembangan tim efektif di organisasi.
7. Proyek ini menunjukkan bahwa inovasi harus menjadi budaya dalam organisasi. Inovasi tidak hanya membantu menyelesaikan masalah tetapi juga mendorong organisasi menjadi lebih adaptif dan agile, sehingga dapat merespons perubahan dengan cepat.
8. Salah satu pelajaran terbesar adalah menyadari dampak positif yang dapat diberikan oleh proyek ini, seperti meningkatkan kesejahteraan nelayan, mempercepat layanan, dan mendorong tata kelola perikanan yang lebih modern. Proyek ini menjadi contoh bagaimana inovasi dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

4.2. KESIMPULAN

Proyek perubahan ini merupakan langkah strategis untuk mentransformasi tata kelola Tempat Pelelangan Ikan (TPI) berbasis teknologi melalui implementasi e-SKAI dan aplikasi GPS. Sistem ini dirancang untuk mempercepat proses penerbitan SKAI, meningkatkan efisiensi operasional nelayan, serta mendukung pengelolaan TPI yang lebih modern, transparan, dan akuntabel.

Proyek ini berhasil mengintegrasikan teknologi dengan kebutuhan masyarakat nelayan, mengatasi tantangan operasional, serta mendorong kolaborasi lintas sektor. Realisasi kegiatan seperti pembentukan tim efektif, pelatihan pegawai dan masyarakat, penerapan aplikasi GPS, serta terwujudnya MOU dengan stakeholders menunjukkan bahwa inovasi ini memiliki dampak nyata

terhadap tata kelola sektor perikanan di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Pelaksanaan proyek juga memberikan pelajaran berharga bagi project leader dan tim efektif dalam mengembangkan potensi diri, membangun jejaring kerja, serta meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial. Evaluasi terhadap milestone jangka pendek menunjukkan bahwa implementasi ini memberikan manfaat signifikan bagi organisasi, masyarakat, dan pemerintah daerah, baik dari segi efisiensi pelayanan maupun peningkatan kesejahteraan nelayan.

Sebagai kesimpulan, proyek perubahan ini membuktikan bahwa inovasi dan kolaborasi adalah kunci keberhasilan dalam mewujudkan tata kelola perikanan yang responsif dan berdaya saing, dengan manfaat nyata bagi masyarakat nelayan di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

4.3. SARAN

Implementasi Proyek Perubahan Tata Kelola TPI Berbasis Teknologi melalui Strategi e-SKAI dan Aplikasi GPS merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi pelayanan sektor perikanan dan kesejahteraan nelayan. Proyek ini dirancang untuk mendukung modernisasi tata kelola melalui penerapan sistem digital yang transparan, efisien, dan terintegrasi. Tahapan selanjutnya dari proyek perubahan ini sangat menentukan keberhasilan ke depan, sehingga saran-saran yang dapat disampaikan adalah:

1. Pelatihan dan pembinaan yang telah dilaksanakan perlu diperluas cakupannya untuk meningkatkan pemahaman pegawai dan masyarakat nelayan dalam memanfaatkan teknologi e-SKAI dan aplikasi GPS. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap pelatihan ini untuk memastikan bahwa peserta mampu mengoperasikan sistem secara mandiri dan optimal.
2. Teknologi e-SKAI dan aplikasi GPS perlu terus disempurnakan berdasarkan masukan dari pengguna, baik pegawai maupun

nelayan. Umpan balik ini dapat digunakan untuk mengoptimalkan fitur, meningkatkan kemudahan penggunaan (*user-friendly*), serta memastikan keandalan sistem dalam berbagai kondisi lapangan.

3. Perjanjian kerja sama (MOU) yang telah terjalin perlu diikuti dengan tindakan nyata berupa kegiatan bersama, seperti monitoring implementasi, program pendukung operasional, dan evaluasi dampak proyek. Kolaborasi yang erat antara pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat akan memastikan keberlanjutan proyek.
4. Untuk mengatasi tantangan pendanaan, pemerintah daerah dapat mengembangkan model pembiayaan alternatif, seperti mengajukan dukungan program pemerintah pusat atau mengundang investasi sektor swasta yang tertarik pada pengembangan teknologi perikanan.
5. Proyek perubahan ini memerlukan sistem pemantauan dan evaluasi yang terstruktur untuk mengukur pencapaian target pada setiap tahapan. Monitoring berkala dapat membantu mengidentifikasi kendala lebih dini dan memberikan solusi tepat waktu untuk menjaga keberhasilan implementasi.
6. Agar manfaat sistem e-SKAI dan aplikasi GPS dirasakan secara maksimal, sosialisasi kepada masyarakat nelayan perlu terus dilakukan, terutama untuk mereka yang belum terbiasa dengan teknologi. Pendekatan berbasis komunitas dapat digunakan untuk menjangkau lebih banyak nelayan secara langsung.
7. Semua tahapan proyek perubahan, mulai dari perencanaan hingga implementasi dan evaluasi, perlu didokumentasikan dengan baik. Dokumentasi ini dapat digunakan sebagai acuan untuk mengembangkan proyek serupa di sektor atau daerah lain.
8. Perlu diperkuat integrasi data dari sistem e-SKAI dengan database lainnya di tingkat pemerintah daerah. Hal ini akan

membantu pengambilan keputusan berbasis data yang lebih akurat untuk kebijakan di sektor perikanan.

9. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa inovasi tidak berhenti pada implementasi awal. Budaya inovasi harus terus dikembangkan di organisasi dengan mendorong setiap unit untuk berkontribusi pada penyempurnaan sistem, sehingga mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

LAMPIRAN

MODUL PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL (PTO) APLIKASI SURAT KETERANGAN HASIL IKAN SECARA ELEKTRONIK (E-SKAI)

e-SKAI

Aplikasi Surat Keterangan Asal Ikan Secara Elektronik

DINAS PERIKANAN

KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

ABSTRACT

Modul ini adalah panduan teknik penggunaan Aplikasi Surat Keterangan Hasil Ikan Secara Elektronik (E-SKAI)

Dibuat

Layanan E-Government – Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir

1. Pendahuluan

Aplikasi E-SKAI adalah platform digital yang digunakan untuk mengelola penerbitan Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI). Aplikasi ini memudahkan pelaku usaha perikanan & Pemangku kepentingan dalam mengajukan permohonan dan memonitor status SKAI secara online.

2. Persyaratan Teknis

Untuk mengakses aplikasi E-SKAI, pastikan perangkat Anda memenuhi persyaratan berikut:

- **Perangkat:** Komputer atau smartphone.
- **Browser:** Google Chrome, Mozilla Firefox, atau browser modern lainnya.
- **Koneksi Internet:** Stabil dan cepat.

3. Akses Aplikasi

1. Buka browser dan akses URL aplikasi E-SKAI. https://e-skai.kaboki.go.id
2. Masukkan **username** dan **password**, lalu klik tombol **Masuk**.

Catatan: Jika belum memiliki akun, lakukan pendaftaran sesuai prosedur yang berlaku.

4. Fitur Utama

4.1. Dashboard

Menampilkan ringkasan status permohonan, statistik penerbitan SKAI, dan lain lain.

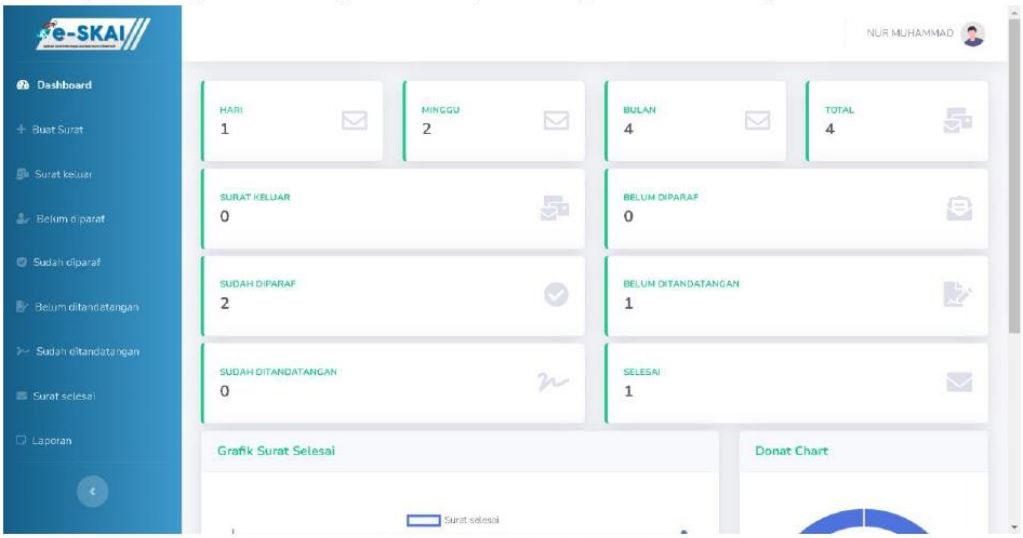

Halaman dashboard

4.2. Pengajuan SKAI

1. Klik menu **Buat Suat**.
   Kemudian scroll kebawah klik Tombol Mulai Buat Surat

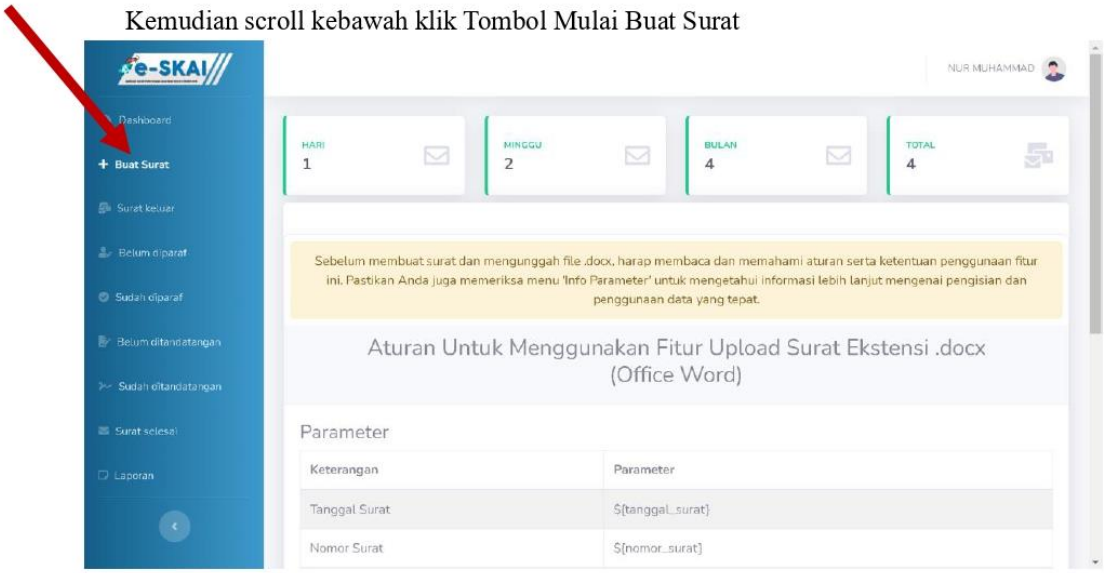

Klik Menu Buat Surat

Tombol Mulai Buat Surat

2. Isi formulir yang mencakup:
    - Data Nomor Surat
    - Lampiran
    - Hal
    - Tanggal
    - Pilih tujuan Pemaraf & Pendandatangan surat
    - Dokumen Pendukung (Upload file)
3. Klik **Buat Surat** untuk mengajukan permohonan. Maka akan tampil seperti berikut:

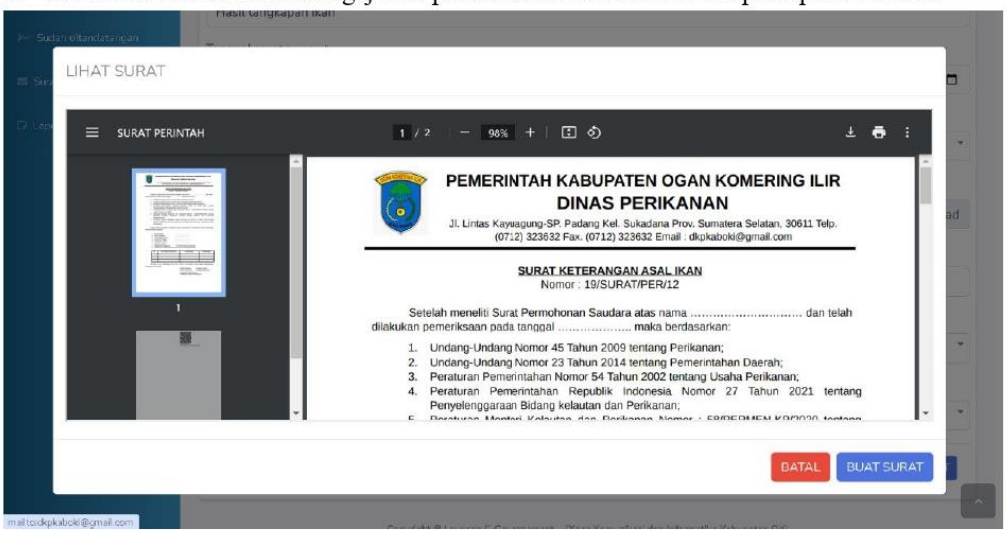

Tampilan surat

4.3. Pemarafan Surat

1. Akses akun pemaraf (Login) dengan akun dengan memasukan NIP & Password.
2. Klik menu pemaraf kemudian klik tombol belum diparaf:

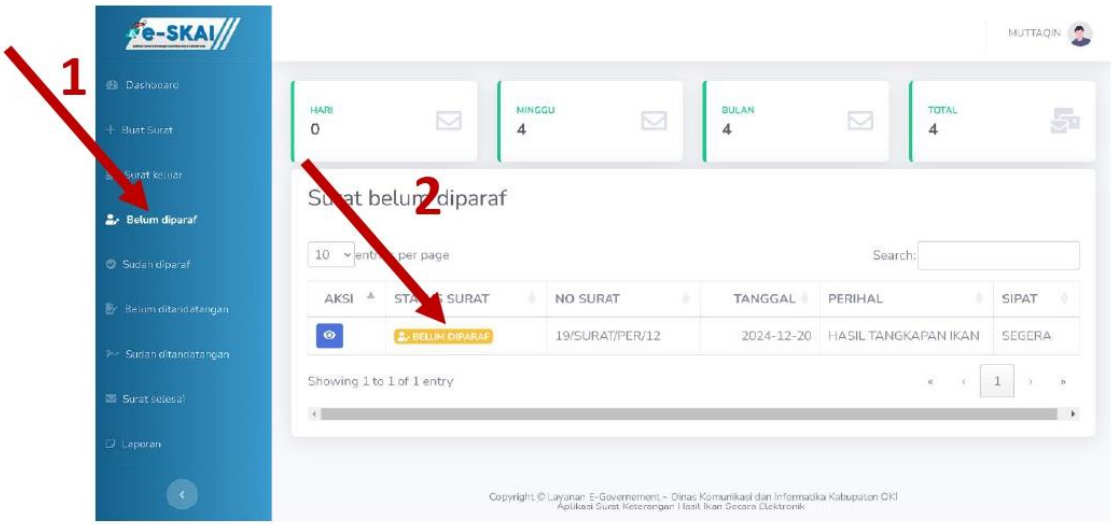

3. Scoll kebawah dan temukan inputan sudah diparaf setelah selesai klik tombol paraf surat

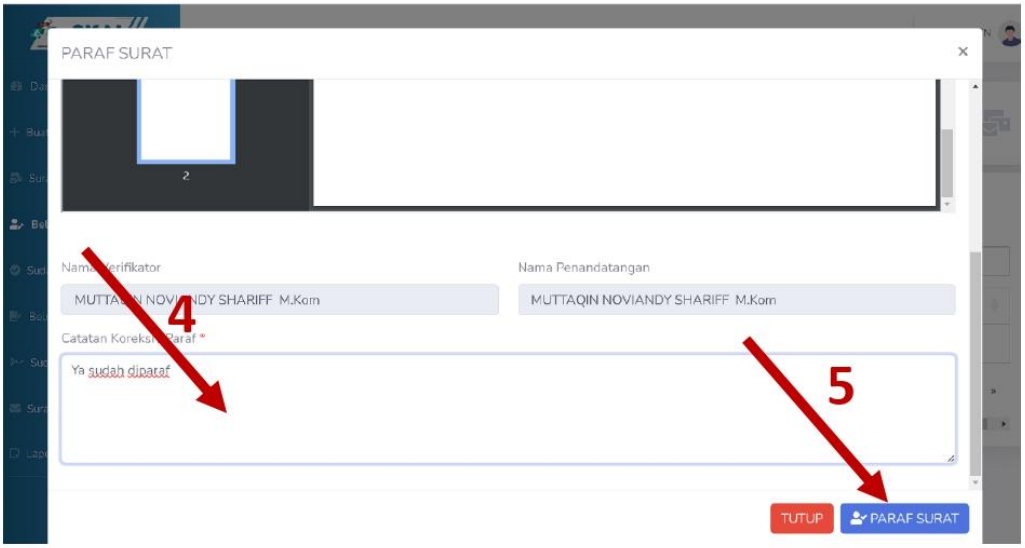

4.4. Penandatanganan surat

1. Klik menu belum ditandatangan
2. Pilih surat yang ingin ditandatangan dan klik tombol tandatangai
3. Masukan passprase kemudian klik tombol tandatangani surat

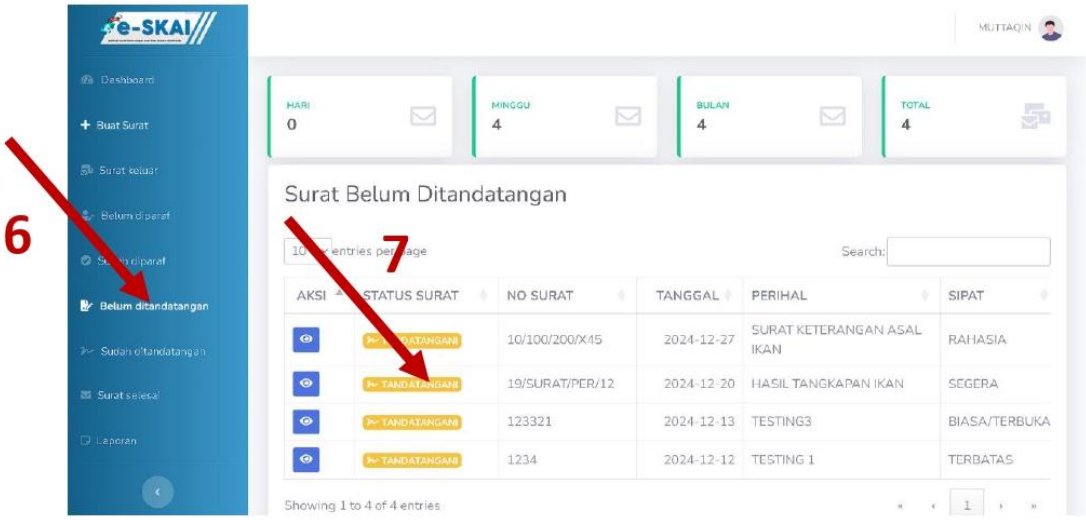

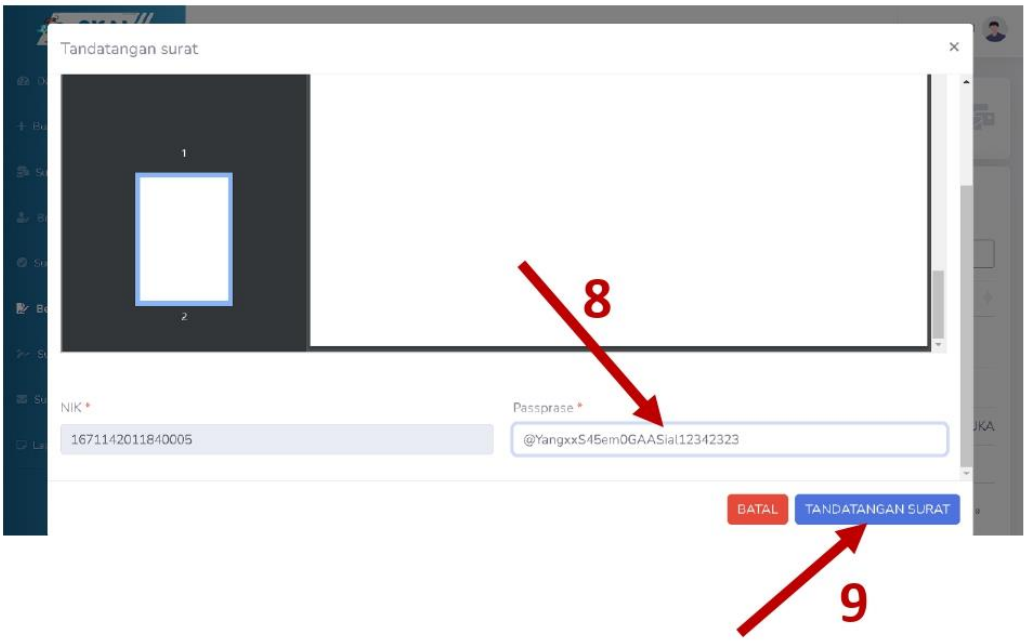

4. Setelah ditandatangan surat selesai dan akan masuk ke akun si pembuat surat

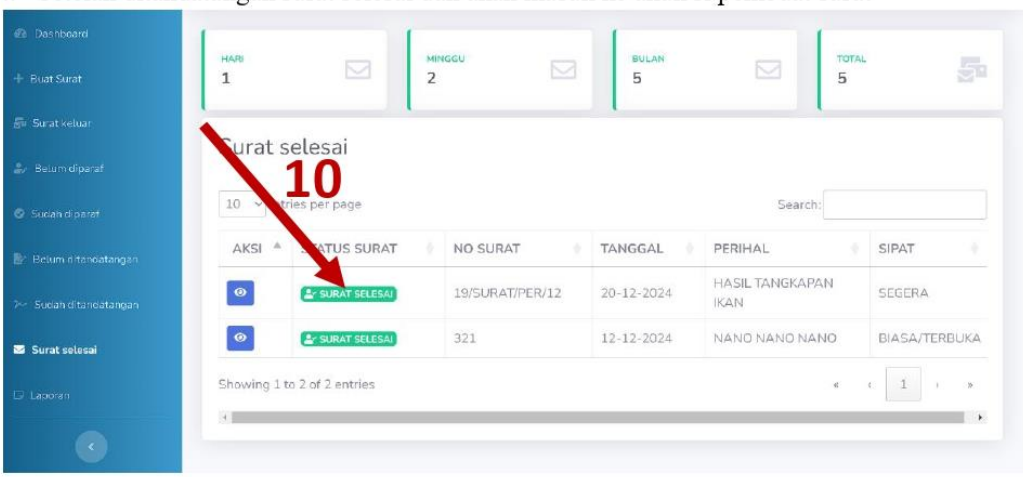

4.5. Unduh Laporan SKAI

1. Setelah langkah pemarafan dan penandatanganan selesai maka laporan bisa di download, akses akun si pembuat surat klik menu laporan.
2. Klik rentang tanggal kemudian klik tombol **EXPORT DATA** untuk download dokumen dalam format EXCEL.

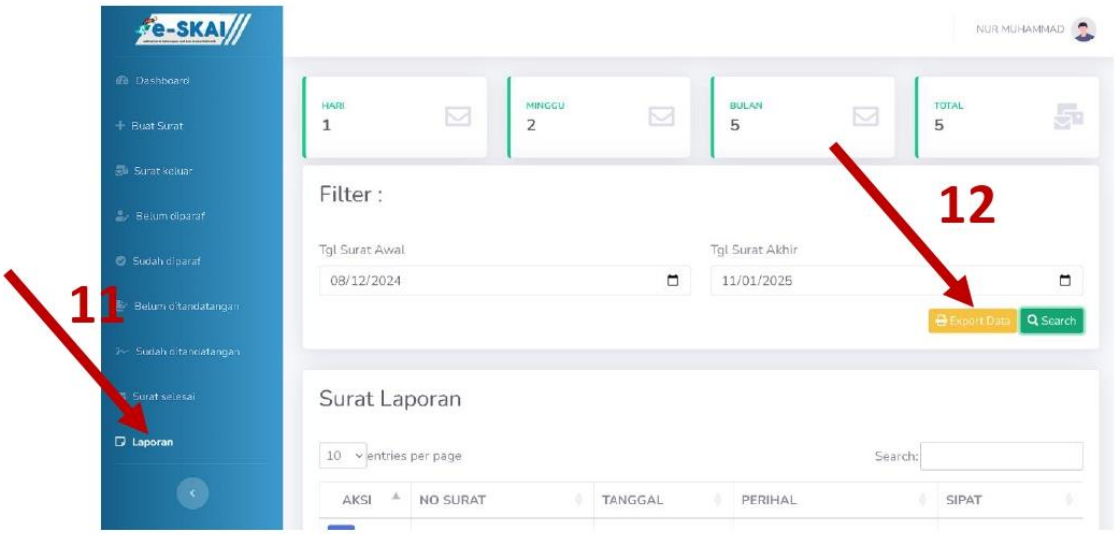

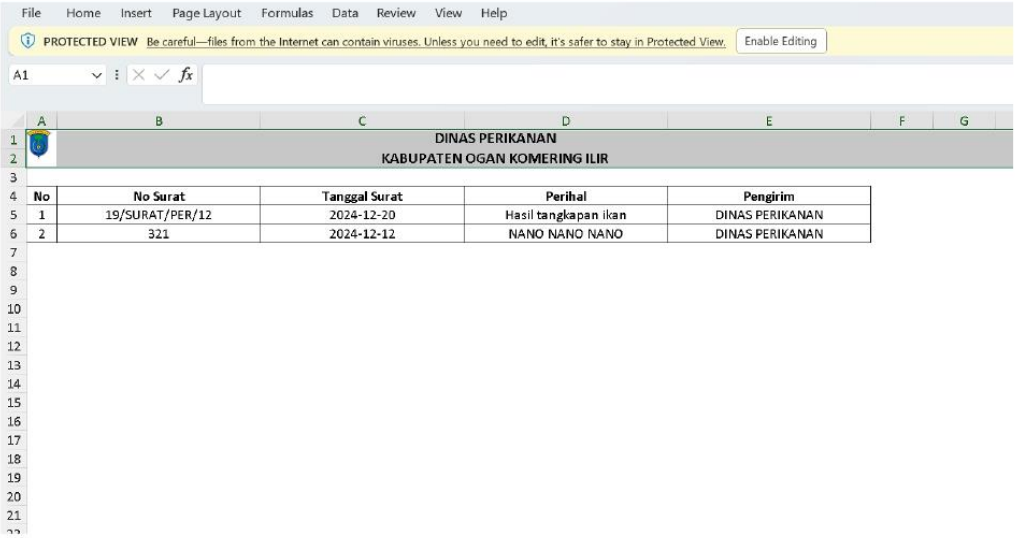

No	No Surat	Tanggal Surat	Perihal	Pengirim
1	19/SURAT/PER/12	2024-12-20	Hasil tangkapan ikan	DINAS PERIKANAN
2	321	2024-12-12	NANO NANO NANO	DINAS PERIKANAN

5. Tips Keamanan

1. Jangan membagikan password / passprase tte kepada siapapun.
2. Selalu logout setelah selesai menggunakan aplikasi.
3. Gunakan perangkat pribadi untuk mengakses aplikasi.

6. Penutup

Dengan mengikuti panduan ini, Pengguna dapat memanfaatkan aplikasi E-SKAI dengan optimal. Pastikan data yang diinput benar untuk memperlancar proses pengajuan SKAI. Selamat menggunakan aplikasi E-SKAI!

Terimah kasih.

MEMBANGUN TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN

1. Notulen Rapat

NOTULEN HASIL RAPAT
Tanggal 07 Oktober 2024

1. Pimpinan Rapat : Pelaksana Projec Leader (Bpk. H. Ubaidillah, S.K.M.,M.K.M).
2. Peserta Rapat : Absensi Terlampir
3. Waktu dan Tepat : Rapat dilaksanakan di Ruang Rapat Dinas Perikanan Kab. OKI Pada Pukul 09-00 – Selesai WIB.
4. Acara Rapat : Rapat Tim Efektif
5. Jalannya Rapat :
   - Rapat dibuka Oleh Pimpinan Rapat
   - Pengarahan dan Pembahasan Materi
   - Diskusi Peserta Rapat.
6. Pembahasan Rapat :
   - Proyek Perubahan Transpormasi Tata Kelola Tempat Pelelangan Ikan Sungai Lumpur Berbasis Teknologi pada Dinas Perikanan kabupaten Ogan Komering Ilir
   - Arahan tugas dan fungsi Tim Efektif aksi proyek perubahan

Demikian notulen hasil rapat ini dbuat untuk dilaksanakan oleh semua yang terkait dan peserta rapat.

Kayuagung, 07 Oktober 2024

Pemimpin Rapat
Projec Leader

H. Ubaidilah, S.K.M, M.K.M
Nip. 197010051995021001

Notulen Rapat
Tim Efektif

Zaizala Akbar, S.Pi

2. SK Tim Efektif

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
SEKRETARIS DAERAH
Alamat : Jl. Letjen Yusuf Singadekane No.1, Kayuagung, 30618
Telp. (0712) 321022 Faks : (0712) 321701 Email : sekda@kaboki.go.id, Website : www.kaboki.go.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2024

NOMOR : 523/265.A/DISKAN.OKI/X/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN DINAS PERIKANAN PADA PKN II ANGKATAN XXXVII LAN RI BPSDMD PROVINSI SUMATERA SELATAN 2024

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Menimbang :
a. bahwa pendidikan dan pelatihan kepemimpinan bagi para pejabat yang akan dan/atau telah menduduki jabatan struktural eselon III di seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah ditujukan untuk membentuk sosok pemimpin birokrasi yang memiliki kemampuan yang tinggi dalam menjabarkan visi dan misi instansi ke dalam program instansi serta memimpin pelaksanaannya;
b. bahwa untuk maksud sebagaimana pada butir (a) peserta pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat II diwajibkan untuk melaksanakan proyek perubahan sesuai dengan bidang pekerjaannya dan didukung oleh tim efektif.

Mengingat :
a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
b. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
c. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

e. Peraturan Kepala . . .

e. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 19 Tahun 2015 tentang pedoman penyelengaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan Tingkat III (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1222);

f. Surat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 890/3459/BPSDMD/V/2024 tanggal 23 Agustus 2024 Perihal Persiapan Pemanggilan Calon Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXXVII Tahun 2024 Di BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Tim Efektif Proyek Perubahan Dinas Perikanan Pada PKN II Angkatan XXXVII LAN RI BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan 2024.

KESATU : Membentuk Tim Efektif Proyek Perubahan Dinas Perikanan Pada PKN II Angkatan XXXVII LAN RI BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan 2024;

KEDUA : Dalam melaksanakan proyek perubahan ini tetap dalam pengawasan dan didampingi Mentor/atasan langsung peserta Pelatihan;

KETIGA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kekurangan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kayuagung
Pada tanggal 01 Oktober 2024

Pj. Sekretaris Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ilir

M. Refly MS, S.Sos., M.M.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2024
NOMOR : 523/265.A/DISKAN.OKI/IX/2024

Mentor : M. Refly, S.Sos., M.M

Pelaksana (*Project Leader*) : Ubaidilah, S.K.M., M.K.M

Anggota Tim :

a. Tim Administrasi
1. Syawal Harahap, S.Sos., M.Si
2. Romadanu, S.Pi
3. Zaizala Akbar, S.Pi
4. Tedi Irawan, S.Pi

b. Tim Teknis
1. Romico Iswandy,S.St.Pi., M.Si
2. Deon Dwi Cahyo, S.Pi
3. Ferly Apriyanto, S.Pi
4. Pretty Mayang Septika, S.Pi
5. Kasno, A.Md
6. Arpin Kusuma, A.Md
7. Saadi

c. Tim IT
1. Diana Septa Masari, S.H
2. Gabriansyah Yusuf Pratama, S.Pi
3. Bayu Iswahyudi, S. P
4. Andi Ayazidi Argo, S.Pi

Ditetapkan di Kayuagung
Pada tanggal 01 Oktober 2024

Pj. Sekretaris Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ilir

M. Refly MS, S.Sos., M.M.

3. Undangan

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PERIKANAN
Jl. Kayuagung-SP Padang Sukadana Kecamatan Kayuagung Telp. (0712) 321279, Fax (0712) 321279, 323632
email. dpkaboki@gmail.com Kayuagung 30651

Kayuagung, 06 Oktober 2024

Nomor : 900/ /Diskan/2024
Sifat : -
Lampiran : 01 (Satu) Berkas
Perihal : Rapat Tim Efektif

Yth. Bapak Sekda OKI
Selaku Mentor PIM PKN II
di –
Tempat

Sehubungan dengan Diklat Pim PKN II tetang Proyek Perubahan Transpormasi Tata Kelola Tempat Pelelangan Ikan Sungai Lumpur Berbasis Teknologi pada Dinas Perikanan kabupaten Ogan Komering Ilir maka kami mengharapkan kesediaan bapak/Ibu dan saudara/i untuk menghadiri acara rapat tersebut pada :

Hari : Senin
Tanggal : 07 Oktober 2024
Pukul : 09.30 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir

Demikian Undangan ini kami sampaikan, besar harapan kami agar Bapak/ibu dan Saudara/i dapat menghadiri acara tersebut. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Projec Leader

H. Ubaidillah, S.K.M,. M.K.M
Pembina Tingkat.I/IV.b
NIP. 197010051995021001

4. Dokumentasi

5. Absensi Rapat

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PERIKANAN
Jl. Kayuagung - SP.Padang Komplek Pasar Benih No... Kel. Sukadana Kayuagung , 30611
Telp. (0712) 321279,323632 Fax (0712) 321279,323632 Email: dkpkaboki@gmail.com

DAFTAR HADIR PERTEMUAN RAPAT

Hari : Senin
Tanggal : 07 Oktober 2024
Waktu : 09.30 s/d Selesai
Tempat : Dinas Perikanan

NO	NAMA	JABATAN/PANGKAT	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
1	M. Refly, S. Sos., M.M	Mentor	1.	
2	H. Ubaidilah, S.K.M., M.K.M	Pelaksana (Project Leader)	2.	
3	Syawal Harahap, S.Sos., M.Si	Tim Administrasi	3.	
4	Romadanu, S.Pi	Tim Administrasi	4.	
5	Zaizala Akbar, S.Pi	Tim Administrasi	5.	
6	Tedi Irawan, S.Pi	Tim Administrasi	6.	
7	Romico Iswandy, S.St.Pi., M.Si	Tim Teknis	7.	
8	Deon Dwi Cahyo, S.Pi	Tim Teknis	8.	
9	Ferly Apriyanto, S.Pi	Tim Teknis	9.	
10	Pretty Mayang Septika, S.Pi	Tim Teknis	10.	
11	Kasno, Amd	Tim Teknis	11.	
12	Arpin Kusuma, A.Md	Tim Teknis	12.	
13	Saadi	Tim Teknis	13.	
14	Diana Septa Masari, S.H	Tim IT	14.	
15	Gabriansyah Yusuf Pratama, S.Pi	Tim IT	15.	
16	Bayu Iswahyudi, SP	Tim IT	16.	
17	Andi Ayazidi Argo, S.Pi	Tim IT	17.	

Kayuagung, 07 Oktober 2024

Projec Leader

H. Ubaidilah, S.K.M, M.K.M
Penata Tingkat I / IV.b
Nip. 197010051995021001

MERANCANG SYSTEM E-SKAI YANG MEMPERCEPAT PROSES PENERBITAN SKAI

1. Koordinasi dengan Kominfo

2. Aplikasi e-SKAI

MENINGKATKAN EFISIENSI PROSES PENERBITAN E-SKAI DAN PENERAPAN APLIKASI GPS AREA PREDIKSI TANGKAP IKAN

1. Dokumentasi

PELATIHAN DAN PEMBINAAN TENTANG SYSTEM DIGITAL DAN TEKNOLOGI YANG DITERAPKAN

1. Undangan

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PERIKANAN
Jl. Kayuagung-SP Padang Sukadana Kecamatan Kayuagung Telp. (0712) 321279, Fax (0712) 321279, 323632
email. dpkaboki@gmail.com Kayuagung 30651

Kayuagung, November 2024

Nomor : 900/ /Diskan/2024
Sifat : -
Lampiran : 01 (Satu) Berkas
Perihal : Rapat Sosialisasi SKAI

Yth. Bapak Sekda OKI
Selaku Mentor Pim PKN II
di –
Tempat

Sehubungan dengan Diklat Pim PKN II tetang Proyek Perubahan Transpormasi Tata Kelola Tempat Pelelangan Ikan Sungai Lumpur Berbasis Teknologi pada Dinas Perikanan kabupaten Ogan Komering Ilir maka kami mengharapkan kesediaan bapak/Ibu dan saudara/i untuk menghadiri acara rapat tersebut pada :

Hari : **Senin**
Tanggal : **November 2024**
Pukul : **09.30 WIB s/d Selesai**
Tempat : **Ruang Rapat Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir**

Demikian Undangan ini kami sampaikan, besar harapan kami agar Bapak/ibu dan Saudara/i dapat menghadiri acara tersebut. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Projec Leader

H. Ubaidillah, S.K.M,. M.K.M
Pembina Tingkat.I/IV.b
NIP. 197010051995021001

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PERIKANAN
Jl. Kayuagung-SP Padang Sukadana Kecamatan Kayuagung Telp. (0712) 321279, Fax (0712) 321279, 323632
email. dpkaboki@gmail.com Kayuagung 30651

Kayuagung, November 2024

Nomor : 900/ /Diskan/2024
Sifat : -
Lampiran : 01 (Satu) Berkas
Perihal : Sosialisasi SKAI

Yth. Kepala Desa Pantai Harapan
di –
Tempat

Sehubungan dengan Diklat Pim PKN II tetang Proyek Perubahan Transpormasi Tata Kelola Tempat Pelelangan Ikan Sungai Lumpur Berbasis Teknologi pada Dinas Perikanan kabupaten Ogan Komering Ilir maka kami mengharapkan kesediaan bapak/Ibu dan saudara/i untuk menghadiri acara rapat tersebut pada :

Hari : Senin
Tanggal : November 2024
Pukul : 09.30 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir

Demikian Undangan ini kami sampaikan, besar harapan kami agar Bapak/ibu dan Saudara/i dapat menghadiri acara tersebut. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Projec Leader

H. Ubaidillah, S.K.M,. M.K.M
Pembina Tingkat.I/IV.b
NIP. 197010051995021001

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PERIKANAN
Jl. Kayuagung-SP Padang Sukadana Kecamatan Kayuagung Telp. (0712) 321279, Fax (0712) 321279, 323632
email. dpkaboki@gmail.com Kayuagung 30651

Kayuagung, November 2024

Nomor : 900/ /Diskan/2024
Sifat : -
Lampiran : 01 (Satu) Berkas
Perihal : Sosialisasi SKAI

Yth. Kepala Desa Sungai Lumpur
di –
Tempat

Sehubungan dengan Diklat Pim PKN II tetang Proyek Perubahan Transpormasi Tata Kelola Tempat Pelelangan Ikan Sungai Lumpur Berbasis Teknologi pada Dinas Perikanan kabupaten Ogan Komering Ilir maka kami mengharapkan kesediaan bapak/Ibu dan saudara/i untuk menghadiri acara rapat tersebut pada :

Hari : Senin
Tanggal : November 2024
Pukul : 09.30 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir

Demikian Undangan ini kami sampaikan, besar harapan kami agar Bapak/ibu dan Saudara/i dapat menghadiri acara tersebut. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Projec Leader

H. Ubaidillah, S.K.M,. M.K.M
Pembina Tingkat.I/IV.b
NIP. 197010051995021001

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PERIKANAN
Jl. Kayuagung-SP Padang Sukadana Kecamatan Kayuagung Telp. (0712) 321279, Fax (0712) 321279, 323632
email. dpkaboki@gmail.com Kayuagung 30651

Kayuagung, November 2024

Nomor : 900/ /Diskan/2024
Sifat : -
Lampiran : 01 (Satu) Berkas
Perihal : Sosialisasi SKAI

Yth. Kepala Desa Sungai Lumpur
di –
Tempat

Sehubungan dengan Diklat Pim PKN II tetang Proyek Perubahan Transpormasi Tata Kelola Tempat Pelelangan Ikan Sungai Lumpur Berbasis Teknologi pada Dinas Perikanan kabupaten Ogan Komering Ilir maka kami mengharapkan kesediaan bapak/Ibu dan saudara/i untuk menghadiri acara rapat tersebut pada :

Hari : Senin
Tanggal : November 2024
Pukul : 09.30 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir

Demikian Undangan ini kami sampaikan, besar harapan kami agar Bapak/ibu dan Saudara/i dapat menghadiri acara tersebut. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Projec Leader

H. Ubaidillah, S.K.M,. M.K.M
Pembina Tingkat.I/IV.b
NIP. 197010051995021001

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PERIKANAN

Jl. Kayuagung-SP Padang Sukadana Kecamatan Kayuagung Telp. (0712) 321279, Fax (0712) 321279, 323632
email. dpkaboki@gmail.com Kayuagung 30651

Kayuagung, November 2024

Nomor : 900/ /Diskan/2024
Sifat : -
Lampiran : 01 (Satu) Berkas
Perihal : Rapat Sosialisasi SKAI

Yth. Tim Efektif Pim PKN II
di –
Tempat

Sehubungan dengan Diklat Pim PKN II tetang Proyek Perubahan Transpormasi Tata Kelola Tempat Pelelangan Ikan Sungai Lumpur Berbasis Teknologi pada Dinas Perikanan kabupaten Ogan Komering Ilir maka kami mengharapkan kesediaan bapak/Ibu dan saudara/i untuk menghadiri acara rapat tersebut pada :

Hari : Senin
Tanggal : 06 Oktober 2024
Pukul : 09.30 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir

Demikian Undangan ini kami sampaikan, besar harapan kami agar Bapak/ibu dan Saudara/i dapat menghadiri acara tersebut. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Projec Leader

H. Ubaidillah, S.K.M,. M.K.M
Pembina Tingkat.I/IV.b
NIP. 197010051995021001

2. Dokumentasi

SOSIALISASI
Pemanfaatan e-SKAI Masyarakat Nelayan TPI Sungai Lumpur

POS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDU
DESA ONLINE (POSYANDUKDES)

3. Absensi

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PERIKANAN
Jl. Kayuagung - SP.Padang Komplek Pasar Benih No... Kel. Sukadana Kayuagung , 30611
Telp. (0712) 321279,323632 Fax (0712) 321279,323632 Email: dkpkaboki@gmail.com

DAFTAR HADIR PERTEMUAN RAPAT

Hari :
Tanggal : November 2024
Waktu : 09.30 s/d Selesai
Tempat : Dinas Perikanan

NO	NAMA	JABATAN/PANGKAT	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
1	M. Refly, S. Sos., M.M	Mentor	1.	
2	H. Ubaidilah, S.K.M., M.K.M	Pelaksana (Project Leader)	2.	
3	Syawal Harahap, S.Sos., M.Si	Tim Administrasi	3.	
4	Romadanu, S.Pi	Tim Administrasi	4.	
5	Zaizala Akbar, S.Pi	Tim Administrasi	5.	
6	Tedi Irawan, S.Pi	Tim Administrasi	6.	
7	Romico Iswandy, S.St.Pi., M.Si	Tim Teknis	7.	
8	Deon Dwi Cahyo, S.Pi	Tim Teknis	8.	
9	Ferly Apriyanto, S.Pi	Tim Teknis	9.	
10	Pretty Mayang Septika, S.Pi	Tim Teknis	10.	
11	Kasno, Amd	Tim Teknis	11.	
12	Arpin Kusuma, A.Md	Tim Teknis	12.	
13	Saadi	Tim Teknis	13.	
14	Diana Septa Masari, S.H	Tim IT	14.	
15	Gabriansyah Yusuf Pratama, S.Pi	Tim IT	15.	
16	Bayu Iswahyudi, SP	Tim IT	16.	
17	Andi Ayazidi Argo, S.Pi	Tim IT	17.	

Kayuagung, November 2024

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Ogan Komering Ilir

H. Ubaidilah, S.K.M, M.K.M
Penata Tingkat I / IV.b
Nip. 197010051995021001

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PERIKANAN
Jl. Kayuagung-SP Padang Sukadana Kecamatan Kayuagung Telp. (0712) 321279, Fax (0712) 321279, 323632
email. dpkaboki@gmail.com Kayuagung 30651

DAFTAR NAMA – NAMA KELOMPOK NELAYAN

No	Nama Desa	Nama Kelompok	Nama Ketua Kelompok
1.	Desa Sungai Lumpur Kecamatan Cengal	KUB PUTRA NELAYAN	KASMAN
		KUB NELAYAN HARAPAN	SARODA
		KUB MUTIARA LAUT	MAED
		KUB NELAYAN ABADI	KAILANI
	Desa Pantai Harapan Kecamatan Cengal	KUB NYATAKANLAH	GUNAWAN
		KUB TUNAS MUDA	MUSTARIM
		KUB NELAYAN SEJAHTERA	MULYADI
		KUB NELAYAN BERSAMA	IRIANTO
		KUB SAHABAT NELAYAN	ARMADA
		KUB JAYA BERSAMA	MAT SANI

MEMBANGUN KESEPAHAMAN (MOU) DENGAN STAKEHOLDER TERKAIT

1. MoU terkait manajemen kerjasama pengelolaan aplikasi GPS area tangkap Ikan

NOTA KESEPAHAMAN

(*MEMORANDUM OF UNDERSTANDING*)

ANTARA

DINAS PERIKANAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DAN

DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANGKA TENGAH

NOMOR : 523 / 403 /Diskan.OKI/XII/2024

NOMOR : 523/1422/DIPERKAN/2024

TENTANG

PENYEDIAAN LAYANAN DAERAH POTENSIAL PENANGKAPAN IKAN PADA APLIKASI SiDOLPIN

Pada hari ini Jum'at tanggal Tiga Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (13-12-2024) bertempat di Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : H. Ubaidilah, S.K.M, M.K.M
   NIP : 197010051995021001
   Jabatan : Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir

   Dalam menjalankan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : Imam Soehadi, S.Pi, M.Si
   NIP : 198102272006041009
   Jabatan : Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah

   Dalam menjalankan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Kedua belah pihak masing-masing telah sepakat dan setuju untuk mengikat diri dalam mengadakan kerja sama Penyediaan Layanan Daerah Potensial Penangkapan Ikan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal di bawah ini.

TUJUAN

PASAL 1

Kerja sama ini bertujuan untuk Pengembangan Daerah Potensial Ikan serta Peningkatan Produksi Nelayan serta Pemberian Layanan Daerah Potensial Penangkapan Ikan pada Aplikasi SiDOLPIN kepada nelayan.

BENTUK KERJA SAMA

PASAL 2

PIHAK KEDUA memberikan bantuan Pemberian Layanan Daerah Potensial Penangkapan Ikan sepanjang dibutuhkan oleh **PIHAK PERTAMA.**

RUANG LINGKUP

PASAL 3

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

1. Pemberian bantuan pengembangan Daerah Potensial Penangkapan Ikan.
2. Pemberian data titik Potensial Penangkapan Ikan pada nelayan.
3. Hal-hal lainnya yang dianggap perlu dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

JANGKA WAKTU

PASAL 4

1. Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK** dan berlaku untuk...1....tahun.
2. Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
3. Pemutusan Nota Kesepahaman ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.
4. Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila:
   a. di kemudian hari ada ketentuan peraturan perundangan-undang yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman.
   b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan dalam Pasal 1.

ANGGARAN

PASAL 5

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KERAHASIAAN

PASAL 6

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini.

2. Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

KETENTUAN LAINNYA

PASAL 7

1. Nota Kesepahaman ini tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
2. **PARA PIHAK** dapat membuat satu Perjanjian Kerja Sama atau lebih yang mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
3. Nota Kesepahaman ini tetap dapat dijalankan oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik meskipun tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
4. Nota Kesepahaman dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.

PENUTUP

PASAL 8

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dikemudian hari oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam addendum dan/atau amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari kerja sama ini.
2. Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermaterai cukup, sama bunyinya, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
H. UBAIDILAH, S.K.M, M.K.M	**IMAM SOEHADI, S.Pi, M.Si**
Pembina Tingkat I / IV.b	Pembina Tingkat I / IV.b
NIP. 197010051995021001	NIP. 198102272006041009

2. Surat Rencana Kunjungan Kerja

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DINAS PERIKANAN

Jalan Kayuagung – Sp.Padang Kelurahan Sukadana Provinsi Sumatera Selatan, 30611
Telp. (0712) 323632 Fax (0712) 323632 Email : perikanan212kab.oki@gmail.com

Kayuagung, 10 Desember 2024

Nomor : 523/ 397 /Diskan.OKI/XII/2024
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Rencana Kunjungan Kerja

Yth. Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Bangka Tengah
Di
Tempat

Sehubungan dengan rencana Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering ilir untuk menjalin kerjasama dengan Dinas Perikanan Kabupaten Bangka tengah melalui nota kesepahaman *(Memorandum of Understanding)* dalam rangka meningkatkan sistem layanan daerah berbasis aplikasi khususnya pada penggunaan aplikasi daerah potensial penangkapan ikan (*Fishing Ground*) untuk nelayan. Untuk itu kami bermaksud melakukan kunjungan kerja pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 12 Desember 2024
Pukul : 09.30 wib s.d selesai
Tempat : Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah

Demikian disampaikan atas bantuan dan kerja samanya diucapkan terimakasih.

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Ogan Komering Ilir

H. UBAIDILAH, S.K.M., M.K.M
Pembina Tingkat I / IV.b
NIP. 19701005 199502 1 001

3. Dokumentasi